



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 mengamanatkan bahwa RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani serta dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Timur yang terdiri dari Badan-badan, Dinas-dinas dan Kantor-kantor.

8. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah Kabupaten Barito Timur.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai berikut :
  - a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.
  - b. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.
- (2) Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 adalah :
  - a. sebagai acuan bagi seluruh OPD di Kabupaten Barito Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2020;
  - b. sebagai dasar bagi OPD untuk memfinalkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun Anggaran 2020;
  - c. sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD Kabupaten Barito Timur dengan Bupati Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020;

**BAB III**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB V PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**PEMBANGUNAN DAERAH**

**Pasal 4**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2019.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 5**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 ini dapat ditinjau kembali sepanjang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal **12 AGUSTUS** 2019

BUPATI BARITO TIMUR,



**AMPERA A. Y. MEBAS**

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal **12 AGUSTUS** 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



**ESKOP**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I.1</b>
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I.5
1.3 Hubungan antar Dokumen	I.7
1.4 Maksud dan Tujuan	I.9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I.10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	<b>II.1</b>
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	II.1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II.2
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.9
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II.14
2.1.3.1 Pendidikan	II.14
2.1.3.2 Keagamaan	II.16
2.1.3.3 Tingkat Pengangguran	II.17
2.1.3.4 Prasarana dan Sarana Energi Listrik	II.18
2.1.3.5 Prasarana dan Sarana Air Bersih	II.18
2.1.3.6 Prasarana dan Sarana Pos dan Telekomunikasi	II.18
2.1.3.7 Pemerintahan Umum	II.19
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II.20
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD	II.23
2.3 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Barito Timur	II.44
2.3.1 Permasalahan daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan sasaran pembangunan Daerah	II.44
2.3.1.1 Masalah pengembangan Perekonomian Daerah	II.44

2.3.1.2	Masalah Infrastruktur Dasar	II.48
2.3.1.3	Masalah Sumber Daya Manusia	II.50
2.3.1.4	Masalah Keragaman Budaya	II.51
2.3.1.5	Masalah Birokrasi	II.52
2.3.2	Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah	II.54
<b>BAB III</b>	<b>KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>III.1</b>
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III.2
3.1.1	Arah Kebijakan Nasional	III.6
3.1.2	Arah kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah	III.7
3.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	III.7
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III.10
3.2.1.1	Prakiraan Target Pendapatan Daerah Tahun 2020	III.13
3.2.1.2	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2020	III.15
3.2.1.3	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2020	III.17
<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>IV.1</b>
4.1	Tujuan dan sasaran Pembangunan	IV.4
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV.11
4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional	IV.11
4.2.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	IV.12
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Timur	IV.13
4.3	Inovasi Daerah	IV.16
4.4	Program dan Kegiatan yang Mendukung Program Provinsi dan Program Nasional	IV.17
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b>	<b>V.1</b>
5.1	Rencana Program dan Kegiatan untuk mencapai Prioritas dan Sasaran Pembangunan	V.2
5.2	Rencana Program dan Kegiatan Seluruh Penyelenggaraan Bidang Urusan	V.83
5.3	Gambaran Konsistensi Program Kegiatan dalam RKPD Tahun 2020	V.84
5.4	Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur	V.88

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

**VI.1**

**BAB VII PENUTUP**

**VII.1**

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis pada *money follow program* melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan

pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai *stakeholders* dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Kebijakan yang akan diambil pada periode ini menjadi salah satu simbol keberhasilan perumusan perencanaan pembangunan jangka menengah Tahun 2018-2023, karena dokumen RKPD Tahun 2020 merupakan tahun kedua RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023. Oleh karena itu, sudah selayaknya perencanaan Tahun 2020 memerlukan optimalisasi dalam mengevaluasi pembangunan periode sebelumnya serta memonitor pelaksanaan pembangunan tahun berjalan sebagai dasar kebijakan penentuan program prioritas .

Pengkajian hasil pembangunan periode sebelumnya sangat menentukan ketepatan dasar-dasar kebijakan pembangunan daerah antara periode sebelumnya dengan periode setelahnya. Hal tersebut menjadi penting sebagai kerangka penyeimbang rangkaian utuh pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam memecahkan permasalahan dan isu strategis yang berkembang akan menyebabkan ketidaktepatan sasaran prioritas pembangunan, sehingga optimalisasi pembangunan daerah sulit tercapai. Oleh karena itu dengan memahami kondisi Kabupaten Barito Timur pada saat ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih diterus mengiringi, dan isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan terutama dalam penyusunan dokumen rencana tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Bahwa berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja output untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan RKPD dilakukan melalui 5 (lima) tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Barito Timur ;
- 2) Tahap Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Barito Timur;
- 3) Tahap Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Barito Timur;
- 4) Tahap Perumusan Rancangan Akhir; dan
- 5) Tahap Penetapan RKPD Kabupaten Barito Timur.

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara RI Tahun

2014 Nomor 115); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 115);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 9) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 - 2028 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

### **1.3. Hubungan antar Dokumen**

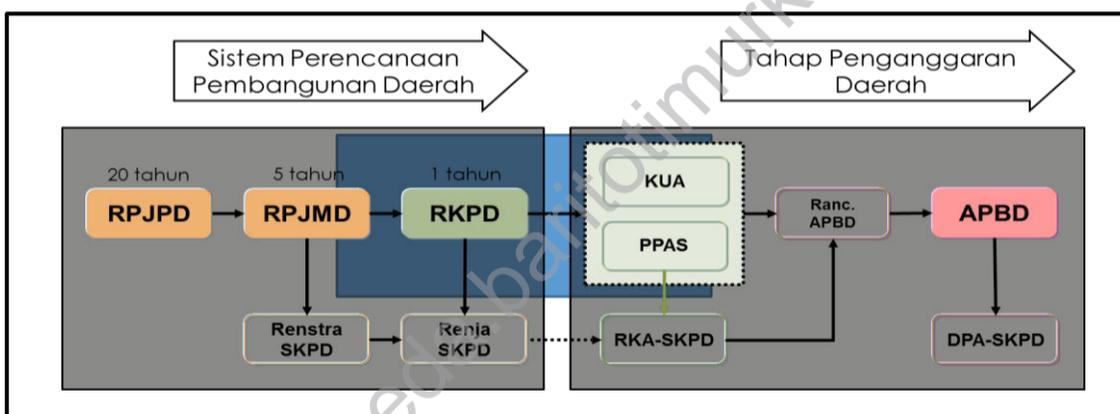
Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur khususnya bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

**Gambar I.1**  
**Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan**



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Sistem tersebut dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional; serta

3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya.

Dari gambar 1.1. di atas, tampak bahwa sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD 2020 disusun dengan menjaga keterkaitan (*linkage*) dan konsistensi dengan berbagai dokumen dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional, serta keterkaitannya dari sisi penganggaran. Keterkaitan dan konsistensi dimaksud ditunjukkan oleh kebijakan, program, dan kegiatan antar dokumen yang tidak saling bertentangan, namun selaras dan sinergis satu sama lain.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020, yaitu:

- a. Menyinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan Provinsi yang tertuang di dalam RKPD Provinsi Tahun 2020 dan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Barito Timur;
- b. Sebagai landasan untuk sinkronisasi antara prioritas dan program strategis Provinsi dengan prioritas dan program pembangunan daerah;

- c. Sebagai landasan penetapan program dan kegiatan perangkat daerah;
- d. Sebagai pedoman penyusunan KUA, PPAS, dan sebagai rujukan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2020.

### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I. Pendahuluan.**

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika dokumen RKPD.

#### **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

#### **Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.**

Memuat penjelasan tentang Arah kebijakan ekonomi daerah serta Arah kebijakan keuangan daerah.

#### **Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.**

Mengemukakan secara eksplisit Tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan daerah.

#### **Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

## Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

## Bab VII Penutup.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1 Kondisi Umum Daerah**

Kabupaten Barito Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas 3.834 km<sup>2</sup> (atau 2,50 % dari luas Provinsi Kalimantan Tengah : 153.564 Km<sup>2</sup>), menduduki urutan kedua belas terluas dari 14 Kabupaten/kota di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, dengan jarak tempuh sekitar 418 Km dari Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah (Palangka Raya).

Kabupaten Barito Timur yang beribukota di Tamiang Layang terletak antara 1°2' Lintang Utara dan 2°5' Lintang Selatan, 114°-115° Bujur Timur, memiliki batas-batas konfigurasi luar sesuai administratif adalah :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan kondisi fisik wilayah (fisiografi) Kabupaten Barito Timur, pada bagian utara dan timur sebagian besar wilayah daratan dengan tingkat ketinggian antara 0 – 50 meter diatas permukaan laut ( dpl ) dan tingkat kemiringan antara 0 – 8 %, sedangkan pada bagian barat dan selatan terdiri atas daerah rawa. Berdasarkan fisiografi wilayah dapat digolongkan 4 (empat) bagian utama sebagai berikut :

- 1). Hutan Belantara : 146.765 Ha. ( 38,28 % ).
- 2). Rawa – rawa : 122.001 Ha. ( 31,82 % ).
- 3). Sungai / Danau / Genangan Air : 10.467 Ha. ( 2,73 % ).
- 4). Tanah Lainnya : 104.400 Ha. ( 27,17 % ).

## 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

### a. Luas Wilayah

Secara administratif Kabupaten Barito Timur terdiri dari 10 Kecamatan dan 105 desa/kelurahan. Kecamatan Dusun Timur merupakan kecamatan yang paling luas yaitu 868 km<sup>2</sup> atau sebesar 22,75% dari total luas kabupaten, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Karusen Janang dengan luas 178 km<sup>2</sup> (4,64%).

**Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Barito Timur Menurut Kecamatan**

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km2)	% Terhadap Luas Kabupaten
1.	Benua Lima	Pasar Panas	258	6,73
2.	Dusun Timur	Tamiang Layang	867,70	22,63
3.	Awang	Hayaping	203	5,29
4.	Patangkep Tutui	Bentot	255	6,65
5.	Dusun Tengah	Ampah	371	9,68

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	% Terhadap Luas Kabupaten
6.	Pematang Karau	Bambulung	579	15,10
7.	Paju Epat	Telang	664,30	17,33
8.	Raren Batuah	Unsum	186	4,85
9.	Paku	Tampa	272	7,09
10.	Karusen Janang	Dayu	178	4,64
<b>TOTAL</b>			<b>3.834</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

### b. Kondisi Topografi

Secara topografi, Kabupaten Barito Timur pada bagian utara dan timur sebagian besar merupakan dataran rendah dengan tingkat ketinggian berkisar antara 0 meter sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan antara 0-8%, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Awang dan Patangkep Tutui yang merupakan daerah perbukitan. Sedangkan pada bagian barat dan selatan merupakan daerah rawa. Topografi wilayah Kabupaten Barito Timur terdiri dari 35% daerah datar/landai dan 65% daerah bergelombang.

### c. Geologi dan Tanah

Jenis tanah yang mendominasi wilayah Kabupaten Barito Timur adalah Podsolik Merah Kuning (PMK) dan Podsol dengan luas 218.932 Ha, diikuti oleh jenis tanah regosol, organosol, gley dan humus, aluvial dan danau, rawa serta sungai.

Secara umum wilayah Kabupaten Barito Timur mendapat penyinaran matahari lebih dari 50% sepanjang tahun. Udaranya

relatif panas yaitu siang hari mencapai 34,60C dan malam hari 21,00C, sedangkan rata-rata curah hujan pertahunnya relatif tinggi yaitu mencapai 325,60 mm.

Jenis dan penamaan tanah dilakukan menurut *System Soil Taxsonomy* (USDA, 1999) pada tingkat ordo tanah. Berdasarkan peta tanah tinjau skala 1 : 1.000.000 (Puslitanak 2000) dan Peta *Land System* dan *Land Stability* skala 1 : 250.000 (Report, 1985) di Kalimantan Tengah terdapat 8 (delapan) ordo tanah yang tersebar pada wilayah Kabupaten/Kota yaitu terdiri dari Histosol, Entisol, Inceptisol, Ultisol, Oxisol, Alfisol, Mollisol dan Spodosol.

Demikian juga untuk wilayah Kabupaten Barito Timur yang sebagian besar berada pada wilayah daratan dan perbukitan dengan tanah mineral, terutama mineral, ordo tanah Ultisol, Oxisol, Alfisol dan Mollisol pada lahan kering sebagian besar telah dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan terutama kebun karet dan kelapa sawit.

#### **d. Klimatologi**

Adapun karakteristik iklim (Curah Hujan) di wilayah Kabupaten Barito Timur sebagai berikut :

1. Type Iklim : Tropis Lembab dan Panas (A)
2. Zona Agroklimat : B 1
3. Klasifikasi Koppen : Alfa
4. Suhu Udara : 21,00 °C – 35,90 °C
5. Curah Hujan rata-rata : 319,39 mm, rata-rata hujan 242  
: Hari/Tahun
6. Klasifikasi Schmidt dan Ferguson : Type A (Q = 14,3) dan Type B (Q = 33,3)

Berdasarkan data curah hujan pada Tahun 2017 di Kabupaten Barito Timur rata-rata curah hujan setiap bulan mengalami penurunan cukup besar yaitu 319,39 mm di tahun 2016 menjadi 232,06 mm di tahun 2017. Penurunan curah hujan terbesar terjadi di bulan September 2017. Meskipun rata-rata curah hujan mengalami penurunan, tidak demikian dengan banyaknya hari hujan setiap bulannya yang justru mengalami peningkatan dari 20,17 di tahun 2016 menjadi 20,50 di tahun 2017. Berdasarkan data kecepatan angin lebih banyak berhembus ke arah utara. Kecepatan angin tertinggi pada bulan Desember dan cenderung merata sepanjang tahun. Perkiraan iklim yang tepat sangatlah penting bagi para petani dan nelayan keramba untuk menentukan musim tanam dan penyebaran bibit ikan yang tepat. Namun perubahan iklim secara global turut mempengaruhi iklim sehingga apabila diamati dengan seksama maka data curah hujan dan angin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 sulit untuk diprediksi seperti pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Karakteristik Curah Hujan, Jumlah Hujan, Kecepatan dan Arah Angin setiap Bulan pada Wilayah Kabupaten Barito Timur 2017

No.	Bulan	Hujan		Angin	
		Curah Hujan (mm)	Jumlah Hujan (hari)	Kecepatan Rata-rata (Knot)	Arah Angin
1.	Januari	311,40	25,00	17,00	Barat Laut
2.	Pebruari	221,70	14,00	7,00	Barat Laut
3.	Maret	410,70	21,00	12,00	Utara
4.	April	224,70	24,00	12,00	Utara
5.	Mei	240,90	27,00	12,00	Barat
6.	Juni	187,30	13,00	10,00	Utara
7.	Juli	133,10	18,00	10,00	Utara
8.	Agustus	209,60	23,00	8,00	Selatan
9.	September	84,80	12,00	10,00	Utara

No	Bulan	Hujan		Angin	
		Curah Hujan (mm)	Jumlah Hujan (hari)	Kecepatan Rata-rata (Knot)	Arah Angin
10.	Oktober	128,30	18,00	15,00	Barat
11.	Nopember	294,40	25,00	14,00	Selatan
12.	Desember	337,80	26,00	25,00	Selatan
	Rata-rata / Mean	232,06	20,50	12,67	-

Sumber Data :BPS Kabupaten Barito Dalam Angka 2018

Tenaga ahli dan peralatan yang memenuhi standar untuk mengamati iklim dan cuaca amatlah penting sebagai komponen yang akan menentukan peningkatan hasil panen petani dan nelayan.

#### e. **Potensi Unggulan Daerah**

Kabupaten Barito Timur memiliki berbagai macam potensi unggulan daerah antara lain dari sektor pertanian, perkebunan sawit dan karet. Sektor kehutanan dalam bentuk produk hasil hutan. Sektor perikanan berupa ikan air tawar dari hasil perikanan tangkap, kolam dan keramba. Sektor peternakan berupa sapi, babi, kambing dan ayam. Sektor pertambangan berupa bahan galian dan batu bara. Sektor pariwisata berupa kebudayaan daerah, cagar wisata (anggrek alam, goa, air terjun dan danau) dan cagar budaya. Apabila semuanya atau sebagian dikelola dengan baik, maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

## f. Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan penduduk yang merupakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek).

### 1. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 berjumlah 120.254 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 31.625 rumah tangga yang penyebarannya berdasarkan wilayah Kecamatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3. Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Ratio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Benua Lima	3.657	3.271	6.928	112
2.	Dusun Timur	15.422	14.972	30.394	103
3.	Paju Epat	2.615	2.361	4.976	111
4.	Awang	3.159	3.016	6.175	105
5.	Patangkep Tutui	5.040	4.463	9.503	113
6.	Dusun Tengah	13.433	13.000	26.433	103
7.	Raren Batuah	4.837	4.345	9.182	111
8.	Paku	4.490	4.184	8.674	107
9.	Karusen Janang	2.869	2.689	5.558	107
10.	Pematang Karau	6.440	5.991	12.431	107
	Jumlah	<b>61.962</b>	<b>58.292</b>	<b>120.254</b>	<b>106</b>

Sumber Data : BPS Kabupaten Barito Timur (Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2018)

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk yang terbanyak ada di Kecamatan Dusun Timur yaitu 30.394 jiwa dan Dusun Tengah yaitu 26.433 jiwa, ini menggambarkan bahwa kedua Kecamatan tersebut memiliki pusat kekuatan yang menjadi daya tarik bagi masyarakat.

Kecamatan Dusun Tengah sangat strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan yang terletak di daerah segi tiga antara Kabupaten Barito Timur, Barito Utara dan Barito Selatan. Sedangkan Kecamatan Dusun Timur merupakan pusat pendidikan dan pemerintahan dan mulai berkembang kearah kota perdagangan.

## 2. Kondisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Secara umum Sex Ratio di 10 Kecamatan relative sama yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Sex Ratio yang lebih besar dari 100. Pada Tahun 2017 setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki.

## 3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan pendudukan Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 adalah 31,37 jiwa/km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya tingkat kepadatan tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )		Jumlah Penduduk (jiwa)		Tingkat Kepadatan (jiwa/ Km <sup>2</sup> )
		Km2	%	Jumlah	%	
1.	Benua Lima	258,00	6,73	6.928	5,76	26,85
2.	Dusun Timur	867,70	22,63	30.394	25,27	35,03
3.	Paju Epat	664,30	17,33	4.976	4,14	7,49
4.	Awang	203,00	5,29	6.175	5,13	30,42
5.	Patangkep Tutui	255,00	6,65	9.503	7,90	37,27
6.	Dusun Tengah	371,00	9,68	26.433	21,98	71,25
7.	Raren Batuah	186,00	4,85	9.182	7,64	49,37
8.	Paku	272,00	7,09	8.674	7,21	31,89
9.	Karusen Janang	178,00	4,64	5.558	4,62	31,22
10.	Pematang Karau	579,00	15,10	12.431	10,34	21,47
	Jumlah	<b>3.834,00</b>	<b>100,00</b>	<b>120.254</b>	<b>100,00</b>	<b>31,37</b>

Sumber Data: BPS Kabupaten Barito Timur (Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2018)

Dari Tabel 4 di atas juga terlihat bahwa Kecamatan Dusun Tengah memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi, karena Kecamatan Dusun Tengah mempunyai letak yang strategis dan tempat pertemuan antara Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara sehingga Kecamatan Dusun Tengah memungkinkan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan, yaitu pusat peredaran barang dan sentra pengembangan pertanian tanaman pangan (lumbung pangan/penyangga pangan Barito Timur).

### **2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Pola pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator untuk mengetahui gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan berarti semakin rendah tingkat kesejahteraannya, demikian juga sebaliknya.

Rata-rata pengeluaran untuk komoditas makanan tahun 2017 tertinggi adalah untuk makanan dan minuman jadi (25,23%), ikan (12,69%), padi-padian (12,32%), sedangkan komoditas lainnya berada di bawah 10%. Rata-rata pengeluaran untuk komoditas non makanan 2017 tertinggi adalah untuk komoditas perumahan dan fasilitas perumahan (58,39%), dan terendah adalah keperluan pesta dan upacara (1,39 persen).

#### **1. Pendapatan Perkapita Tahun 2017**

Pendapatan perkapita menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat berdasar komoditi yang dihasilkan. Pendapatan perkapita Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga konstan 2010 di Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017 (juta rupiah)

Tahun	ADHB (Juta Rp)	Persentase Kenaikan (%)	ADHK (Juta Rp)	Persentase Kenaikan (%)
2013	41,41	5,51	36,00	3,49
2014	43,20	4,29	36,81	2,26
2015	44,38	3,84	37,60	2,15
2016*	48,10	7,30	38,60	2,57
2017**	52,60	9,21	39,70	3,07

Sumber Data :BPS Kabupaten Barito Timur (Barito Timur Dalam Angka 2018)

Dari Tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa Perekonomian Kabupaten Barito Timur dari Tahun 2013 sampai Tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Demikian juga pertumbuhan ekonomi berdasarkan Harga Berlaku dan berdasarkan Harga Konstan keduanya mengalami kenaikan secara nyata. Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang positif ini menggambarkan perkembangan proses pembangunan yang dilaksanakan berhasil meningkatkan pendapatan domestik penduduk Kabupaten Barito Timur. Namun demikian, besarnya nilai PDRB perkapita ini masih belum dapat menggambarkan tingkat penyebaran pendapatan masyarakat di setiap strata ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memberikan jaminan akan tingginya tingkat kemakmuran bagi masyarakat, karena hal tersebut dipengaruhi juga oleh tingkat pertumbuhan penduduk.

## 2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian adalah merupakan tatanan atau gambaran keadaan ekonomi suatu daerah yang mana secara makro dapat dibagi kedalam tiga kelompok besar meliputi : primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini :

Tabel 10. Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 dan ADHB di Kabupaten Barito Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Miliar rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016*		2017**	
		ADHK	ADHB								
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	780,5	887,5	791,1	941,7	838,8	1.010,2	871,6	1070,7	928,6	1.173,1
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.759,4	2.001,8	1.855,0	2.048,0	1.875,5	1.997,2	1.939,9	2.104,9	2.023,5	2.339,8
3.	Industri Pengolahan	206,9	246,3	224,3	287,9	246,0	336,7	270,0	397,2	291,2	463,8
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	1,0	1,0	1,2	1,0	1,5
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,7	2,3	1,8	2,7	2,0	3,1	2,2	3,7	2,3	4,1
6.	Konstruksi	229,1	263,8	252,2	311,6	283,4	374,5	308,5	444,8	324,5	505,2
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	200,5	236,8	216,4	280,2	239,8	330,8	261,2	384,2	284,7	439,4
8.	Transportasi Dan Pergudangan	144,8	160,9	156,8	188,7	169,7	220,8	185,8	258,2	200,3	298,5
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39,6	48,9	43,1	56,9	47,2	66,6	51,5	78,8	55,6	90,8
10.	Informasi dan Komunikasi	42,3	43,00	46,3	47,6	51,8	54,9	56,9	64,4	62,2	73,3
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	40,8	47,9	44,0	52,9	48,6	60,2	53,5	69,0	57,7	78,0
12.	Real Estate	73,7	89,8	77,2	101,8	81,0	113,4	84,6	128,8	92,0	149,2
13.	Jasa Perusahaan	2,7	3,3	2,8	3,6	3,0	4,1	3,1	4,6	3,4	5,5
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	123,0	155,1	126,6	167,9	137,4	192,2	146,6	220,4	155,7	249,3
15.	Jasa Pendidikan	148,9	176,9	155,4	188,6	170,9	226,5	187,9	271,4	204,5	305,7
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50,5	57,3	53,1	65,2	58,9	78,8	64,2	92,5	69,2	104,6
17.	Jasa Lainnya	17,3	21,89	18,3	24,3	20,0	28,9	21,6	32,9	23,4	38,3
	PDRB	3.862,5	4.444,3	4.065,2	4.770,2	4.274,8	5.099,0	4.510,1	5.627,8	4.779,9	6.320,0

Sumber Data : BPS Kabupaten Barito Timur (Barito Timur Dalam Angka 2018)

Pembangunan daerah tidak pernah terlepas dari pertumbuhan ekonomi regional baik mikro maupun makro.

Berkenaan dengan hal tersebut, sektor-sektor lapangan usaha yang memberikan nilai tambah bagi produksinya akan menjadikan roda ekonomi wilayah berputar meskipun ada beberapa investasi yang berasal dari luar daerah. Kontribusi sektor ekonomi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dalam

menentukan sektor andalan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di masyarakat yang terlihat dari nilai tambah suatu produk/olahan produk di wilayah tersebut. Struktur ekonomi suatu wilayah juga dapat terlihat dari data PDRB karena setiap sektor ekonomi memiliki andil tersendiri dalam membentuk peta perekonomian wilayah.

Struktur perekonomian Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 masih didominasi oleh Sektor Primer, berarti bahwa struktur perekonomian di Kabupaten Barito Timur masih bertumpuk kepada tingkat dasar dan sangat tergantung kepada alam. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Barito Timur Berdasarkan Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha untuk Tahun 2013-2017 seperti terlihat pada Tabel 11 berikut ini :

Tabel 11. Distribusi Persentase PDRB Atas dasar harga berlaku di Kabupaten Barito Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Persen)

No.	Sektor	Tahun				
		2013	2014	2015	2016*	2017**
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,97	19,74	19,81	19,03	18,56
2.	Pertambangan dan Penggalian	45,04	42,93	39,17	37,40	37,02
3.	Industri Pengolahan	5,54	6,04	6,60	7,06	7,34
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,07	0,06
6.	Konstruksi	5,94	6,53	7,35	7,90	7,99
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	5,33	5,87	6,49	6,83	6,95
8.	Transportasi Dan Pergudangan	3,62	3,96	4,33	4,59	4,72

9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,10	1,19	1,31	1,40	1,44
10.	Informasi dan Komunikasi	0,97	1,00	1,08	1,14	1,16
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,08	1,11	1,18	1,23	1,23
12.	Real Estate	2,02	2,13	2,22	2,29	2,36
13.	Jasa Perusahaan	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,49	3,52	3,77	3,92	3,94
15.	Jasa Pendidikan	3,98	3,95	4,44	4,82	4,84
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,37	1,53	1,64	1,66
17.	Jasa Lainnya	0,49	0,51	0,57	0,58	0,61
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Barito Timur (Barito Timur Dalam Angka 2018)

Berdasarkan Distribusi Prosentase PDRB atas dasar harga konstan 2013-2017, Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 37,02% disusul dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 18,56% serta sektor kontruksi 7,99% dan industri Pengolahan 7,34%.

### 3. Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (*continue*). Selain itu, laju inflasi juga merupakan proses dari suatu peristiwa dalam pasar dan bukan tergantung tinggi-rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga tinggi belum tentu menunjukkan besaran inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi secara *series* dalam kurun waktu tertentu.

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, laju inflasi Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 sebesar 4,2-4,3. Harapannya, dalam menjaga kestabilan inflasi akan memberikan kemampuan daya beli masyarakat karena harga tidak bergejolak dan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sebagai salah satu acuan kebijakan perekonomian, inflasi merupakan salah satu penghambat perkembangan perekonomian skala mikro karena kenaikan harga pasar yang tinggi akan mengakibatkan penduduk semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, *stakeholder* yang menangani pengendalian inflasi daerah harus memiliki berbagai inovasi program dan kegiatan dalam menurunkan fluktuasi harga positif yang terjadi namun tetap tidak mengurangi daya beli masyarakat.

### **2.1.3 Aspek Pelayanan Umum**

#### **2.1.3.1 Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan pendapatan melalui peningkatan ketrampilan dan produktivitas kerja. Pendidikan diharapkan dapat mengatasi keterbelakangan ekonomi lewat efeknya pada peningkatan kemampuan manusia dan motivasi manusia untuk

berprestasi. Pendidikan berfungsi menyiapkan salah satu input dalam proses produksi, yaitu tenaga kerja, agar dapat bekerja dengan produktif karena kualitasnya. Hal ini akan mendorong peningkatan hasil yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Kombinasi antara investasi dalam modal manusia dan modal fisik diharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi. Titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan adalah produktivitas tenaga kerja (*labor productivity*), dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, dan semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan tidak terlepas dari tersedianya sarana atau fasilitas pendidikan yang cukup memadai.

Kemudian, berdasarkan kinerja pendidikan Dasar dan Menengah ditinjau dari aspek pemerataan pendidikan, tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 sesuai jenjang pendidikan adalah: APK SD/MI sebesar 92,07%, APK SMP/MTs sebesar 76,07%, APK SMA/MA 70,79%.

Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 sesuai jenjang pendidikan adalah : APM SD/MI sebesar 98,47%, APM SMP/MTs 75,33%, APM SMA/MA sebesar 59,02%, dan Perguruan Tinggi sebesar 17,33%.

Berdasarkan pada data-data tersebut di atas, beberapa permasalahan pendidikan yang dihadapi di Kabupaten Barito Timur adalah : (a) masih rendahnya pemerataan pendidikan terutama untuk jenjang SMP dan SMA. Rendahnya pemerataan ini adalah akibat pembangunan sekolah-sekolah untuk tingkat SMP dan SMA

hanya ada di tingkat kecamatan, karena sulit dan jauhnya sehingga siswa usia SMP dan SMA yang berada di daerah kategori sulit tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang tersebut. Selain itu apabila dilihat perbandingan jumlah antar jenjang pendidikan, maka masih terjadi ketimpangan antara sekolah tingkat SD dengan tingkat SLTP apalagi untuk tingkat SLTA.

Khusus untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil harus mendapatkan penanganan yang sangat serius baik dari segi mutu pendidikan maupun prasarana dan sarana. (b) Masih rendahnya kualitas/mutu pendidikan dan relevansinya. Hal ini terkait dengan angka mengulang kelas, angka putus sekolah, kelayakan mengajar guru, kondisi sekolah/ruang kelas banyak yang rusak, terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan seperti; perpustakaan, ruang UKS, Laboratorium, ruang praktik, ruang serbaguna, bengkel dan lapangan olahraga.

#### **2.1.3.2 Keagamaan**

Kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Barito Timur telah mengarah pada kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, demikian pula dengan kesadaran serta toleransi antar umat beragama. Namun Kabupaten Barito Timur masih menghadapi munculnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pluralitas (kemajemukan) etnis, ras, agama dan kultur sebagai suatu realitas sosial yang ada di masyarakat sehingga perlu penanganan secara cermat dan hati-hati dalam pembinaan rasa kebangsaan.

### 2.1.3.3 Tingkat Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 sebesar 65.243 orang berkurang sebesar 1.102 orang dibandingkan Tahun 2015. Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 sebesar 62.188 orang berkurang sebanyak 2.740 orang dibanding Tahun 2015.

Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2017 berjumlah 62.188 orang. Dari total jumlah angkatan kerja sebanyak 65.243 orang atau 55,61% bekerja pada sektor pertanian dan selebihnya 44,39% bekerja pada sektor-sektor lainnya seperti: pertambangan; industri pengolahan; listrik dan air bersih; bangunan; perdagangan, Hotel dan Restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa.

Masih tingginya penduduk yang berusaha atau bekerja di sektor pertanian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi Barito Timur masih berorientasi pada sektor pertanian. Pada sektor ini tidak menuntut ketrampilan yang cukup tinggi sehingga sektor pertanian merupakan tempat berusaha bagi tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor lainnya. Hal ini mendorong tingkat produktivitas pekerja di sektor pertanian cenderung lebih rendah dibandingkan sektor lainnya.

Untuk jumlah dan persentase penduduk Kabupaten Barito Timur yang menganggur terus mengalami penurunan. Pada tahun 2017 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 95,32% mengalami peningkatan dibanding Tahun 2015 yaitu sebesar 80,43% dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2017 sebesar 4,68% atau sebesar 3.055 orang. Tahun 2015 Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 80,43% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tetap sebesar 2,14% atau sebesar 1.417 orang.

#### **2.1.3.4 Prasarana dan Sarana Energi Listrik**

Pada tahun 2017 jumlah pelanggan meningkat menjadi 33.720 pelanggan dengan jumlah listrik terjual berjumlah 29.253.120 Kwh. Apabila dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Barito Timur tahun 2017 yang berjumlah 30.755 rumah tangga, rumah tangga yang terlayani atau mampu menikmati energi listrik di Kabupaten Barito Timur sekitar 97 persen dari total jumlah rumah tangga.

#### **2.1.3.5 Prasarana dan Sarana Air Bersih**

Tahun 2016 jumlah pelanggan PDAM sebesar 4.049 pelanggan sedangkan untuk Tahun 2017 meningkat menjadi 4.200 pelanggan, terjadi kenaikan sebesar 3,60%. Apabila dibandingkan dengan jumlah air minum yang disalurkan menurut jenis konsumen terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2016 jumlah air minum yang disalurkan sebanyak 775.482 M<sup>2</sup> sedangkan untuk Tahun 2017 menjadi 965.831 M<sup>2</sup>.

#### **2.1.3.6 Prasarana dan Sarana Pos dan Telekomunikasi**

Banyaknya surat pos yang dikirim selama tahun 2016 melalui PT. Pos Indonesia Tamiang Layang dan Ampah tercatat mencapai 71.914 surat. Selain layanan surat pos, terdapat pula layanan paket pos sebanyak 16.077 Kg.

### **2.1.3.7 Pemerintahan Umum**

Terjadinya perubahan yang fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat menuntut adanya restrukturisasi organisasi dan penataan pegawai. Secara kuantitatif penataan pegawai telah mulai dilakukan, namun dalam hal penempatannya masih dijumpai ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan pejabat dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang harus diemban. Namun demikian kondisi ini diharapkan akan diantisipasi pada evaluasi struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Pada aspek sumber daya manusia aparat pemerintah, profesionalisme dan manajemen kepegawaian masih merupakan masalah besar dalam membenahan sistem birokrasi daerah pada era desentralisasi ini. Hal yang pertama dan utama yang dapat dilakukan dalam melakukan reformasi birokrasi di Kabupaten Barito Timur adalah penataan dengan mewujudkan jumlah/komposisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan baik dari sisi internal (kelembagaan) maupun eksternal instansi pemerintah. Kebutuhan tentu harus bersumber dari kebutuhan daerah untuk melayani masyarakat di daerah.

Selanjutnya mewujudkan pemerintahan yang bersih, perlu optimalisasi fungsi pengawasan dan perangkat hukum yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baru. Fungsi pengawasan dilakukan dalam upaya menjadi pendorong menuju penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang profesional, transparan dan akuntabel. Fungsi pengawasan ini selain dilakukan oleh lembaga pemerintahan (termasuk DPRD) juga dilakukan oleh

lembaga-lembaga non-pemerintahan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial (*social controll*) melalui media yang tersedia.

### **1. Aparatur Pemerintah**

Jumlah Pegawai Negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada tahun 2017 sebanyak 3.735 orang yang terdiri dari PNS Daerah. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah PNS Daerah yang berpendidikan SD berjumlah 18 orang, berpendidikan setingkat SLTP berjumlah 40 orang, berpendidikan setingkat SLTA berjumlah 669 orang, berpendidikan setingkat diploma/akademi berjumlah 996 orang, berpendidikan setingkat universitas (S1) berjumlah 1.850 orang dan pasca sarjana (S2) berjumlah 162 orang.

### **2. Administratif Pemerintahan**

Secara administratif pemerintahan, Kabupaten Barito Timur sampai dengan tahun 2017 memiliki atau membawahi 10 kecamatan dan 100 desa dan 3 kelurahan. Sepuluh Kecamatan tersebut adalah Kecamatan: Benua Lima, Dusun Timur, Awang, Patangkep Tutui, Dusun Tengah, Pematang Karau, Paju Epat, Raren Batuah, Paku dan Karusen Janang.

Untuk Tahun 2020 target desa berstatus swasembada sebanyak 7 desa, Desa berstatus swadaya sebanyak 72 desa dan desa berstatus swakarya sebanyak 22 desa.

#### **2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*)

merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing daerah Kabupaten Barito Timur terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah dan fokus fasilitas wilayah/infrastruktur.

## **1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

### **a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita**

Fokus kemampuan ekonomi daerah salah satunya diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah pengeluaran berupa uang yang dikeluarkan oleh satu penduduk dalam rumah tangga untuk dikonsumsi baik komoditas makanan maupun non makanan selama sebulan. Rata-rata pengeluaran per kapita meningkat selama lima tahun terakhir hingga pada tahun 2017 mencapai angka Rp. 602.120,-.

Rata-rata pengeluaran tertinggi komoditas makanan Tahun 2017 adalah untuk makanan dan minuman jadi (25,23%), ikan (12,69%) dan padi-padian (12,32%), sedangkan komoditas lainnya berada dibawah 10 persen. Rata-rata pengeluaran komoditas non makanan 2017 tertinggi adalah untuk komoditas perumahan dan fasilitas perumahan (64,24%), biaya kesehatan (23,28%) dan barang-barang lama (8,01%).

**Tabel 12 : Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan menurut Kelompok Barang Makanan di Kabupaten Barito Timur (Rp)**

No.	Tahun	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2013	504.962	437.908	942.870
2	2014	570.814	535.142	1.105.956
3	2015	512.031	611.432	1.123.463
4	2016	555.760	653.629	1.209.389
5	2017	602.120	481.779	1.083.899

Sumber: Bartim Dalam Angka 2018

### **b. Fokus Iklim Berinvestasi**

Iklim berinvestasi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik eksternal maupun internal. Iklim investasi akan bergerak positif jika kondusivitas suatu wilayah terjaga dengan baik dan memiliki jaminan terhadap keamanan, kondisi demokrasi, hingga aspek sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itulah, keberlangsungan dan kekonsistenan investasi yang masuk ke suatu wilayah menjadi penting adanya untuk menentukan kestabilan pertumbuhan ekonomi.

#### **✚ Kriminalitas**

Tingginya kriminalitas di suatu wilayah akan memicu penurunan status kenyamanan dalam berinvestasi oleh para investor. Situasi wilayah akan menjadi damai dan aman jika pihak yang berwenang dapat meredam atau meminimalisir kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Barito Timur. Secara umum, angka kriminalitas di Kabupaten Barito Timur cukup fluktuatif meningkat dan menurun secara tidak konsisten.

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD**

Dilaksanakannya evaluasi ini akan memberikan masukan mengenai ketidakcocokan atau kesalahan penetapan program prioritas, permasalahan baru yang timbul, hingga inefisiensi anggaran sehingga untuk perencanaan pembangunan ke depan dapat diantisipasi segala kendala maupun hambatan. Selain itu, evaluasi setiap tahapan pembangunan akan menyelaraskan setiap program kegiatan menuju ke arah satu koridor pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Timur.

Pada penyusunan RKPD Kabupaten Barito Timur 2020, hasil evaluasi dari status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah didasarkan atas rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2018. Selain itu, evaluasi yang tidak kalah pentingnya adalah realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja setiap SKPD pada tahun sebelumnya dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program terhadap target RKPD tahun 2015 dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Urusan Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan 22 urusan wajib, berikut ini diuraikan nilai capaian untuk setiap indikator pada setiap urusan wajib yang diselenggarakan. Urusan wajib bidang pendidikan terbagi menjadi fokus pendidikan secara umum, pendidikan dasar, pendidikan SLTP dan pendidikan SLTA atau pendidikan menengah. Berikut ini tabel hasil evaluasi bidang pendidikan.

**Tabel 13**  
**Capaian Indikator Bidang Pendidikan Tahun 2013-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja						REALISASI					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pendidikan	Angka melek huruf	%	98	98,02	98,04	98,06	98,06	99	71,03	96,19	96,19	98,53	98,82	99,69
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Angka pendidikan yang ditamatkan	%	100	100	100	100	100	100	98	99	99	100	100	98,22
	APK SD	%	100	100	100	100	100	100	95,87	111,74	109,65	109,65	109,65	92,34
	APM SD	%	95	96	96,5	96,5	98	98	87,02	92,78	99	97	98	92,51
	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah		1:87	1:87	1:87	1:87	1:87	1:87	1:95	1:99	1:92	1:92	1:87	1:87
	Rasio guru/murid	Orang	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:10	1:230	1:257	1:13	1:18	1:18
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	Orang	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:10	1:99	1:257	1:13	1:18	1:18
	APK SMP	%	84	85	86	86	88	88	80,66	101,51	118,5	101,32	88	81,93
	APM SMP	%	71,31	72,31	73,31	73,31	75,31	75,31	75,48	68,33	105	77,36	77,36	62,96
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	%	1:109	1:129	1:149	1:169	1:169	1:209	1:20	1:78	1:96	1:196	1:189	1:209
	Rasio guru terhadap murid	Orang	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:14	1:178	1:225	1:225	1:225	1:225
	APK SMA	%	74,15	74,25	74,35	74,35	74,55	74,55	70,23	71,7	103	98,38	98,38	98,38
	APM SMA	%	50,10	52,00	53,00	53,00	54,5	54,5	64,74	47,92	115	71,24	71,24	59,02
	Rasio ketersediaan	Orang	1:198	1:120	1:244	1:266	1:266	1:300	1:204	1:98	1:120	1:215	1:288	1:300

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja						REALISASI					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	sekolah terhadap penduduk usia sekolah													
	Rasio guru terhadap murid	Orang	1:14	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:13	1:178	1:167	1:15	1:15	1:15

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Pada indikator fokus pendidikan, pada tahun 2018 nilai capaian indikator angka melek huruf dan angka pendidikan yang ditamatkan masuk dalam kategori hijau, artinya target RPJMD tercapai, sedangkan indikator angka rata-rata lama sekolah sudah dapat tercapai.

Pada fokus pendidikan dasar dan pendidikan menengah indikator Angka Partisi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sudah relatif baik, dimana nilai capaian tahun 2018 untuk APK SD, SLTP dan SLTA sudah berhasil melampaui target, hal ini sudah cukup baik dimana untuk APM SLTP dan SLTA pada tahun 2018 masuk dalam kategori hijau.

Permasalahan yang dihadapi oleh bidang pendidikan di Kabupaten Barito Timur yang masih harus mendapatkan perhatian khusus adalah masih belum tercapainya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah serta rasio guru terhadap murid yang masih tinggi. Kebutuhan akan tenaga pendidik mutlak dibutuhkan guna mendorong terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar dan menengah masih jauh dari kondisi ideal dan masih jauh dari target RPJMD.

## 2. Urusan Kesehatan

Pada urusan wajib bidang kesehatan, mayoritas indikator RPJMD pada tahun 2013 dan 2018 sudah masuk dalam kategori hijau atau sudah berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan, hanya satu indikator yang masuk kategori kuning yaitu rasio dokter per satuan penduduk.

**Tabel 14**  
**Capaian Indikator Bidang Kesehatan Tahun 2013-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja						REALISASI					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kesehatan	Angka usia harapan hidup	Tahun	68	70	71	71,50	71,50	72,50	67,00	67,30	71,98	71,98	71,98	69,59
	Persentase bayi gizi buruk	%	5	5	5	5	5	5	0,61	0,93	1,5	2,03	0,01	0
	Angka Kematian ibu melahirkan (AKI)	Per 100 ribu	102/1000 KH	102/1000KH	102/1000KH	102/1000KH	102/1000KH	102/1000KH	338/1000 KH	350/1000KH	208/1000KH	52/1000KH	50/1000KH	0
	Angka kematian Bayi (AKB)	Per 1.000	23/1000 KH	23/1000 KH	23/1000 KH	23/1000 KH	23/1000 KH	23/1000 KH	8/1000 KH	8/1000 KH	3/1000 KH	2/1000 KH	6/1000 KH	2,67/1000 KH
	Rasio posyandu per satuan balita	Per 100 balita	1	1	1	1:60	1:65	1:70	1,9	1,47	1,52	1,46:60	1,46:65	1,69:70
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk.		79	86	94	103:99003	113:99003	124:99003	57,88	74,56	75,15	86:99003	86:99003	7237:99003
	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	Per 100.000 penduduk	1	1	1	1:99003	1:99003	1:99003	1	1	1	1:99003	1:99003	1:99003
	Rasio dokter per satuan penduduk		33	36	36	42:99003	47:99003	52:99003	18,09	23,3	21,73	21,3:99003	21,3:99003	4.029:99003
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		308	338	371	408:99003	448:99003	492:99003	180,88	221,81	210,06	205,86:99003	205,86:99003	5.831:99003

Sumber: LKPI Bupati Kabupaten Barito Timur

Tabel di atas menunjukkan capaian pada bidang kesehatan pada tahun 2015-2018. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Barito Timur target Tahun 2018 mencapai angka 72 tahun namun realisasi sebesar 69 tahun atau masih belum mencapai target dan masuk dalam kategori merah. Persentasi bayi gizi buruk, angka

kematian bayi, rasio posyandu per satuan balita dan rasio RS per satuan penduduk merupakan indikator dengan kinerja baik dimana pada tahun 2013-2018 sudah masuk kategori hijau.

Angka kematian Ibu melahirkan Tahun 2016-2018 menunjukkan penurunan dari 3 (tiga) tahun sebelumnya dimana sarana dan prasarana kesehatan dalam bentuk puskesmas, poliklinik dan pustu per satuan penduduk masih sangat tinggi. Selain itu, meskipun secara capaian terus menunjukkan peningkatan.

### 3. Urusan Keluarga Berencana

Nilai capaian indikator bidang keluarga berencana di kabupaten Barito Timur pada tahun 2013 - 2018.

**Tabel 15**  
**Capaian Indikator Bidang Keluarga Berencana Tahun 2013-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja						REALISASI					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
KB	Rata-rata jumlah anak per keluarga menurun	org	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
	Rasio akseptor KB meningkat/ PB	%	75	79	84	89	94	98	83,79	79	84	85,92	123	PB.1.56 5 AKS 70%
	Partisipasi KB pria meningkat	AKS	176	193	210	227	224	261	93	193	140	257	257	257
	Partisipasi KB aktif meningkat	AKS	16.384	18.884	19.457	20.035	20.636	21.255	16.264	18.884	16498	18.298	18.623	18.236
	Partisipasi KB mandiri meningkat	%	29,59	30,31	30,4	30,5	40	41	29,59	30,31	30,4	88,58	88,58	41,50
	Jumlah pasangan usia subur	PUS	20715	20.889	21.084	21.284	21.284	21.684	20.715	20.889	20108	22.348	21.760	21.760
	Kesehatan Reproduksi/W US 15-49 thn	Orang	27.959	28.432	28.913	29.402	29.899	29.899	27.959	28.432	22.008	31.656	30.726	30.726
	TFR meningkat	%	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,76
	Jumlah Kesehatan reproduksi keluarga meningkat	kk	28.920	20.409	29.966	30.412	30.926	31.449	28.920	20.409	29966	43.094	43.094	31.466

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Secara umum capaian urusan KB pada tahun 2013-2018 sudah baik, dimana nilai capaian mayoritas sudah masuk dalam kategori hijau. Pada tahun 2018, dari 9 indikator 6 indikator menunjukkan nilai baik dan 3 masih masuk dalam kategori kuning yaitu.

#### 4. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Berikut ini nilai capaian indikator urusan wajib bidang koperasi dan usaha kecil menengah

**Tabel 16**  
**Capaian Indikator Bidang KUKM Tahun 2013-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja						REALISASI					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
KUKM	Persentase koperasi aktif	%	46,89	52,92	90,5	90,70	69,12	73,56	46,33	53,54	90,77	90,77	90,77	46,15
	Jumlah UKM non BPR/LKMUKM	Angka	3.057	3.457	3.882	15.300	4.807	5.307	3.056	3.311	3.352	15.328	15.328	15.328
	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam	Jlh	45	47	60	80	80	80	46	47	58	83	101	0
	Jumlah Koperasi Unit Desa	Jlh	5	6	6	8	8	8	6	6	4	11	11	0

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Indikator pada bidang ini pada tahun 2017 menunjukkan bahwa seluruh indikator sudah tercapai yaitu Persentase koperasi aktif, jumlah BPR/LKMUKM, Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan jumlah KUD dan sudah mencapai target.

#### 5. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan diukur melalui dua indikator yaitu rasio penduduk yang bekerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

**Tabel 17**  
**Capaian Indikator Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Ketenagakerjaan	Angka partisipasi angkatan kerja	Jlh	1.782	1.818	1.854	1.891	1.928	55679	56352	1.507	1.920	62.188
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	86,03	86,65	87,82	88,70	89,60	77,52	72,52	87,43	87,45	95,32
	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Jlh	35	35	35	40	40	0	0	40	45	45
	Rasio penduduk yang bekerja	%	81,46	81,48	81,50	81,50	81,52	-	-	84,22	85,16	95,32

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Hasil capaian indikator yang pertama yaitu rasio penduduk yang bekerja menunjukkan kondisi yang cukup baik dimana target RPJMD tahun 2014 sampai 2018 sudah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Untuk indikator TPAK, nilai capaian Kabupaten Barito Timur pada tahun 2018 menunjukkan kondisi yang sangat baik dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Nilai capaian rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2014-2018 sudah melampaui target RPJMD.

#### 6. Urusan perhubungan

**Tabel 18**  
**Capaian Indikator Bidang Perhubungan Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Perhubungan	Jumlah arus penumpang angkutan umum		448,5	449,6	487,7	510,8	528,95	448,5	449,6	345,7	349,5	5.947
	Rasio Ijin Trayek	Rasio	Kewenangan Provinsi									
	Jumlah uji kir angkutan umum	Jlh	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.630	1.102	952	743	700
	Jumlah terminal bis	Jlh	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah dermaga sungai	Jlh	2	2	3	2	2	2	3	4	4	2
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	Kewenangan Provinsi									
	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/Ton	448,5	449,6	487,7	510,8	528,9	448,5	7439	345,7	349,5	3.284
	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ terminal per tahun	Orang/Ton	Kewenangan Provinsi									

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas indikator pada dua fokus sudah menunjukkan ketercapaian target RPJMD, meskipun ada dua indikator pada tahun 2018 yang masih jauh dari target dan ada tiga indikator yang masih kosong. Dua indikator yang tidak tercapai pada tahun 2018 adalah Jumlah uji kir angkutan umum yang selain tidak tercapai target, juga mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan indikator Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum.

Meskipun demikian, ada tiga indikator yang masih belum diperoleh nilai capaiannya yaitu: Rasio Ijin Trayek, Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dan Jumlah orang/barang melalui dermaga/ terminal per tahun sehingga perlu dikaji kembali apakah indikator ini akan tetap dipertahankan atau tidak karena merupakan kewenangan provinsi.

7. Urusan pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada urusan pemberdayaan masyarakat desa, digunakan tiga indikator berikut ini nilai capaian tiga indikator pada tahun 2014 dan 2018.

**Tabel 19**  
**Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	Orang	182	185	190	195	200	176	185	190	190	190
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Orang	34	50	75	90	100	39	50	75	75	100

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat belum menunjukkan kinerja yang baik, pada tahun 2018 belum berhasil mencapai target 200 orang yang dibina, hasil ini tidak mengalami kemajuan dari tahun sebelumnya tetap sejumlah 190 kelompok binaan. Untuk indikator Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK realisasi Tahun 2018 berhasil mencapai target.

8. Urusan Pariwisata dan Kebudayaan

Berikut ini capaian indikator pada urusan wajib bidang pariwisata dan kebudayaan

**Tabel 20**  
**Capaian Indikator Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Grup kesenian	Jumlah grup kesenian	Jlh	20	30	30	30	30	20	30	30	30	18
Gedung kesenian	Jumlah gedung kesenian	Jlh	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Nilai capaian bidang pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Barito Timur menunjukkan kondisi baik dimana pada tahun 2014-2018 belum berhasil mencapai target RPJMD. Jumlah grup kesenian yang ditargetkan ada tahun 2018 sebanyak 30 terealisasi 18. Jumlah gedung kesenian yang ditargetkan 2 gedung, realisasi 2 pada Tahun 2018 yaitu fasilitas rumah betang di Taniran dan Telang Siong.

9. Urusan Pemuda dan Olahraga

Berikut ini capaian indikator pada urusan wajib bidang pemuda dan olahraga.

**Tabel 21**  
**Capaian Indikator Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Pemuda dan olahraga	Jumlah organisasi pemuda	Jlh	16	19	20	21	22	0	19	19	21	21
	Jumlah organisasi olahraga	Jlh	17	19	21	25	17	0	19	21	22	22
	Jumlah kegiatan kepemudaan	Jlh	55	58	62	66	70	0	58	58	58	2
	Jumlah kegiatan olahraga	Jlh	16	17	18	18	16	0	17	25	25	1
	Jumlah klub olahraga	Jlh	13	14	14	16	17	0	0	10	10	16
	Jumlah Gedung Olahraga	Jlh	1	1	1	1	1	1	1	14	14	16

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Indikator pada bidang pemuda dan olahraga pada fokus pemuda dan olahraga pada tahun 2018 terdapat 5 (lima) indikator yang belum mencapai target RPJMD yaitu jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga dan jumlah klub olahraga. Jumlah gedung olah raga untuk tahun 2018 nilai

capaian indikator melampaui target RPJMD disebabkan karena banyaknya gedung yang merupakan milik pribadi/badan usaha.

#### 10. Urusan Lingkungan Hidup

Berikut ini nilai capaian indikator bidang lingkungan hidup

**Tabel 22**  
**Capaian Indikator Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Lingkungan hidup	Persentase penduduk berakses air minum	%	20	23	23	30	30	18	21,67	23,70	30,56	30,56
	Persentase luas permukiman yang tertata	%	42	45	45	54	54	36	39,82	39,82	54,43	54,43

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Urusan lingkungan hidup diukur melalui dua indikator yaitu Persentase penduduk berakses air minum dan Persentase luas permukiman yang tertata, hasil capaian menunjukkan bahwa realisasi tahun 2018 untuk indikator persentase luas permukiman yang tertata masuk kategori hijau karena realisasi melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk indikator persentase penduduk berakses air minum masuk kategori hijau atau melampaui target yang telah ditetapkan.

#### 11. Urusan penataan Ruang

Berikut ini nilai capaian indikator pada urusan wajib bidang penataan ruang.

**Tabel 23**  
**Capaian Indikator Bidang Penataan Ruang Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Penataan Ruang	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	18	20	23	26	30	18,1	21,1	49,5	49,5	29
	Rasio bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	%	42	45	49	54	60	42	45,1	48,40	48,40	75

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Dua indikator pada bidang ini adalah Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB nilai capaian indikator pada tahun 2018 menunjukkan kondisi belum berhasil mencapai target RPJMD sedangkan untuk Rasio bangunan ber-IMB per satuan Bangunan menunjukkan tren yang meningkat, dengan demikian diharapkan tidak terjadi permasalahan yang disebabkan oleh tidak tertatanya ruang di Kabupaten Barito Timur.

## 12. Urusan pertanahan

Berikut ini capaian indikator urusan wajib bidang pertanahan.

**Tabel 24**  
**Capaian Indikator Bidang Pertanahan Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanahan	Jumlah lahan bersertifikat	Jumlah	1,200	1,250	1,250	1,350	1,400	1893	794	2.712	3.537	4.950

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Pada tahun 2018 ditargetkan jumlah tanah yang bersertifikat di Kabupaten Barito Timur sebanyak 1.400 dan teralisasi 4.950 indikator tersebut sudah berhasil melampaui target RPJMD pada tahun 2018 karena adanya kegiatan prona di beberapa kecamatan pada tahun 2018. Dengan tersertifikasinya kepemilikan tanah diharapkan tidak terjadi permasalahan seperti sengketa lahan dan permasalahan lainnya di bidang pertanahan.

## 13. Urusan Pekerjaan Umum

Berikut ini capaian indikator urusan wajib bidang pekerjaan umum

**Tabel 25**  
**Capaian Indikator Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
PU	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	45	55	65	80	80	40	72,25	78,25	84,04	60,21
	Rasio jaringan irigasi	%	25	45	65	85	100	12	71,5	75	85	65
	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	Tidak ada target									
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	94	95	96	97	98	94,2	53,56	94,4	94,4	94,78
	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (di kota)	Rasio	18	21	25	28	28	18,34	21,34	27	28	28
	Rasio rumah layak huni	%	53	58	61	64	67	53,1	87,27	94,57	94,57	94,37
	Rasio permukiman layak huni	%	63	66	66	72	75	63,2	80,37	80,37	80,37	94,66
	Persentase penduduk berakses air minum	%	18	20		26	30	18,1	23		26,7	33,54
	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	0,13	0,13		54	54	0,13	0,13		76,2	76,2

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Barito Timur menunjukkan perkembangan yang baik, pada tahun 2017 proporsi jalan dengan kualitas baik sebesar 84,04% atau 204,35 km dan jauh melampaui target yaitu 80%.

Pada fokus pemukiman, indikator Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (di kota), Rasio rumah layak huni, Rasio permukiman layak huni, Penduduk berakses air minum, Persentase Rumah Tangga (RT) yang

menggunakan air bersih menunjukkan nilai capaian diatas target RPJMD pada tahun 2018, sedangkan indikator Persentase rumah tinggal bersanitasi masih belum mencapai target dan Rasio tempat ibadah per satuan penduduk belum tersedia.

#### 14. Urusan Kearsipan dan Perpustakaan

Berikut ini capaian indikator urusan wajib bidang kearsipan dan perpustakaan

**Tabel 26**  
**Capaian Indikator Bidang Kearsipan dan Perpustakaan**  
**Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Perpustakaan	Jumlah perpustakaan Desa	Jlh	38	45	65	81	101	38	45	65	65	36
	Jumlah pengunjung perpustakaan Daerah per tahun	orang	14.662	16.129	17.742	19.517	21.469	15.835	17.588	19.339	19.557	3.855
	Jumlah pengunjung perpustakaan Desa per tahun	orang	54.720	64.800	93.600	116.640	116.640	60.190	71.928	101.120	117.700	117.700
	Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK)											
	Desa	Kali/ Th	9	14	19	24	30	12	17	23	27	30
	Sekolah	Kali/ Th	25	35		50	55	28	38	47	52	12

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Nilai capaian indikator pada urusan wajib bidang kearsipan dan perpustakaan pada tahun 2018 hanya 2 (dua) indikator yang melampaui target RPJMD yaitu jumlah pengunjung perpustakaan desa per tahun dan mobil unit perpustakaan keliling desa, indikator yang lain masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi terkait belum tercapainya target tersebut diantaranya adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan penambahan unit perpustakaan desa dan masih terbatasnya jenis buku perpustakaan yang tersedia.

## 15. Urusan Komunikasi dan Informatika

Berikut ini capaian indikator urusan wajib bidang komunikasi dan informatika.

**Tabel 27**  
**Capaian Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Komunikasi dan Informatika	Jumlah jaringan komunikasi	Jlh	33	34	34	35	35	33	34	37	37	35
	Rasio wartel/warnet-terhadap penduduk	%	24	24	24	24	24	24	24	50	50	50
	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	Jlh	22	25	7	15	29	22	25	19	19	29
	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Jlh	4	4	4	4	4	4	4	15	3	2

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Terkait dengan komunikasi dan informatika, kondisi nilai capaian pada tahun 2014-2018 menunjukkan kondisi yang sangat baik, jumlah fasilitas komunikasi dan informatika menunjukkan capaian diatas target RPJMD dan menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Barito Timur sudah mendapatkan fasilitas TI yang baik. Jumlah penyiaran radio/TV lokal belum mencapai target/ menurun dari tahun sebelumnya.

## 16. Urusan Perizinan

Berikut ini capaian indikator urusan wajib bidang perizinan

**Tabel 28**  
**Capaian Indikator Bidang Perizinan Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Kemudahan Perizinan	a. Lama Proses Perizinan											
	1. Izin IMB	Hari	15	15	15	15	15	15	15	25	25	7
	2. Izin Domisili/SITU	Hari	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	3. Izin HO/Gangguan	Hari	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3
	4. Izin Reklame	Hari	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3
	5. SIUP	Hari	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
	6. TDP	Hari	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
	7. TDG	Hari	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
	8. Tempat Penjualan Beralkohol	Hari	15	15	15	15	15	15	15	4	4	3
	9. Izin Trayek	Hari	15	15	15	15	15	Tidak memberikan pelayanan				
	10. Izin Usaha Periklanan	Hari	10	10	10	10	10	Tidak memberikan pelayanan				
	11. Surat Keterangan Penyimpanan Barang	Hari	3	3	3	3	3	Belum ada pelimpahan pada tahun 2013-2014	2	2	3	
	b. Jumlah Perizinan	Izin	15	18	25	1000	30	9	9	1268	1268	9
	c. Keterbukaan Informasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	d. Penerimaan dari Perijinan	%	10	20	25	25	50	140%	140%	132,7	132,7	100

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Perizinan merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk menarik investor untuk berinvestasi, kemudahan dan kecepatan perizinan mutlak harus diberikan. Nilai capaian indikator perizinan naik dari lama proses perizinan, jumlah, keterbukaan informasi dan penerimaan perizinan menunjukkan kondisi yang sangat baik pada beberapa indikator, namun masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target RPJMD.

**Tabel 29**  
**Capaian Indikator Bidang Pajak dan Retribusi Daerah**  
**Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Pengenaan pajak dan retribusi daerah	Penerimaan daerah yang diterima oleh pajak dan retribusi	%	100	100	100	100	100	183,40	110,37	101	102,2	48,29

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Penerimaan daerah yang diterima dari pajak pada Tahun 2018 belum bisa melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 100% dengan realisasi sebesar 48,29% sedangkan untuk retribusi target yang ditetapkan sebesar 100% realisasi hanya sebesar 29,76%.

**Tabel 30**  
**Capaian Indikator Bidang Bank dan Non Bank**  
**Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Fasilitas bank dan non bank	a. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya	Unit	7	8	8	10	10	7	8	8	10	7
	b. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya	Unit	8	9	9	10	8	8	10	10	10	-

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Ketersediaan fasilitas bank dan non bank di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2015 sampai 2017 telah berhasil melampaui target, meskipun demikian jumlah bank menunjukkan jumlah yang meningkat di tahun 2017 yaitu 10 unit. Pada tahun 2017 jumlah perusahaan non bank seperti asuransi dari target 10 unit realisasi 10 unit.

#### 17. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Berikut ini capaian indikator urusan wajib bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

**Tabel 31**  
**Capaian Indikator Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**  
**Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Kependudukan dan catatan sipil	rasio penduduk ber E-KTP per satuan penduduk	%	54,82	60,82	66,82	72,82	78,82	78,2	99,32	71,41	83,89	85,51
	Rasio pasangan berakta nikah	%	20,47	40,47	30,47	50,47	60,47	48,59	48,59	73,16	86,98	26,14
	Jumlah kepemilikan akta kelahiran	Jiwa	155,402	178,712	20.000	20.000	20.000	2.326	2.021	41.914	41.914	41.914

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Nilai capaian indikator urusan wajib bidang Kependudukan dan Catatan sipil menunjukkan kondisi yang sangat baik, pada tahun 2018 dua indikator menunjukkan capaian di atas target RPJMD. Sedangkan untuk indikator rasio pasangan berakta nikah tidak mencapai target.

#### 18. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berikut ini capaian indikator urusan wajib bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Tabel 32**  
**Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Perempuan dan anak	Penguatan kelembagaan keluarga Kecil berkualitas meningkat	klp	30	34	39	49	49	30	34	97	97	29
	Pengembangan model operasional BKB posyandu-PAUD meningkat	klp	17	20	20	24	24	17	20	171	171	30
	Jumlah Keluarga yang mempunyai penghasilan tetap dan berkelanjutan meningkat	klp	30	33	36	39	42	30	33	90	90	29
	Jumlah kelompok	Klp	27	29	29	31	42	27	29	100	100	29

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	bina remaja dan mahasiswa meningkat											
	Pengembangan model operasional BKR/ mahasiswa	klp	10	10	13	16	19	10	10	17	17	29
	Sosialisasi bagi masyarakat desa tentang anak dan keluarga	%	50	54,6	55	56	60	50	54,6	100	100	60
	Jumlah KDRT menurun	%	2,85	2,82	2,82	2,77	2,75	2,21	2,82	1,01	1,99	0,015
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah meningkat	%	9	9,3	9,6	9,9	10,2	9	9,3	9,8	9,9	53,18
	Persentase partisipasi Perempuan di lembaga swasta meningkat	%	92,2	92,4	92,6	92,8	93	92,2	92,4	100	92,8	41,03
	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurun	%	2,7	2,68	2,66	2,65	2,6	0,1	2,68	0,87	2,65	10,60
	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan menurun	%	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,1	0,7	0,123	0,2	21,03
	Sosialisasi jumlah lembaga yang mendapat sosialisasi	%	35	40	46	48	56	35	40	46	48	56
	Persentase tenaga kerja wanita yang berpenghasilan tetap meningkat	%	75,9	76	76,2	76,5	76,9	60	76	99,60	99,60	41,03
	Jumlah institusi yang mengikuti seminar advokasi HIV/AIDS	%	45	50	55	58	60	45	50	96	96	80
	Frekuensi sosialisasi bagi masyarakat desa tentang pengarusutamaan gender meningkat	%	60	53	54,5	55	61	65	53	99,75	99,75	61
	Jumlah perempuan yang mendapat bimbingan usaha	org	75	80	85	90	90	75	80	70	70	90

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Urusan wajib bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya beberapa indikator yang mencapai target RPJMD yaitu pengembangan model operasional BKR/mahasiswa, jumlah KDRT menurun, persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah meningkat, jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurun, sosialisasi jumlah lembaga yang mendapat sosialisasi, jumlah institusi yang mengikuti seminar advokasi HIV/AIDS, frekuensi sosialisasi bagi masyarakat desa tentang pengarusutamaan gender meningkat, jumlah perempuan yang mendapat bimbingan usaha.

#### 19. Urusan Ketergantungan

Berikut ini capaian indikator urusan wajib bidang ketergantungan

**Tabel 33**  
**Capaian Indikator Bidang Ketergantungan**  
**Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Tingkat ketergantungan	Rasio ketergantungan	%	34,09	34,09	34,09	34,08	34,08	-	31,79	31,79	31,79	31,15

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Rasio ketergantungan Kabupaten Barito Timur hanya tersedia pada tahun 2015 hingga 2018, nilai capaian rasio ketergantungannya adalah 31,15% belum berhasil mencapai target RPJMD 2018 di angka 34,08%.

#### 20. Urusan Ketahanan Pangan

Urusan pertanian difokuskan kepada dua hal yaitu ketahanan pangan dan status desa. Berikut ini nilai capaian setiap indikator:

**Tabel 34**  
**Capaian Indikator Bidang Ketahanan Pangan**  
**Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian	Skor Pola pangan Harapan	Poin	78,6	88,4	79	80	82	78,6	88,4	86,8	89,7	90,20
	Ketersediaan Pangan Utama	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Kerawanan Pangan	%	35	30	30	-	-	35	30	30	-	-
	jumlah desa berstatus swasembada	Jumlah	6	7	6	6	6	12	12	12	12	12

*Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur*

Ketahanan pangan diukur melalui skor pola pangan harapan dan ketersediaan pangan utama. Indikator skor pola harapan pangan menunjukkan nilai capaian di atas target baik pada tahun 2014-2017. Untuk indikator jumlah desa berstatus swasembada pada tahun 2014-2018 adalah sebanyak 12 desa, jumlah ini jauh melampaui target RPJMD yang berjumlah 6 desa pada tahun 2017-2018.

#### 21. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Berikut ini nilai capaian urusan energi sumber daya mineral yang diukur melalui fasilitas listrik dengan menggunakan dua indikator yaitu Rasio ketersediaan daya listrik dan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

**Tabel 35**  
**Capaian Indikator Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**  
**Tahun 2014-2018**

FOKUS	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2016	2018
Fasilitas listrik	Rasio ketersediaan daya listrik	%	0,28	0,30	0,30	0,30	0,36	0,28	0,76	0,91	0,91	0,91
	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	73,80	74,51	74,51	74,51	76,60	94,76	98,60	99,84	99,84	99,67

*Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur*

Dua indikator di atas menunjukkan nilai capaian pada tahun 2017 sampai 2018 telah mencapai target RPJMD, rasio ketersediaan

daya listrik sudah jauh melampaui target dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik sudah mencapai 99,67 atau hanya 0,19% yang masih harus dibantu.

### **2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARITO TIMUR**

Permasalahan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan Kabupaten Barito Timur yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan.

#### **2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah**

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*.

##### **2.3.1.1. Masalah Pengembangan Perekonomian Daerah**

Pembangunan di bidang ekonomi nampaknya selalu menjadi isu utama dalam perencanaan pembangunan, tidak terkecuali di Barito Timur. Perekonomian memegang peran yang

sangat vital bagi kelangsungan hidup masyarakatnya, sebab ekonomi yang kuat akan bermuara pada masyarakat yang sejahtera. Perekonomian mempunyai peran penting dalam pembangunan Barito Timur. Dimana, Kabupaten Barito Timur mempunyai keunggulan di sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian dan turunannya (perikanan, perkebunan, kehutanan dan peternakan) sebagai pendapatan tertinggi. Dari fokus permasalahan ekonomi terdapat dua permasalahan pokok yaitu perekonomian berbasis kerakyatan belum berkembang secara optimal dan yang kedua belum meratanya pendapatan masyarakat. Permasalahan dalam bidang ekonomi untuk perekonomian berbasis kerakyatan belum berkembang secara optimal antara lain menyangkut maksimalnya integrasi kegiatan ekonomi yang produktif, kreatif dan inovatif, belum berkembangnya industri pengolahan untuk nilai tambah produk pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan. Permasalahan dalam bidang ekonomi untuk belum meratanya pendapatan masyarakat antara lain tingkat kemiskinan, ketenagakerjaan, dan investasi, dengan uraian sebagai berikut :

1. Masih rendahnya mutu hasil dan produktivitas sektor pertanian. Masih rendahnya kemampuan petani dalam mengolah hasil pertanian, belum adanya alat-alat pertanian yang belum memadai, masih rendahnya kemampuan akses petani terhadap pupuk dan bibit unggul dan belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
2. Masih rendahnya produktivitas sektor perikanan. Masih rendahnya tingkat produksi perikanan, masih rendahnya daya

saing produk olahan hasil perikanan, masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat, petani pembudidaya dan nelayan. perkebunan, peternakan, perikanan. Budidaya perikanan air tawar perlu diusahakan dengan lebih baik mengingat semakin turunnya hasil tangkapan. Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan harus terus dilakukan dengan berbagai program yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas. Teknologi dan ilmu pengetahuan yang relevan hendaknya dapat diterapkan untuk peningkatan produktivitas dimaksud. Sejak sekarang perlu dipikirkan secara seksama bagaimana menjamin bahwa apabila nantinya telah terjadi peningkatan produksi, ada jaminan bahwa produk tersebut dapat diserap oleh pasar dan menguntungkan para petani pembudidaya dan nelayan.

3. Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Barito Timur. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya objek wisata yang memadai, kurang maksimalnya aksesibilitas ke objek wisata, kurang optimalnya sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan antara pemerintah Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Pusat republik Indonesia dan para pelaku usaha pariwisata, kurang tersedianya sarana dan prasarana di destinasi wisata, kurang optimalnya informasi dan promosi potensi pariwisata Kabupaten Barito Timur dan kurang optimalnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kepariwisataan.
4. Belum optimalnya peranan koperasi dan UMKM dalam perekonomian kerakyatan. Adapun permasalahan ini di

sebabkan oleh beberapa hal berikut, masih terbatasnya akses permodalan bagi masyarakat, belum terpenuhinya jumlah koperasi aktif dan sehat, masih rendahnya pelaku UMKM yang dapat berkembang dengan baik, jiwa dan keinginan untuk berwiraswasta yang rendah terutama dikalangan penduduk asli dan masih terbatasnya akses masyarakat dalam menjual hasil usahanya.

5. Masih rendahnya daya saing produk industri kecil menengah. Disebabkan karena belum maksimalnya inovasi produk hasil industri, akses pemasaran hasil industri masih terbatas dan hasil industri belum berkualitas ekspor.
6. Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan. Disebabkan karena akses masyarakat terhadap pasar di daerah terpencil masih sulit, daya beli masyarakat masih rendah dan jumlah pedagang masih rendah.
7. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan PMKS. Disebabkan karena belum tersedianya sarana/prasarana penunjang penanganan PMKS, masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas umum, belum adanya wadah sarana pembinaan, pelatihan lapangan kerja mandiri/kewirausahaan dan belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan SDA.
8. Masih rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dan transmigran. Disebabkan karena masih kurangnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, belum optimalnya perluasan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja, belum terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan jaminan

sosial tenaga kerja serta belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan.

9. Masih rendahnya iklim investasi. Disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut, belum optimalnya proses perijinan usaha dan belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dalam investasi berusaha.

#### **2.3.1.2. Masalah Infrastruktur Dasar**

Berbagai kendala dan permasalahan yang masih ditemui pada infrastruktur dasar yaitu belum optimalnya pemertaan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan. Infrastruktur dasar terdiri dari jalan, jembatan, air bersih, pengelolaan limbah, perlistrikan, sarana komunikasi dan sarana perhubungan. terkait masalah infrastruktur dasar dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Aksesibilitas belum merata terutama di daerah terpencil karena meningkatnya panjang jalan rusak dan rusak berat, belum maksimalnya upaya pemeliharaan jalan dan jembatan. Selain itu belum optimalnya kesesuaian penataan ruang dengan RTRW yang disebabkan oleh adanya kecenderungan ketidakserasian pemanfaatan tata ruang dan ketertiban dalam penggunaan tanah, masih rendahnya pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan serta proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota belum ditentukan.
2. Masih rendahnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman. Beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya kualitas infrastruktur adalah sebagai berikut

masih rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan, masih adanya permukiman kumuh baik perdesaan maupun perkotaan, belum optimalnya jaringan listrik dan komunikasi di perdesaan, dan belum adanya sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, pengolahan, pembuangan (disposal), dan sistem pakai ulang (reuse).

3. Mobilitas barang dan orang belum menjangkau daerah terpencil. Hal tersebut disebabkan oleh sarana dan prasarana perhubungan yang belum memadai, kesenjangan pelayanan jaringan transportasi antara kawasan kota dan pedesaan, masih kurang dan belum meratanya fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan baik jalan maupun sungai keseluruh wilayah Kabupaten Barito Timur dan belum terlaksananya dengan maksimal pengawasan, pengamanan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan dan sungai.
4. Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Di sebabkan oleh beberapa hal yaitu masih lemahnya fungsi pengawasan dan penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan, belum adanya upaya melestarikan keanekaragaman hayati, meningkatnya ancaman terhadap pengrusakan terhadap kawasan lindung, areal hutan tropis, dan daerah resapan air, menurunnya daya dukung lingkungan dan lahan serta ancaman pencemaran lingkungan yang semakin tinggi, pengelolaan sampah belum efektif dan efisien, meluasnya wilayah yang mengalami kerusakan ekosistem serta beberapa

perusahaan yang sudah beroperasi tetapi belum mengantongi AMDAL.

### **2.3.1.3. Masalah Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting bahkan tidak dapat dipisahkan dari dinamika di masyarakat. Daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Barito Timur berperan di berbagai sektor pembangunan daerah. Kehidupan manusia yang berkualitas dapat diartikan manusia yang memiliki cara hidup, cara berpikir, kemampuan, iman dan watak tertentu yang menunjukkan keunggulan diri dan dapat berguna bagi orang lain. Dengan kehidupan yang berkualitas diharapkan masyarakat Kabupaten Barito Timur memiliki kualitas yang tidak hanya ditunjukkan dengan kualitas pendidikan tetapi juga diimbangi dengan perilaku (*attitude*) yang baik. Adapun beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya pemertaan kualitas dan daya saing sumber daya manusia antara lain di sebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan, dan masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang disebabkan oleh belum optimalnya aksesibilitas dan fasilitas pendidikan dasar, masih rendahnya mutu pendidikan dan layanan pendidikan serta masih rendahnya tingkat kepercayaan orang tua akan pendidikan di Barito Timur sehingga cenderung menyekolahkan anaknya keluar daerah.

2. Masih rendahnya tingkat kesadaran terhadap kesehatan bagi masyarakat. Disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih belum memadai sarana dan prasarana penunjang kesehatan, distribusi tenaga kesehatan masih belum merata ke berbagai wilayah, masih rendahnya pelayanan pertolongan persalinan serta proses pengadaan obat-obatan terkendala kebijakan.
3. Masih rendahnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Disebabkan karena belum ada terbentuknya forum anak tingkat kecamatan, kelurahan dan desa dan masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan.

#### **2.3.1.4. Masalah Keragaman Budaya**

Perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan serta situasi ekonomi. Semua unsur perbedaan ini harus dipelajari dan dimengerti agar tidak membawa dampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya adalah nilai leluhur yang sudah mendarah daging dalam masyarakat. Ketentraman dan keamanan merupakan salah satu aspek yang harus didapatkan oleh setiap warga masyarakat. Dengan ketentraman dan keamanan maka hidup masyarakat akan lebih tenang dan nyaman, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan lancar. Adapun hal-hal yang menyebabkan masalah keragaman budaya adalah masih rendahnya upaya pelestarian budaya tradisional dan masih rendahnya kualitas SDM kepemudaan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya upaya pelestarian budaya tradisional yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih rendahnya ketersediaan data informasi tentang budaya tradisional, masih kurangnya atraksi budaya daerah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai budaya tradisional, masih kurangnya pemeliharaan situs budaya, situs makam, situs keramat dan cagar budaya, masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kompleks situs budaya, situs makam, situs keramat dan cagar budaya serta belum terwujudnya pengelolaan budaya dan hukum adat dayak ma'anyan lawangan.
2. Masih rendahnya kualitas SDM kepemudaan yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan, masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat, masih rendahnya prestasi pemuda olahraga, belum optimalnya pengetahuan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan serta masih adanya konflik horisontal dan vertikal akibat kecemburuan dan konflik penguasaan sumberdaya alam dan kesempatan kerja.

#### **2.3.1.5. Masalah Birokrasi**

Birokrasi dibuat untuk mencapai tujuan bersama dari suatu pemerintahan. Tata kelola pemerintahan secara inovatif dan efisien merupakan tata kelola yang baik dalam proses perencanaan dan implementasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi sumber daya bagi pelaksanaan kebijakan, mempercepat berlangsungnya dampak kebijakan, memperluas inovasi kebijakan, akan

meningkatkan efektivitas dampak kebijakan. Permasalahan utama dari birokrasi adalah belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Bentuk tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya inisiasi bersama dan implementasi pada strategi yang dibuat antar pihak, dapat menciptakan efektivitas implementasi strategi yang dapat menghadapi tuntutan perubahan yang ada sehingga harus terus membuat terobosan yang inovatif dan meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan prima sesuai standar pelayanan minimal, sarana dan prasarana pengaduan masyarakat belum optimal.
2. Belum sepenuhnya terlaksana birokrasi yang bersih dan akuntabel. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan pengawasan oleh pemerintah, masih belum efektifnya kelembagaan birokrasi pemerintah, belum meratanya pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi hingga ke perangkat desa, rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka transparansi administrasi, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran belum optimal serta masih belum seluruh masyarakat tertib administrasi kependudukan.
3. Belum optimalnya pengembangan kinerja aparatur sipil negara. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut manajemen aparatur masih belum optimal, masih belum efektif pembinaan dan penegakan disiplin aparatur serta belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi.

### **2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SOPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

#### **1. Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggulan**

Sektor pertanian merupakan salah satu variabel penting bagi perkembangan masa depan Barito Timur. Hal ini dikarenakan peranan sektor ini dalam pembentukan PDRB cukup besar, di sisi lain, sektor pertambangan bukan menjadi prioritas ekonomi Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan besaran kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Barito Timur atas dasar harga konstan, sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Timur merupakan Kabupaten dengan perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam, khususnya sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perkebunan. Selain itu, pentingnya perhatian dan fokus pembangunan di sektor pertanian, karena sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas yang miskin bekerja di sektor ini.

#### **2. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia**

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki

kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Hal ini dikarenakan pendidikan digunakan untuk memperbaiki derajat kehidupan masyarakat. Dengan dan lewat pendidikan diharapkan akan tercipta generasi-generasi yang berkualitas dan tangguh.

Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketrampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

### **3 Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar**

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi. Pembangunan dan pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya

manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang.

Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan dorongan yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan agar sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat berfungsi. Dengan aset Infrastruktur yang baik, akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Barito Timur merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

#### **4. Pengentasan Kemiskinan**

1. Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Salah satu sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dan kemauan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan terutama pada masyarakat miskin.

Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, penanggulangan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata, tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan nilai-nilai budaya negatif, seperti malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan politis serta peningkatan kemampuan produktivitas diri masyarakat.

## **5 Reformasi Birokrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Dengan ini diharapkan kinerja pemerintah dapat lebih optimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih maksimal. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN.

Kabupaten Barito Timur dikatakan belum melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. Namun upaya untuk mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) penting untuk menghidupkan semangat kompetisi antar unit kerja pemerintah dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Inisiatif ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat luas terhadap perkembangan reformasi birokrasi, namun penting diperhatikan bahwa status ini

seharusnya tidak bersifat statis dan merupakan upaya konkret dalam perubahan ke arah yang lebih terlembaga dan berkesinambungan.

## **6 Pelestarian Lingkungan Hidup**

Sumber daya alam ada batasan dan sifat bawaan, jika alam dieksploitasi tanpa aturan akan menimbulkan bencana bagi seluruh lingkungan hidup. Permasalahan yang timbul akibat tidak seimbangnya peningkatan aktivitas perekonomian dengan kualitas lingkungan hidup akan memicu beberapa persoalan seperti bencana alam berupa kebakaran hutan/lahan, banjir, hingga perubahan iklim yang saat ini menjadi salah satu isu internasional.

Masyarakat harus mendapatkan jaminan lingkungan sehat, oleh karena itu perlu adanya upaya pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan salah satunya tambang. Serta menjaga keseimbangan lingkungan untuk menjadi tempat hidup bagi manusia, fauna dan flora serta ekosistem lainnya. Pada hakikatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam ini harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap hail alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan

tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai dimasa yang akan datang.

## **7. Pengembangan dan Pelestarian Budaya lokal Daerah**

Pembangunan yang selama ini diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur tidak hanya terbatas pada fisik sarana prasarana sosial, ekonomi, budaya, pendidikan saja, namun juga mencakup pada pembangunan diri masyarakatnya, religius, dan adat istiadatnya. Masyarakat Barito Timur sebagian besar merupakan tumpuk dayak Ma'anyan (sebenarnya bukan hanya Ma'anyan namun juga Lawangan). Pada saat ini, masyarakat Barito Timur menjadi sebuah daerah dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Ada banyak suku-suku diluar Ma'anyan dan Lawangan yang datang dan tinggal di daerah ini, seperti Ngaju, Batak, Jawa, dan lainnya. Kekayaan budaya lokal daerah ini perlu untuk terus dikembangkan agar menjadi salah satu asset budaya yang menjadi daya tarik wisata daerah dan diintegrasikan dengan potensi pariwisata yang ada. Eksotika dan kekhasan budaya di kabupaten Barito Timur bisa kita jumpai pada upacara-upacara atau ritual kematian yang dilakukan oleh suku Dayak Ma'anyan. Beberapa ritual kematian yang biasa diselenggarakan oleh masyarakat yaitu Ijambe, Ngadatun, Mia, Ngatang, Siwah, isi dari berbagai upacara kematian biasanya berupa pertunjukan berbagai kesenian atau tari-tarian tradisional Dayak Ma'anyan seperti Gintur, Giring-Giring, Dasas, Ebu Lele, dan sebagainya, sehingga para pengunjung bebas untuk menikmati kebudayaan lokal daerah. Hal ini menjadi keasyikan tersendiri bagi wisatawan domestik dan mancanegara untuk

mengeksplorasi budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Barito Timur. Pada momen-momen ini pemerintah daerah harus lebih responsif dengan meningkatkan promosi potensi wisata dan budaya sehingga banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung dan berwisata di Kabupaten Barito Timur.

### **BAB III**

#### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2019, proyeksi Tahun 2020 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2020. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2019 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

Hal mendasar dalam perencanaan pembangunan tahunan adalah kemampuan dalam memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara lebih akurat dari apa yang sudah diprediksikan untuk tahun berkenaan; sehingga dapat diketahui belanja langsung yang dapat dialokasikan bagi program/kegiatan prioritas. Untuk itu, dibutuhkan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah tahun rencana berdasarkan gambarannya di masa lalu. Di sini, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah bermakna sebagai hasil dari strategi pembangunan yang telah berjalan sekaligus menjadi dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun rencana.

Dalam hal kebijakan perekonomian sebagai penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah, efektivitas maupun efisiensi penggunaan anggaran pembangunan menjadi titik poin penting bagi evaluasi pendanaan setiap program pembangunan daerah. Sejauh mana optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan "besaran anggaran" yang telah direncanakan akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada pembangunan periode berikutnya. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa subyektifitas *stakeholder* dalam menilai evaluasi hasil

pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk prioritas capaian program pembangunan yang lebih tinggi (pembangunan nasional).

Analisis ekonomi makro daerah akan menjadi penunjang dalam mengkaji dan mengevaluasi kondisi perekonomian Kabupaten Barito Timur. Hal tersebut dilakukan sebagai dasar dalam memproyeksikan kondisi perekonomian tahun 2020 untuk memberikan gambaran awal pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terkait perekonomian mikro yang merupakan *basic* dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pada rancangan ini terlihat kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya capaian kinerja pemerintahan tahun 2020 melalui berbagai prioritas pembangunan dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh.

Kabupaten Barito Timur memiliki berbagai macam potensi unggulan daerah antara lain dari sektor pertanian, perkebunan sawit dan karet. Sektor kehutanan dalam bentuk produk hasil hutan. Sektor perikanan berupa ikan air tawar dari hasil perikanan tangkap, kolam dan keramba. Sektor peternakan berupa sapi, babi, kambing dan ayam. Sektor pertambangan berupa bahan galian dan batu bara. Sektor pariwisata berupa kebudayaan daerah, cagar wisata (angrek alam, goa, air terjun dan danau) dan cagar budaya. Apabila semuanya atau sebagian dikelola dengan baik, maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar

pendapatan masyarakat naik disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan memiliki sebuah kebijakan penting dalam pengelolaan anggaran baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan anggaran sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kebijakan-kebijakan strategis akan memberikan kemampuan lebih dalam pendanaan pembangunan melalui pemilihan program-program prioritas dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. Meskipun begitu, kebijakan yang diambil haruslah melihat berbagai aspek maupun bidang urusan pembangunan seperti ekonomi, sosial-budaya, kependudukan, hingga aspek eksternal baik dari luar regional maupun internasional.

Struktur perekonomian dapat menggambarkan berapa besar peran masing-masing sektor pembentuk produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam perekonomian suatu daerah. Struktur ekonomi daerah dapat di jadikan sebagai dasar analisa maupun pertimbangan pengambilan kebijakan dalam upaya meningkatkan perekonomian. Struktur ekonomi ini dapat dilihat dari besarnya distribusi persentase nilai tambah masing – masing sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku.

Dalam melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah termasuk dalam merumuskan *budget policy*. Analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan asumsi perencanaan pembangunan daerah.

PDRB menurut lapangan usaha diklasifikasikan menjadi 17 lapangan usaha dan dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.

Selama Tahun 2013-2017 telah terjadi perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Barito Timur. Perubahan struktur ekonomi tersebut terjadi akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode tersebut, serta tidak terlepas dari 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sementara faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

PDRB Barito Timur atas dasar harga berlaku tahun 2016 mencapai 5.627,8 Miliar rupiah yang merupakan total Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dibentuk oleh seluruh lapangan usaha di Barito Timur sedangkan untuk Tahun 2017 mencapai 6.320 Miliar rupiah. Sementara PDRB yang dinilai dengan harga konstan 2010 Kabupaten Barito Timur menurut pengeluaran untuk Tahun 2016 sebesar mencapai 4.510,1 Miliar rupiah sedangkan untuk Tahun 2017 sebesar 4.779,9 Miliar rupiah.

Struktur perekonomian Barito Timur didominasi oleh tiga kategori, yaitu kategori pertambangan dan penggalian; kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; serta kategori konstruksi. Ketiga kategori ini memberikan kontribusi sebesar 64,33 persen

dalam pembentukan PDRB Kabupaten Barito Timur Tahun 2016, sedangkan untuk Tahun 2017 kategori pertambangan dan penggalian; kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; serta kategori konstruksi. Ketiga kategori ini memberikan kontribusi sebesar 63,57. Kontribusi kategori pertambangan dan penggalian merupakan yang terbesar yakni 37,02 persen; kemudian diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 18,56 persen; serta konstruksi sebesar 7,99 persen. Sementara 14 kategori lainnya berkontribusi dibawah 7,99 persen terhadap total PDRB Barito Timur.

Berdasarkan angka PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur tahun 2016 adalah sebesar 5,50 persen sedangkan untuk Tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur sebesar 5,98 persen. Menurut lapangan usaha pembentuknya, terdapat 13 kategori yang memiliki laju pertumbuhan di atas pertumbuhan PDRB Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2017. kategori-kategori tersebut adalah kategori jasa keuangan dan asuransi (7,83 persen); jasa pendidikan (8,84 persen); informasi dan komunikasi (9,35 persen); industri pengolahan (7,84 persen); transportasi dan pergudangan (7,81 persen); penyediaan akomodasi dan makan minum (7,98 persen); jasa kesehatan dan kegiatan sosial (7,79 persen); pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (4,84 persen); perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (9,00 persen); konstruksi (5,18 persen); jasa lainnya (8,70 persen); serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (6,18 persen). Sementara untuk kategori jasa perusahaan; pengadaan listrik dan gas; pertanian, kehutanan dan perikanan; dan pertambangan penggalian memiliki laju pertumbuhan dibawah 8,66 persen.

Proyeksi makro ekonomi Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2019 akan menghadapi beberapa tantangan baik yang bersifat internal maupun dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional

maupun global. Beberapa tantangan tersebut yaitu : menjaga stabilitas ekonomi makro, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, mengantisipasi dampak fluktuasi harga minyak dan harga pangan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, percepatan pengurangan kemiskinan, menjaga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian inflasi dan perluasan serta percepatan pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian Kabupaten Barito Timur masih bertumpu pada sektor primer yang memberikan kontribusi paling besar terhadap keseluruhan PDRB Barito Timur, kemudian diikuti oleh sektor tersier dan sekunder. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan angka sangat sementara pada Tahun 2017 Kabupaten Barito Timur berada di urutan ke-10 dengan nilai sebesar 5,98 persen. Angka tersebut masih dibawah angka laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 6,74 persen. Posisi laju pertumbuhan riil Kabupaten Barito Timur tepat berada di bawah Kabupaten Barito Utara dengan laju pertumbuhan 6,01 persen, dan diatas Kabupaten Pulang Pisau dengan laju pertumbuhan 5,86 persen dan Kabupaten Barito Selatan dengan laju pertumbuhan sebesar 5,84 persen.

### **3.1.1 Arah Kebijakan Nasional**

Tema RKP Nasional Tahun 2020 “ Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas ”. Sesuai dengan tema RKP Nasional Tahun 2020 dijabarkan kedalam prioritas nasional yaitu :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja

4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan Dan Keamanan

### **3.1.2 Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah**

Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 yaitu “ **Pemantapan Struktur Ekonomi melalui Optimalisasi Investasi dan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah**”.

Isu strategis pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2020 :

1. Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, Pengelolaan SDA dan LH dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun.
2. Peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja berdaya saing
3. Pengembangan *green economy* dan *green government* dalam realisasi pembangunan daerah
4. Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
6. Penggalan potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi
7. Pemerataan kesejahteraan masyarakat
8. Mewujudkan *good governance* secara menyeluruh

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan pada Tahun 2020, pembangunan di Kabupaten Barito Timur berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan Tahun 2019. Pada tahun 2020 pembangunan Kabupaten Barito Timur mulai fokus pada pemantapan infrastuktur daerah khususnya infrastruktur dasar di Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2020

adalah **“PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI MENUJU BARTIM YANG BERANI DAN MELAYANI”**.

Untuk menjawab tema tersebut pada tahun 2020 yang harus dilakukan adalah pemantapan dan perbaikan pelayanan publik dan merestrukturisasi tata kelola pemerintahan. Pada tahun ini diharapkan birokrasi Barito Timur meningkatkan kemampuan dalam menjalankan birokrasi yang bersih dan bebas KKN dan berani memberantas korupsi serta dengan segenap hati melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Untuk mencapai Pemantapan Reformasi Birokrasi Menuju Bartim Yang Berani dan Melayani yaitu peningkatan pendapatan petani dan pekebun; pengembangan usaha pertanian, perkebunan, Peningkatan produktivitas sektor perikanan; Pengembangan kawasan industri potensial; Pemberian jaminan perlindungan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat; Peningkatan akses permodalan bagi masyarakat; Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif; Peningkatan literasi dan penuntasan buta aksara pendidikan UMUM; Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik; Peningkatan kualitas tenaga kesehatan ; Peningkatan peran serta masyarakat untuk mendukung hidup sehat; Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas sapsras kesehatan; Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; Peningkatan peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan; Penguatan perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak; Peningkatan keluarga yang sehat dan sejahtera; Pembangunan infrastruktur dasar masyarakat; Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan; Pembangunan lingkungan pemukiman dan perumahan yang sehat; Peningkatan pengembangan rumah layak huni; Peningkatan jaringan listrik dan komunikasi terutama dipedesaan; Penguatan kualitas daya saing pemuda dan olahraga; Peningkatan promosi penyelenggaraan budaya tradisional daerah; Optimalisasi pemeliharaan situs-situs budaya dan cagar budaya daerah.

Ada satu program/kegiatan yang mendukung program prioritas nasional di Dinas Lingkungan Hidup yaitu program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan kegiatan

mitigasi adaptasi perubahan iklim. Selain itu di Bappeda juga ada dalam program perencanaan pembangunan ekonomi dengan kegiatan mitigasi rawan bencana kebakaran. Dalam hal upaya penanggulangan kemiskinan di kabupaten Barito Timur ada program yang di laksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu program pembinaan dan produktivitas ketenagakerjaan dengan beberapa kegiatan yaitu pelatihan meubeleur bahan aluminium, pelatihan mencetak batako, pelatihan anyam-anyaman, pelatihan kursus computer, pelatihan operator excavator, pelatihan sopir kendaraan roda 4 (empat), pelatihan membatik, diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut dapat menarik minat terutama anak-anak muda yang baru saja menyelesaikan pendidikan untuk mau ikut berperan serta dalam pelatihan-pelatihan tersebut sehingga mereka dapat mendaftarkan diri ke perusahaan-perusahaan yang ada di sekita Kabupaten Barito Timur maupun ke daerah-daerah tetangga karena mereka telah memiliki kemampuan yang telah didapatkan dari pelatihan yang di ikuti. Selain itu yang menjadi fokus pemerintah juga yaitu permasalahan stunting, di Kabupaten Barito Timur permasalahan stunting di tangani oleh Dinas Kesehatan yang termasuk kedalam program perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan penguatan D/S untuk intervensi stunting.

Kemampuan keuangan daerah dari sisi APBD, yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun relatif terus meningkat. Peningkatan ini dikarenakan menyesuaikan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Adapun strategi dan upaya yang di tempuh oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk pencapaian pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 tersebut di atas berdasarkan sumber penerimaan sebagai berikut :

1. Strategi pencapaian target PAD, dengan melakukan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi penerimaan daerah dari sumber pajak dan retribusi daerah. Sedangkan untuk sumber pengelolaan kekayaan daerah yang sah,

strategi yang dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan dan pemberdayaan kekayaan milik daerah.

2. Strategi pencapaian target dana perimbangan dengan melakukan koordinasi dan negosiasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat.
3. Strategi pencapaian target dana lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan melakukan koordinasi dan negosiasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

### **3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Dasar yang melatar belakangi kebijakan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pengelolaan Keuangan Daerah memuat beberapa hal yang mencakup, 1) Perencanaan dan Penganggaran; 2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah; 3) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Adapun kerangka pendanaan Kabupaten Barito Timur untuk Tahun 2020 dapat di lihat pada tabel berikut :

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	BELANJA LANGSUNG (BL)	BELANJA (Rp.)	
<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>PENDIDIKAN</b>				
DINAS PENDIDIKAN	171.760.823.868,31	49.105.897.195,00	220.866.721.063,31	22,01%
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.664.959.428,47	1.536.306.766,00	3.201.266.194,47	0,32%
<b>KESEHATAN</b>				
DINAS KESEHATAN & RSUD	33.788.828.305,97	68.056.563.986,00	101.845.392.291,97	10,15%
<b>PEKERJAAN UMUM</b>				
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.241.633.438,10	86.668.985.658,00	90.910.619.096,10	9,06%
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.665.194.193,57	17.592.353.776,37	19.257.547.969,94	1,92%
<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>				
BAPPEDA	2.590.024.530,00	5.056.011.661,00	7.646.036.191,00	0,76%
<b>PERHUBUNGAN</b>				
DINAS PERHUBUNGAN	2.674.352.858,78	3.261.414.101,00	5.935.766.959,78	0,59%
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK & PERSANDIAN	1.975.672.813,80	3.414.441.055,00	5.390.113.868,80	0,54%
<b>Z</b>				
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.600.427.447,86	5.214.919.662,00	7.815.347.109,86	0,78%
<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>				
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1.773.769.574,55	2.432.350.019,00	4.206.119.593,55	0,00%
<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>				
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.922.067.806,10	1.894.657.275,00	3.816.725.081,10	0,38%
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.487.188.873,21	6.793.888.637,00	8.281.077.510,21	0,83%
<b>SOSIAL DAN TENAGA KERJA</b>				
DINAS SOSIAL	1.646.761.498,36	3.044.809.058,00	4.691.570.556,36	0,47%
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.125.407.672,83	3.013.051.037,00	5.138.458.709,83	0,51%
<b>KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>				
DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDUSTRIAN	2.413.662.337,22	4.221.440.578,00	6.635.102.915,22	0,66%
DINAS PERDAGANGAN	2.642.717.589,55	7.320.652.221,00	9.963.369.810,55	0,99%
<b>KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.414.670.193,22	5.758.413.557,00	8.173.083.750,22	0,81%
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS	1.963.368.945,29	1.831.726.433,00	3.795.095.378,29	0,38%
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3.833.976.275,23	6.925.855.463,00	10.759.831.738,23	1,07%
<b>PEMERINTAH DAERAH</b>				
DPRD	12.519.555.000,00		12.519.555.000,00	1,25%

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	620.451.975,00		620.451.975,00	0,06%
SEKRETARIAT DAERAH				5,83%
SEKRETARIAT DPRD	9.086.497.402,92	49.426.419.159,00	58.512.916.561,92	2,60%
INSPEKTORAT	2.177.977.493,28	23.956.982.768,00	26.134.960.261,28	0,49%
BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.968.396.651,43	2.990.801.418,00	4.959.198.069,43	0,54%
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH	1.953.667.473,77	3.446.259.472,00	5.399.926.945,77	27,11%
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	265.257.933.188,06	6.733.188.259,00	271.991.121.447,06	0,00%
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	0,64%
DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.238.747.654,16	4.188.330.015,00	6.427.077.669,16	0,54%
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.977.315.684,94	3.425.549.889,00	5.402.865.573,94	0,29%
<b>KECAMATAN :</b>				
DUSUN TENGAH	1.160.171.501,67	1.743.550.792,00	2.903.722.293,67	0,42%
PEMATANG KARAU	2.003.699.404,40	2.196.787.053,00	4.200.486.457,40	0,29%
AWANG	1.638.948.091,68	1.289.780.974,00	2.928.729.065,68	0,26%
PATANGKEP TUTUI	1.444.884.591,93	1.126.214.739,00	2.571.099.330,93	0,21%
DUSUN TIMUR	1.198.177.094,29	944.918.132,00	2.143.095.226,29	0,36%
BENUA LIMA	2.143.555.424,24	1.499.807.041,00	3.643.362.465,24	0,27%
PAKU	1.497.300.796,89	1.254.169.719,00	2.751.470.515,89	0,25%
PAJU EPAT	1.475.547.024,80	1.019.358.865,00	2.494.905.889,80	0,19%
RAREN BATUAH	1.052.303.606,44	817.630.891,00	1.869.934.497,44	0,22%
KARUSEN JANANG	1.271.564.625,35	968.437.664,00	2.240.002.289,35	0,24%
<b>KELURAHAN</b>	1.496.536.529,08	862.351.043,00	2.358.887.572,08	
TAMIANG LAYANG		474.611.100,00	474.611.100,00	0,05%
AMPAH KOTA		490.350.275,00	490.350.275,00	0,05%
TANIRAN		387.659.944,00	387.659.944,00	0,04%
<b>URUSAN PILIHAN PERTANIAN</b>				
DINAS PERTANIAN	11.345.203.376,25	27.726.371.184,00	39.071.574.560,25	3,89%
DINAS PERIKANAN	1.965.108.287,49	6.904.414.670,00	8.869.522.957,49	0,88%
DINAS KETAHANAN PANGAN	1.675.195.692,53	1.967.877.698,00	3.643.073.390,53	0,36%
<b>JUMLAH</b>	<b>574.354.246.221,02</b>	<b>428.985.560.902,37</b>	<b>1.003.339.807.123,39</b>	<b>100,00%</b>

### 3.2.1.1 Prakiraan Target Pendapatan Daerah Tahun 2020

Target pendapatan daerah tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 987.159.378.560 yang terdiri dari pendapatan asli daerah yang pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 88.437.482.415 untuk Tahun 2020 diperkirakan tidak mengalami peningkatan (sama dengan tahun sebelumnya) yaitu sebesar Rp. 88.437.482.415. Dana Perimbangan pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 713.792.040.000 pada Tahun 2020 meningkat sebesar Rp. 31.841.392.200 menjadi Rp. 745.633.432.200 atau 4,27% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar pada tahun sebelumnya Rp.152.067.234.186 meningkat sebesar Rp.1.021.229.759 menjadi Rp.153.088.463.945 atau 0,67%. Menurut sumber-sumber pendapatan dirincikan menjadi:

a. pendapatan asli daerah:

Pendapatan asli daerah daerah diperoleh dari:

1. Pajak Daerah Tahun 2020 diproyeksikan Rp.38.503.000.000 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 38.503.000.000.
2. Retribusi Daerah Tahun 2020 diproyeksikan Rp.12.932.710.000 turun sebesar sebesar Rp. 18.000.000 dari tahun sebelumnya, menjadi Rp. 12.914.710.000.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp.8.629.483.615 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 8.629.483.615.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 28.372.288.800 meningkat sebesar Rp. 18.000.000 dari tahun sebelumnya, menjadi Rp.28.390.288.800.

b. Dana Perimbangan:

Adapun rincian dari setiap komponen Dana Perimbangan dan proyeksinya pada tahun 2020 terurai sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 76.259.313.900 meningkat sebesar Rp. 3.631.395.900 dari tahun sebelumnya, sebesar Rp. 72.627.918.000.
  2. Dana Alokasi Umum Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 515.634.280.350 meningkat sebesar Rp. 24.554.013.350 dari tahun sebelumnya, sebesar Rp. 491.080.267.000.
  3. Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 76.775.641.950 meningkat sebesar Rp. 3.655.982.950 dari tahun sebelumnya, sebesar Rp. 73.119.659.000.
  4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019 tetap sebesar Rp. 76.964.196.000.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
- rincian dari setiap komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan proyeksinya pada tahun 2020 terurai sebagai berikut:
1. Pendapatan Hibah Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 14.122.500.000 turun sebesar Rp. 237.300.000 dari tahun sebelumnya, sebesar Rp. 14.359.800.000.
  2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kalteng dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 26.429.124.945 turun sebesar Rp. 1.258.529.759 dari tahun sebelumnya, sebesar Rp. 14.359.800.000.
  3. Dana penyesuaian dan otonomi khusus Tahun 2020 diproyeksikan tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 27.096.175.000.
  4. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya Tahun 2020 diproyeksikan tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000.
  5. Pendapatan Lainnya Tahun 2020 diproyeksikan tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 83.940.664.000.

### **3.2.1.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2020**

Kebijakan belanja terbagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara rutin dan membiayai kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Alokasi belanja ini diarahkan untuk dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap lembaga daerah baik pelayanan yang langsung terhadap aparatur daerah maupun pelayanan kepada publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pada Tahun Anggaran 2020 Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.003.339.807.123,37 atau meningkat sebesar Rp. 66.600.078.138,07 dari tahun 2019 sebesar Rp. 960.133.786.720,93.

#### **a. Belanja Tidak Langsung**

Kebijakan belanja tidak langsung berorientasi kepada upaya pemenuhan kebutuhan rutin perangkat daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. Berkaitan dengan rencana pemerintah menaikkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk penyediaan dana untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sesuai petunjuk dan kebijakan Pemerintah Pusat termasuk pembayaran gaji ke-13 untuk Tahun Anggaran 2020. Selain hal tersebut di atas, alokasi belanja tidak langsung ini juga untuk optimalisasi alokasi dana bagi hasil kepada propinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintah desa. Disamping itu bantuan keuangan kepada instansi vertikal dan organisasi tertentu pelaksanaan berbagai kegiatan sosial dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi perhatian dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang dianggap mendesak sesuai ketentuan yang berlaku, maka dalam Tahun Anggaran 2020 masih tetap disediakan anggaran dalam bentuk belanja tidak terduga yang terutama ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, bencana sosial, dan penanganan kegiatan pemerintahan lainnya yang dianggap mendesak dalam tahun anggaran berkenaan.

Pada tahun Anggaran 2020 Belanja Tidak Langsung diproyeksikan sebesar Rp. 574.354.246.221. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp.545.307.909.923,50 mengalami kenaikan sebesar Rp.29.046.336.297,50.

Adapun rincian setiap komponen pembentuk belanja tidak langsung dan proyeksinya pada tahun 2019 terurai sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp.384.523.428.608 bila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar Rp.366.174.308.152,50 mengalami peningkatan sebesar Rp.18.349.120.455,50.
2. Belanja Subsidi Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 600.000.000,00 tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2019.
3. Belanja Hibah Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp.25.000.000.000 mengalami kenaikan sebesar Rp.11.065.300.000 dibanding tahun 2019 sebesar Rp.13.934.700.000.
4. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp.2.500.000.000,00 tidak mengalami peningkatan dibanding Tahun 2019.
5. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Tahun 2020 diproyeksikan sebesar 7.024.949.880 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.881.378.880 bila dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp 5.143.571.000,-.
6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp.152.705.867.733 atau mengalami penurunan sebesar Rp.2.249.463.038 bila dibandingkan dengan target Tahun 2019 sebesar Rp.154.955.330.771.
7. Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan target tahun 2019.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang secara umum dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya untuk pelayanan publik dan diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dasar masyarakat. Belanja langsung ini diarahkan pada urusan pemerintah daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar pada peningkatan perekonomian daerah, sehingga pilihan pendanaan untuk urusan ini betul-betul memperhatikan skala prioritas, potensi dan prospeknya ke depan.

Pada Tahun Anggaran 2020 belanja langsung dialokasikan sebesar Rp.428.985.560.902,37 atau meningkat sebesar Rp. 37.553.741.840,57 dari belanja Langsung tahun 2019 sebesar Rp. 414.825.876.797,43.

Secara keseluruhan belanja tidak langsung dan belanja langsung ini mencerminkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan kedalam program dan kegiatan pembangunan daerah dengan mengacu pada pokok-pokok kebijakan dalam dan hasil musrenbang Kabupaten Barito Timur tahun 2019 dengan mengutamakan azas pemerataan pembangunan antar wilayah dan juga kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional sehingga dengan demikian diharapkan alokasi belanja ini akan mempercepat proses pencapaian target-target pembangunan dan tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Timur.

### **3.2.1.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2020**

Proyeksi anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah secara umum diarahkan pada penyediaan dana dalam rangka menutupi defisit anggaran dengan menggunakan asumsi awal Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2019.

#### **a. Kebijakan Umum Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2020 ini dialokasikan sebesar Rp.16.180.428.563,37 meningkat sebesar Rp. 10.343.398.443,07 dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 5.837.030.119,93. Adapun rincian dari komponen Penerimaan Pembiayaan dan proyeksinya pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan Rp. 16.180.428.563,37 meningkat sebesar Rp. 10.343.398.443,07 dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 5.837.030.119,93.
2. Pencairan Dana Cadangan tidak dialokasikan atau Rp. 0, sama seperti tahun 2020 Rp. 0.
3. Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah tidak terproyeksikan.

#### **b. Kebijakan Umum Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari tahun 2019. Adapun rincian dari komponen Pengeluaran Pembiayaan dan proyeksinya pada tahun 2020 sebagai berikut :

- a) Pembentukan dana cadangan tidak diproyeksikan/direncanakan .
- b) Penyertaan Modal (Investasi) daerah tidak diproyeksikan/direncanakan.
- c) Pembayaran Pokok Utang tidak diproyeksikan/direncanakan.
- d) Pembiayaan Pinjaman Daerah tidak diproyeksikan/direncanakan.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Sasaran dan skala prioritas pembangunan daerah seperti yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur 2018-2023 menetapkan visi yang ingin di capai, yaitu **“Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Amanah”**.

Makna dari visi tersebut adalah :

1. **Sehat** adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial yang dapat memungkinkan seseorang untuk melakukan aktivitas secara produktif baik ekonomi maupun sosial.
2. **Cerdas** adalah kemampuan untuk belajar dengan keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya.
3. **Sejahtera** adalah keadaan atau kondisi masyarakat yang baik, dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dapat diartikan juga terpenuhinya segala sesuatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat.

4. **Pemerintahan yang Amanah** adalah pemerintah yang mampu memberikan pelayanan dengan maksimal dan sebesar-besarnya prioritas pembangunan untuk kemakmuran dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi RPJMD Kabupaten Barito Timur 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. **Misi pertama** : Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan perluasan lapangan pekerjaan.

Peningkatan ekonomi kerakyatan Kabupaten Barito Timur dikembangkan melalui kearifan lokal masyarakat dengan memerhatikan kemampuan dan tradisi masyarakat yang baik sehingga jumlah strategi dan arah kebijakan meliputi penelitian dan pengembangan teknologi, inovasi teknologi tepat guna, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku ekonomi kerakyatan serta penyediaan alat-alat pertanian, peternakan dan perkebunan dapat terselenggara dengan baik.

2. **Misi kedua** : Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.

Peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan yang dikembangkan melalui kesehatan dan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Barito Timur diperlukan sarana dan prasarana bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menunjang kinerja. Dalam upaya meningkatkan penataan kesehatan masyarakat perlu strategi dan arah kebijakan yaitu dengan meningkatkan kapasitas kinerja tenaga kesehatan, pemenuhan tenaga medis dan paramedis, melakukan pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga kesehatan, perbaikan standarisasi pelayanan kesehatan, penyediaan puskesmas rawat inap, puskesmas dan polindes.

3. **Misi ketiga** : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Ketersediaan infrastruktur yang layak adalah bagian dari nilai kesejahteraan sekaligus menjadi prasyarat dasar bagi pengembangan infrastruktur dasar yaitu jalan, jembatan, sumber daya air, air bersih maupun kelistrikan menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur.

4. **Misi keempat** : Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olah raga.

Pembinaan Umat beragama merupakan suatu kewajiban di wilayah Republik Indonesia, terlebih di wilayah Kabupaten Barito Timur yang memiliki keberagaman sehingga tercipta kondisi yang kondusif. Dengan, terpeliharanya kebudayaan di wilayah Barito Timur, budaya leluhur tetap lestari dan dapat dikembangkan menjadi objek-objek wisata kebudayaan. Pembinaan pemuda dan olah raga menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menghasilkan pemuda yang berprestasi dan olahragawan handal.

5. **Misi kelima** : Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Strategi dan arah kebijakan yang diterapkan dalam melaksanakan pemerintahan daerah yang baik dengan memberikan penghargaan kepada aparatur yang berprestasi, memberikan sanksi teguran lisan dan tertulis, meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan, penyediaan fasilitas kerja dengan perangkat kerja yang memadai, optimalisasi analisis jabatan dengan penempatan aparatur, perencanaan dan informasi, menyediakan fasilitas teknologi informasi, penerapan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

yang tepat, jelas dan terukur, penguatan regulasi kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemerintah daerah.

#### **4.1 Tujuan dan sasaran pembangunan**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2018 – 2023 berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Sasaran-sasaran pokok pembangunan terdiri dari :

1. Terwujudnya Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
3. Terwujudnya Prasarana Dan Sarana Dasar Yang Memadai
4. Terwujudnya Kondisi Sosial Budaya, Politik, Hukum, Keamanan Dan Ketertiban Yang Kondusif
5. Terwujudnya Pembangunan Barito Timur yang Berkelanjutan
6. Terwujud Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya sebagaimana tabel berikut :

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

**Tabel 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Barito Timur**

Visi Provinsi Kalimantan Tengah	Visi Kabupaten Barito Timur	Misi Provinsi Kalimantan Tengah	Misi kabupaten Barito Timur	Tujuan Provinsi Kalimantan Tengah	Tujuan Kabupaten Barito Timur	Sasaran Kabupaten Barito Timur	Indikator sasaran
Kalimantan tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah berkah (bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis)	Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Amanah	Pemantapan tata ruang wilayah provinsi	Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan perluasan lapangan pekerjaan.	Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas	Mewujudkan perekonomian daerah yang merata dan tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah	- LPE sektor pertanian - LPE sektor industri pengolahan
				Meningkatkan infrastruktur		Meningkatkan daya Tarik	- PDRB sektor pariwisata - Jumlah kunjungan wisatawan

				yang berkualitas		pariwisata daerah	
				-Meningkatkan pembangunan sumber daya air, daerah pesisir dan pantai		-Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	-Pengeluaran perkapita
				-Meningkatkan daya saing ekonomi daerah		-Meningkatnya investasi daerah dalam mengurangi pengangguran	-Nilai investasi berskala nasional (PMDN) -Nilai investasi berskala nasional (PMA) -Tingkat pengangguran terbuka
		Pengelolaan infrastruktur	Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan	-Meningkatkan perekonomian masyarakat rencana konsisten	- Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM	-Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	-Rata-rata lama sekolah -Harapan lama sekolah

			peningkatan sumber daya manusia.				
				-Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baru		-Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-Angka harapan hidup
				-Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		-Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	-Indeks pemberdayaan gender (IDG)
		Pengelolaan Sumber daya air, pesisir dan pantai.	Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan	Meningkatkan peran sektor pariwisata	Meningkatkan infrastruktur pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat	-Persentase panjang jalan kondisi baik -Persentase RT yang terakses air bersih -Persentase luas kawasan (perumahan) kumuh (%) -Rasio elektrifikasi (rumah tangga pengguna listrik) (%)

			pariwisata yang berwawasan lingkungan.				
				Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	- Persentase jumlah sampah yang tertangani - Status indeks kualitas air - Status indeks kualitas udara - Tutupan lahan
		Pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan	Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olah raga.	Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan	Terwujudnya masyarakat yang beragam dan berbudaya	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	- Persentase konflik yang diselesaikan (jumlah tindak pidana)
		Pemantapan tata kelola pemerintah daerah	Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan	- Persentase wirausaha baru

			bertanggung jawab.				
		Peningkatan pendidikan, kesehatan dan pariwisata.				Meningkatkan prestasi olah raga	Jumlah atlet Barito Timur yang berprestasi
		Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam				Meningkatkan kelestarian adat dan budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya
		Pengelolaan Pendapatan daerah				Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Predikat akuntabilitas kinerja
						Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan	Jumlah kasus korupsi

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

						bebas KKN	
						Meningkatnya pelayanan public yang berkualitas dan terpadu	Nilai IKM (nilai interval)

## **4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan**

Prioritas pembangunan merupakan fokus atau agenda pembangunan yang bersifat strategis yang melandasi atau berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih dari tahun ke tahun. Untuk itu, prioritas pembangunan terhubung dan merupakan arah kebijakan dalam RPJMD yang selanjutnya menjadi acuan dan harus diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dimaksud harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai satu kesatuan program strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.

### **4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional**

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. 8 (delapan ) misi pembangunan Nasional meliputi :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis;
4. Mewujudkan Indonesia aman dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju dengan berbasis kepentingan Nasional;
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia Internasional.

Sedangkan sasaran pokok Pembangunan Nasional 2015-2019 sesuai dengan visi pembangunan Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong mencakup 6 (enam) sasaran yaitu : Sasaran Makro, Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, Sasaran Dimensi Pemerataan, Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah, serta Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

#### **4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah**

Prioritas pembangunan Provinsi sebagaimana dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 meliputi :

1. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah
2. Pemerataan infrastruktur wilayah
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai
4. Stabilitas ekonomi daerah
5. Peningkatan pendapatan masyarakat
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi
7. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
8. Pengelolaan industri pariwisata
9. Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan
10. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rancangan awal RKPD Provinsi Tahun 2020 sesuai RPJMD 2016-2021

1. Pemerataan Infrastruktur Wilayah
2. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan, Pesisir dan Pantai
3. Stabilitas Ekonomi Daerah
4. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
5. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas
7. Pengelolaan Industri Pariwisata
8. Pengelolaan SDA secara Bijaksana yang Berkelanjutan
9. Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

#### **4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Timur**

RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Daya saing perekonomian Kabupaten Barito Timur semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta

profesionalisme aparaturnya penegak hukum di daerah makin mampu mendukung pembangunan.

Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi darat terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari, terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi

dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat, serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur.

Dalam penetapan prioritas belanja daerah Tahun Anggaran 2020 mengacu pada prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur untuk kurun waktu Tahun 2018-2023 sebagaimana yang tertuang dalam RPJP-D Kabupaten Barito Timur Tahap III Tahun 2018 - 2023, adalah sebagai berikut :

1. Daya saing perekonomian Kabupaten Barito Timur semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.
2. Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi

masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

3. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi darat terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata.

#### **4.3. Inovasi Daerah**

Pemerintah daerah sekarang diuntut untuk bisa lebih kreatif dengan mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru untuk lebih meningkatkan potensi daerah dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang mana nantinya hasilnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Bappeda Kabupaten Barito Timur telah membuat satu inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan untuk dapat mengunci semua program kegiatan di RPJMD, Renstra, dan Renja sehingga OPD tidak dapat membuat kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan di RPJMD dan Renstra di harapkan nantinya semua dokumen perencanaan yang di mulai dari RPJMD, Renstra, dan Renja akan sinkron, dan sampai ke

penganggaran diharapkan akan sinkron dengan dokumen yang telah dibuat dari awal tidak ada perbedaan antar satu dokumen dengan dokumen yang lainnya. Inovasi daerah tersebut sudah masuk ke dalam kegiatan di Bappeda yaitu program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan implementasi Simda Perencanaan BPKP.

#### **4.4. Program dan kegiatan yang mendukung program provinsi dan program nasional**

Pemerintah Kabupaten Barito Timur juga ikut mendukung program provinsi dan program nasional yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi

NO	Prioritas Provinsi	Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
<b>1</b>	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan Tata Ruang Wilayah</b>	<b>1.190.924.010,00</b>		
	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	301.000.000,00		301.000.000,00
	- Program Perencanaan Tata Ruang	301.000.000,00		
	b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	729.424.010,00		729.424.010,00
	- Program Perencanaan Tata Ruang	528.764.000,00		
	- Program Pemanfaatan Ruang	160.500.000,00		
	- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	40.160.010,00		
<b>2</b>	<b>Pemerataan Infrastruktur Wilayah</b>	<b>16.710.249.360,00</b>		
	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.710.249.360,00		16.710.249.360,00
	- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	574.830.000		
	- Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan			

	-	Program Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	5.170.710.110,00		
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	6.092.856.000,00		
	-	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan perairan lainnya	4.297.023.250,00		
	-	Peningkatan Jalan dan Jembatan	574.830.000		
	b.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.340.133.500,00		
	-	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	2.340.133.500,00		
<b>3</b>		<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan, Pesisir dan Pantai</b>	<b>37.259.530.023,00</b>		
	a.	Dinas Sosial	903.435.000,00		903.435.000,00
	-	Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial	700.000.000,00		
	-	Program peningkatan pemberdayaan sosial	203.435.000,00		
	b.	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	1.434.203.500,00		1.434.203.500,00
	-	Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM	298.845.000,00		
	-	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	867.285.500,00		
	-	Program peningkatan akses usaha bagi UMK dan koperasi kepada sumber daya produktif	42.000.000,00		
	-	Program pengembangan industri kecil dan menengah	226.073.000,00		
	c.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	846.393.114,00		846.393.114,00

	-	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	160.178.920,00		
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	400.835.274,00		
	-	Program peningkatan masyarakat dalam membangun desa	285.378.920,00		
	d.	Dinas Pertanian	29.326.191.672,00		29.326.191.672,00
	-	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	9.085.907.480,00		
	-	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	570.658.350,00		
	-	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	291.295.000,00		
	-	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	5.391.183.468,00		
	-	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	190.491.300,00		
	-	Program peningkatan produksi hasil peternakan	4.298.042.600,00		
	e.	Dinas Perikanan	4.749.306.737,00		4.749.306.737,00
	-	Program pengembangan budidaya perikanan	2.876.330.000,00		
	-	Program pengembangan perikanan tangkap	1.872.976.737,00		
<b>4</b>		<b>Stabilitas Ekonomi Daerah</b>	<b>2.085.899.221,00</b>		
	a.	Dinas Perdagangan	1.955.069.221,00		1.955.069.221,00
	-	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.456.654.221,00		

	-	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	498.415.000,00		
--	---	--	----------------	--	--

	b.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	130.830.000,00		
	-	Program Perlindungan Dunia Kewirausahaan Usaha Kecil dan Menengah	65.570.000,00		
	-	Program Pengendalian Penanaman Modal	65.260.000,00		
<b>5</b>		<b>Peningkatan Pendapatan Masyarakat</b>	<b>25.517.807.004,50</b>		
	a.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	940.922.069,50		940.922.069,50
	-	Program Pembinaan dan Produktivitas Ketenagakerjaan	940.922.069,50		
	b.	Dinas Pertanian	19.827.578.198,00		
	-	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	9.085.907.480,00		
	-	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	570.658.350,00		
	-	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	291.295.000,00		
	-	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	5.391.183.468,00		
	-	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	190.491.300,00		
	-	Program peningkatan produksi hasil peternakan	4.298.042.600,00		
	c.	Dinas Perikanan	4.749.306.737,00		
	-	Program pengembangan budidaya perikanan	2.876.330.000,00		
	-	Program pengembangan perikanan tangkap	1.872.976.737,00		
<b>6</b>		<b>Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas</b>	<b>18.974.214.355,20</b>		
	a.	Dinas Pendidikan	17.237.214.355,20		17.237.214.355,20

	-	Program Pendidikan Anak Usia Dini	432.646.800,00		
	-	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	13.566.778.555,20		
	-	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	1.706.196.000,00		
	-	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.531.593.000,00		
	b.	Dinas Kesehatan	1.737.000.000,00		
	-	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	270.000.000,00		
	-	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	247.000.000,00		
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.140.000.000,00		
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	80.000.000,00		
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	120.000.000,00		
<b>7</b>		<b>Pengelolaan Industri Pariwisata</b>	<b>1.692.108.000,00</b>		
	a.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga	1.692.108.000,00		1.692.108.000,00
	-	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	50.000.000,00		
	-	Program pengembangan Destinasi Pariwisata	1.642.108.000,00		
<b>8</b>		<b>Pengelolaan SDA Secara Bijaksana yang Berkelanjutan</b>	<b>318.197.635,25</b>		
	a.	Sekretariat Daerah	242.760.000,00		242.760.000,00
	-	Program Pengendalian SDA dan Kehutanan	242.760.000		

	b.	Dinas Lingkungan Hidup	75.437.635,25		
	-	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	54.437.635,25		
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	21.000.000,00		
<b>9</b>		<b>Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD</b>	<b>1.100.861.165,00</b>		
	a.	Dinas Pendapatan Daerah	1.100.861.165,00		1.100.861.165,00
	-	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.100.861.165		

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

Tabel 4.4.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten dalam Rancangan peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 Bidang Pembangunan Nasional

No	Bidang Pembangunan Nasional	uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tak Terduga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	<b>Pendidikan, meliputi Urusan Pemerintahan Daerah</b>	- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.531.593.000,00		
		- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		80.007.600,00		
		- Program Pendidikan Masyarakat		255.067.500,00		
2	<b>Kesehatan, meliputi Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		90.000.000,00		
		- Program Perbaikan Gizi Masyarakat		270.000.000,00		
		- Program Pengembangan Lingkungan Sehat		247.000.000,00		

3	<b>Perumahan dan Permukiman, meliputi: Urusan Pemerintahan Daerah</b>	- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.140.000.000,00		
		- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	80.000.000,00		
		- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	120.000.000,00		
4	<b>Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, meliputi: urusan pemerintahan daerah</b>	- Program Pengembangan Perumahan	3.340.454.360,37		
		- Program Kebersihan Kawasan Perkotaan	1.119.549.199,00		
		- Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	292.660.400,00		
		- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.715.031.217,00		
		- Program Pengembangan Kawasan Permukiman	2.340.133.500,00		
		- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limah	4.695.369.000,00		
		- Program Pengendalian Banjir	2.547.126.750,00		
		- Program Pengendalian Penanaman Modal	65.260.000,00		
		- Program Pengembangan Iklim Investasi	45.000.000,00		

5	Ketahanan Energi, meliputi: Urusan Pemerintahan Daerah	- Program Peningkatan Promosi dan Kemitraan Usaha	28.000.000,00		
		- Program Pengembangan Budidaya Perikanan	2.876.330.000,00		
		- Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1.872.976.737,00		
		- Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	5.391.183.468,00		
		- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	4.298.042.600,00		
		- Program Pengembangan Pasar Daerah	3.023.657.000,00		
		- Program Peningkatan Iklim Usaha dan Kapasitas Berusaha	16.500.000,00		
		- Program Pengawasan, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	168.000.000,00		
		- Program Pembinaan dan Produktivitas Ketenagakerjaan	940.922.069,50		
		- Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	178.652.599,50		
		- Program Transmigrasi	171.000.000,00		
		- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	50.000.000,00		
		- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.642.108.000,00		
	- Program Pengembangan Ketenaga Listrikan	2.180.901.900,00			

No	Bidang Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tak Terduga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5+6
6	<b>Ketahanan Pangan, meliputi: Urusan Pemerintahan Daerah</b>	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Program Peningkatan kesejahteraan Petani - Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Pertanian / Perkebunan - Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( Pertanian/Perkebunan)		1.074.845.968,00 113.144.430,00 570.658.350,00 9.085.907.480,00		
7	<b>Penanggulangan Kemiskinan, meliputi: Urusan Pemerintahan Daerah</b>	- Program Pembinaan Anak Terlantar - Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial - Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial - Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan		58.600.000,00 700.000.000,00 203.435.000,00 194.455.000,00		

8	<b>Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman, meliputi: Urusan Pemerintahan daerah</b>	- Program Penataan Administrasi kependudukan	982.349.909,00		
		- Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM	298.845.000,00		
		- Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	867.285.500,00		
		- Program Peningkatan Akses Usaha Bagi UMK dan Koperasi kepada Sumber Daya Produktif	42.000.000,00		
		- Program Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM	122.000.000,00		
		- Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM	418.039.500,00		
		- Program Pembinaan Kemitraan UMKM	140.589.078,00		
		- Program Pengembangan Industri Logam, mesin, kimia, tekstil, Transpormasi dan Telematika	72.597.000,00		
		- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	815.900.000,00		
		- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	434.448.500,00		
- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	402.650.201,00				

No	Bidang Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tak Terduga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5+6
9	Pembangunan Wilayah, meliputi: Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Jalan dan Jembatan</li> <li>- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</li> <li>- Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</li> <li>- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</li> <li>- Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</li> <li>- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</li> <li>- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</li> <li>- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</li> </ul>		31.544.572.030,00  574.830.000  5.170.710.110,00  4.297.023.250,00  6.092.856.000,00  400.835.274,00  160.178.920,00  285.378.920,00		

No	Bidang Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tak Terduga	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	
10	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, meliputi: Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</li> <li>- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal</li> <li>- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li> <li>- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</li> <li>- Program Pendidikan Politik Masyarakat</li> <li>- Program Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi</li> <li>- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</li> </ul>		260.454.500,00 43.722.000,00 25.000.000,00 42.045.000,00 124.390.133,00 197.000.000,00 45.000.000,00			

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Program dan kegiatan prioritas daerah merupakan substansi RKPD dan menjadi penghubung terhadap aspek penganggaran. Sesuai amanat Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Dalam kaitannya dengan siklus pengelolaan keuangan daerah, Pasal 33 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di sebutkan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Selanjutnya, Pasal 35 menyebutkan bahwa berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Kepala Daerah.

Dari aspek pembentukan arsitektur kinerja pembangunan mensyaratkan agar hubungan kinerja antar dokumen harus bersinergi agar pengendalian hasil-hasil pembangunan dapat dilakukan melalui antar dokumen. Dari hubungan antar dokumen, kinerja pembangunan dapat disederhanakan dalam satuan impact, outcome dan output. Arsitektur yang demikian itu dimaksudkan untuk memudahkan tentang apa yang akan dicapai dalam lima (5) tahun dan tahunan serta bagaimana sasaran-sasaran pembangunan tersebut akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan di dalamnya.

## **5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK MENCAPAI PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

Upaya untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah tahun 2020. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

### **1. Pendidikan**

#### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah; Pendataan dan Pemeliharaan Aset Daerah; Penyediaan Jasa Unit Pelaksana Teknis.

#### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan perlengkapan gedung kantor; Pengadaan peralatan gedung kantor; Pengadaan mebeleur; Penataan Lingkungan Kantor; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala pekarangan dan taman kantor; Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

#### **c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar; Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA.
- e. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Kegiatan Diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini; Menyusun Lego dan Mewarna; Pelaksanaan Apresiasi PTK-PAUDNI di tingkat kabupaten dan provinsi; Kegiatan HIMPAUDI; Peningkatan Kegiatan PAUD Pembina dan PAUD Swasta; Sosialisasi Kebijakan Kinerja Pengelolaan PAUD Tingkat Kecamatan; Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data PAUD; Apresiasi Bunda PAUD Berprestasi; Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik); Akreditasi Paudi; Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Indonesia (GOP-TKI) Kabupaten Barito Timur; Pembinaan Pencegahan Stunting PAUD.
- f. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Kegiatan Diarahkan pada Lomba olympiade saint SMP/MTS; Lomba pidato bahasa inggris SMP/MTS; Olympiade olahraga SMP tk. Kab, Provinsi dan Pusat; Pelaksanaan program bermutu/KKG dan MGMP SMP; Kegiatan Ujian Nasional; Kegiatan uji coba UN tk. SMP; Lomba guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi SMP; Diklat penguatan kepala sekolah; Diklat guru mata pelajaran UN tk. SMP; Festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SMP; Lomba Olympiade Mipa SD/MI; Olympiade Olahraga SD Tingkat kabupaten; Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2n) SD; Kegiatan Uji Coba UN Tingkat SD; Kegiatan Ujian Sekolah SD; Lomba Guru Berprestasi SD/MI; Pelaksanaan Program Bermutu/KKG dan MGMP SD/MI; Rehabilitasi

Sedang/Berat Bangunan SMP(DAK); Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan SMP (Penunjang DAK); Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan SD(DAK); Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan SD(Penunjang DAK); Olimpiade Sain Guru Nasional Tingkat SMP; Lomba Cerdas Cermat SD / MI; Lomba Olimpiade MIPA SD Tingkat Kecamatan; Lomba Olimpiade Sain Guru Nasional SD.

g. Program Pendidikan Non Formal dan Informal

Kegiatan Diarahkan pada Penunjang Pelaksanaan Ujian Kesetaraan Paket A,B, dan C pada PKBM; Penunjang Penyelenggaraan Kegiatan Paket B pada PKBM; Penunjang Penyelenggaraan Kegiatan Paket C pada PKBM; Monitoring dan Evaluasi Panitia Kabupaten ke PKBM Penyelenggaraan Kegiatan Keaksaraan Fungsional (AKF); Penyelenggaraan Kegiatan Keaksaraan Fungsional (AKF); Penunjang Kegiatan Uji Coba UN Paket A,B,C; Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Paket B dan C; Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan (DAK Non Fisik); Pembinaan Pramuka Kabupaten Barito Timur (KWARCAB).

h. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan Diarahkan pada Monitoring, evaluasi dan pelaporan; Kegiatan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI); Pelaksanaan Kegiatan Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru (Tamsil dan TPG); Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional PAUD, SD dan SMP; Penyediaan Sekolah Gratis Tingkat SD dan SMP; Pembinaan Dewan Pendidikan; Tim Teknis Subsidi, Aneka Tunjangan dan Aneka Jasa DIK Tingkat Kabupaten; Pembinaan Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Barito Timur; Bintek Penyusunan Dupak dan Sasaran Kinerja Jabatan Fungsional Guru PAUD, SD dan SMP; Bintek Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Jenjang Satuan Pendidikan SD dan SMP; Penetapan dan Penilaian Angka Kredit; Monitoring dan

Evaluasi Kepala Sekolah; Bantuan Pendidikan Profesi Guru (PPG); Seleksi Calon Kepala Sekolah SD dan SMP; Peningkatan Wawasan Pengawas; Pembinaan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Barito Timur.

i. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kegiatan Diarahkan pada Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah

j. Program Pendidikan Masyarakat

Kegiatan Diarahkan pada Kegiatan Pramuka Sekolah dan SKPD; Evaluasi dan Monitoring Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Pembelajaran (PKBM); Monitoring Lembaga PAUD dan DIKMAS; Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan; Bimtek Peningkatan Mutu LKP; Workshop Persiapan Akreditasi LKP.

k. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kegiatan Diarahkan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri

## 2. Kesehatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan peralatan rumah tangga; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;

- Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan; Penyediaan Layanan Publikasi dan Dokumentasi.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; Monev dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan BMD.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pendidikan dan pelatihan formal; Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Perawat/Tenaga Medis; Penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja.
- e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan Jasa Promosi Kesehatan (Pembuatan Spanduk / Baliho); Rapat Koordinasi UKS Tingkat Kabupaten.
- f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat  
Kegiatan Diarahkan pada Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Gizi Kurang; Lomba Balita Indonesia (LBI); PSG (Pemantauan Standar Gizi); PMT Bumil KEK; Pemetaan Gizi Kurang / Balita dan Bumil KEK; Monitoring & Evaluasi Program Kesga dan Gizi; Distribusi PMT; Penguatan D/S untuk Intervensi Stunting.
- g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat  
Kegiatan Diarahkan pada Pemicuan Percepatan Desa Berwawasan STBM; Pengambilan Sampel dan Pemeriksaan Kualitas Makanan dan Minuman; Pelatihan Kader STBM dan Petugas Kesehatan Lingkungan; Workshop Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) Tingkat

Kabupaten; Peningkatan Kebugaran Fisik dan Olah Raga; Monev Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kegiatan Diarahkan pada Penyemprotan/fogging sarang nyamuk; Monitoring Pengawasan Rantai Dingin (Cold Chains) dan Vaksin dan Monitoring Pekan Imunasi Nasional Polio; Survey Dinamika Penularan Malaria; Penyelidikan dan Investigasi Kasus Penyakit Potensial Wabah , KLB dan Keracunan Makanan; Mobile VCT-HIV; Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kaki Gajah; Monev dan Validasi Data Penyakit Malaria; Pertemuan Evaluasi Program TB; Pertemuan Sinkronisasi Data Program P2P; Sosialisasi Tatalaksana Kasus TB-MDR Tingkat Kabupaten Barito Timur; Pertemuan Review bagi Petugas Pengawas Minum Obat (PMO) Program TB Tingkat Kabupaten Barito Timur; Peningkatan Kapasitas Petugas Posbindu & UBM Program PTM Tingkat Kabupaten Barito Timur; Peningkatan Pengetahuan Konseling Berhenti Merokok bagi Petugas Pengajar / Pendidik (Guru) Tingkat Kabupaten Barito Timur; Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa Tingkat Kabupaten Barito Timur; Deteksi Dini Kanker Serviks dengan Metode IVA; Sosialisasi NAPZA pada Kelompok Remaja Berisiko; Pencanaan Kampanye Posbindu Penyakit Tidak Menular Tingkat Kabupaten Barito Timur; Peningkatan Kapasitas Petugas dalam pencegahan dan pengendalian Kasus HIV Tingkat Kabupaten Barito Timur; Loklatih Surveilans Penyakit Tidak Menular; Pembinaan Pelaksanaan Indikator Pengendalian PTM Terpadu di FKTP Se-Kabupaten Barito Timur; Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Wilayah Kabupaten Barito Timur; Pertemuan Evaluasi dan Tatalaksana P2 ISPA Pneumonia Tingkat Kabupaten

Tahun 2019; Pemeriksaan Kesehatan Haji dan Surveilans PTM Haji; Penguatan Jejaring SKD KLB dan Evaluasi SKDR Puskesmas; Penguatan Jejaring Surveilans Penyakit Infeksi Emerging; Monitoring dan Validasi Data IDL, Cakupan Imunisasi; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BIAS(Bulan Imunisasi Anak Sekolah); Peningkatan Kapasitas Petugas Imunisasi Puskesmas / Juru Imunisasi; Surveilans KIPI; Pelatihan Surveilans bagi Petugas Tingkat Kabupaten.

i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Diarahkan pada Penilaian kinerja Puskesmas; Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kesehatan TK Kabupaten; Penilaian Tenaga Medis dan Paramedis Teladan; Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Obat Puskesmas; Manajemen Pengelolaan Obat di Gudang Farmasi Kabupaten Barito Timur; Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Bahaya Menjelang Idul Fitri dan Natal; Pemeriksaan Bahan Berbahaya Yang Terkandung Dalam Jajanan Anak Sekolah; Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kesehatan di Pustu / Polindes; Kaji Banding Akreditasi Puskesmas; Validasi Data Sasaran Program Kesehatan; Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tingkat Kab. Barito Timur; Monitoring dan Evaluasi SIPERMON KOMDAT Tingkat Kab. Barito Timur; Validasi Data KIB Aset BMD dengan UPB di Puskesmas; Penyusunan Data Profil Kesehatan Tingkat Kabupaten; Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas; Sosialisasi Keamanan Pangan untuk IRTP; Pertemuan Sosialisasi Uji Kompetensi Bagi Tenaga Bidan, Perawat, Perawat Gigi dan Gizi; Pertemuan Sosialisasi Perizinan Kerja dan Praktek Tenaga Kesehatan; Monev Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan di Puskesmas dan Pembinaan Puskesmas PONED; Pembinaan Puskesmas Akreditasi; Pertemuan Sinkronisasi data

- SDMK dengan Puskesmas; Sinkronisasi Data SDMK ke Provinsi; Pertemuan Sinkronisasi Data Nakes yang sudah mengikuti Tubel, Diklat Jabfung, Ijin Belajar; Pelatihan Pengawasan Pangan District Food Inspektur (DFI); Monitoring dan Evaluasi Sarana IRTP; Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan sediaan farmasi di puskesmas dan sarana kesehatan swasta; Penyusunan Laporan Bulanan Penyakit; Input Data ASPAK Kemenkes; Kalibrasi Alat Kesehatan di Puskesmas; Legalitas Tanah Aset BMD Dinas Kesehatan, Puskesmas, PustuPolindes; Inventarisasi Aset BMD Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu/Polindes.
- j. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin  
Kegiatan Diarahkan pada Pertemuan Perencanaan Pengelolaan JKN/BPJS di FKTP; Monev JKN/BPJS; Pengembangan Petugas Pengelola JKN.
- k. Program Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya  
Kegiatan Diarahkan pada Monev Kondisi Fisik Bangunan, Pembangunan dan Evaluasi Kondisi Sarana dan Alat Kesehatan di Seluruh Wilayah Kab. Bartim; Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Obat & Reagensia; Pelatihan Aplikasi Sarana dan Prasarana Pendukung Puskesmas (ASPAK) bagi Tenaga Kesehatan.
- l. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak  
Kegiatan Diarahkan pada Audit Maternal dan Perinatal; Validasi Data Program KIA; Loklatih Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas; Pertemuan Peningkatan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar/Puskesmas.
- m. Program Operasional Puskesmas  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan Kegiatan Puskesmas; Penyediaan Administrasi Puskesmas.

- n. Program Penyuluhan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Diarahkan pada Pengembangan Media Promosi dan Informasi; Lomba Sekolah Sehat; Pelatihan PHBS Untuk Kader; Pelatihan Dokter Kecil; Pembinaan Kader PHBS; Sosialisasi Pemberian Fe pada Remaja; Rapat Koordinasi dan Sosialisasi GERMAS; Pembinaan PMR/PMI; Deteksi Dini Kanker Mulut Rahim dan Kanker Payudara; Pembinaan Posyandu dan Gerakan Sayang Ibu; Sosialisasi Perilaku Hidup Sehat; Sosialisasi Germas bagi Kader PKK.
- o. Program DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Kegiatan Diarahkan pada Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
- p. Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Kefarmasian (DAK FISIK) Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar; Pengadaan Obat dan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi.
- q. Program Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) Kegiatan Diarahkan pada Jaminan Pertolongan Persalinan.
- r. Program Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) Kegiatan Diarahkan pada Survey Akreditasi Puskesmas
- s. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kegiatan Diarahkan pada Workshop / Sosialisasi PIS-PK Pendampingan Kegiatan Pendataan Keluarga Sehat; Monev PIS-PK; Kegiatan Tindak Lanjut Program Kegiatan PIS-PK; Pengadaan PDL Petugas Pendataan Keluarga Sehat Logo PIS-PK.
- t. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Kegiatan Diarahkan pada pembangunan gudang obat/apotik; penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan

- III); Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit; Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain); Penunjang Kegiatan DAK; Pembangunan Instalasi Pengelolaan Makanan.
- u. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata  
Kegiatan Diarahkan pada Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit.
- v. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan  
Kegiatan Diarahkan pada Kemitraan Pelaksanaan Visum Et Rapertum.

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan peralatan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pendidikan dan pelatihan formal; Pembinaan dan pengawasan konstruksi.

- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

- f. Program peningkatan jalan dan jembatan

Kegiatan Diarahkan pada Peningkatan Jalan Ruas A sampai Z.

- g. Program pembangunan jalan dan jembatan

Kegiatan Diarahkan pada Pembangunan jembatan.

- h. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Kegiatan Diarahkan pada Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (UPR/Swakelola); Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (UPR/Swakelola).

- i. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Kegiatan Diarahkan pada Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi; Rehabilitasi/pemeliharaan irigasi (DAK); Rehabilitasi/pemeliharaan irigasi (Penunjang).

- j. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Kegiatan Diarahkan pada Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya.

- k. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK); Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (Penunjang); Penyediaan prasarana dan sarana air bersih/air minum (DAK); Penyediaan prasarana dan sarana air bersih/air minum (Penunjang).

1. Program pengendalian banjir

Kegiatan Diarahkan pada Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir; Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali.

m. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Kegiatan Diarahkan pada Perencanaan pengembangan infrastruktur; Penataan bangunan dan lingkungan.

n. Program perencanaan tata ruang

Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan.

o. Program pemanfaatan ruang

Kegiatan Diarahkan pada Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

p. Program pengendalian pemanfaatan ruang

Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

q. Program peningkatan jalan dan penggantian jembatan

Kegiatan Diarahkan pada Peningkatan Jalan (DAK); Peningkatan Jalan (Penunjang DAK).

r. Program Kegiatan Penunjang

Kegiatan Diarahkan pada Desain Perencanaan Untuk Kegiatan Kontraktual (DAK)

#### **4. Perumahan dan kawasan permukiman**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan peralatan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; Pembangunan Konstruksi/Bangunan Penunjang Gedung Kantor.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pendidikan dan pelatihan formal

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA); Penatausahaan Laporan Keuangan; Penyusunan dan Pelaporan Rencana Program dan Kegiatan.

f. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Diarahkan pada Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah; Pengelolaan Anggaran dan Perencanaan.

g. Program pengembangan perumahan

Kegiatan Diarahkan pada Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan; Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat.

- h. Program pengembangan kawasan permukiman  
Kegiatan Diarahkan pada Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman
- i. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah.
- j. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
Kegiatan Diarahkan pada Penataan RTH; Pemeliharaan RTH; Pengembangan Taman Rekreasi.
- k. Program kebersihan kawasan perkotaan  
Kegiatan Diarahkan pada Peningkatan Kebersihan Kawasan Perkotaan.
- l. Program pengembangan ketenagalistrikan  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota; Perluasan Ketenaga Listrikan; Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum, Taman, dan Hutan Kota.
- m. Program penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh  
Kegiatan Diarahkan pada Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.

## **5. Kesatuan Bangsa dan Politik**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan bahan logistik kantor; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan peralatan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

e. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kegiatan Diarahkan pada Pelaksanaan Deteksi Dini Aparatur Kesbangpol;

f. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Kegiatan Diarahkan pada Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM); Radikalisme dan Pemetaan Daerah Rawan Konflik.

g. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Kegiatan Diarahkan pada Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa; Seminar talkshow dan diklat wawasan kebangsaan; Pengawasan dan pendataan orang asing; Pembinaan forum kerukunan antar umat beragama; Peningkatan forum pembauran kebangsaan (FPK); Ikrar anak bangsa; Peningkatan kesadaran bela negara.

h. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Kegiatan Diarahkan pada Peningkatan komunikasi intelijen daerah (Kominda).

i. Program pendidikan politik masyarakat

Kegiatan Diarahkan pada Peningkatan pengetahuan demokratisasi bagi usia pelajar; Inventarisasi ormas dan pengawasan pembinaan lembaga masyarakat; Verifikasi bantuan keuangan parpol; Pemantauan dan Monitoring Persiapan Pilkada KDH dan WKDH; Pembekalan Pemahaman UU KPU No. 7 Tahun 2017 dan PP No.6 Tahun 2017; Inventarisasi Partai Politik.

j. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Kegiatan Diarahkan pada Sosialisasi Pencegahan Bahaya Banjir; Sosialisasi Pencegahan Pelarangan Pembakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan.

k. Program Ketahanan sosial, budaya dan ekonomi

Kegiatan Diarahkan pada Sosialisasi Pelarangan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pelajar; Monev dan Pengawasan Pelaksanaan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi; Pembinaan Forum Antar Umat Beragama (FKUB); Pembinaan Kesadaran Bela Negara; Sosialisasi Bahaya Narkotika pada Generasi Muda.

## **6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan perlengkapan gedung kantor; Pengadaan peralatan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; Penyediaan premi asuransi anggota pemadam kebakaran.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Personil.
- e. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan  
Kegiatan Diarahkan pada Penyiapan tenaga pengendali kewanatan dan kenyamanan lingkungan; Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan; Pelatihan pembawa Dhuaja Jari Janang Kalalawah; Penegakan Perda; Patroli Lingkungan Masyarakat Guna Meningkatkan Perlindungan Masyarakat dan Tindakan Kriminalitas; Penertiban Umum; Pengawalan dan Pengamanan.
- f. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal  
Kegiatan Diarahkan pada Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan; Pengamanan Poskotis Natal dan tahun Baru; Operasi Ketupat; Partisipasi Pameran Pembangunan.
- g. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam  
Kegiatan Diarahkan pada Monitoring, evaluasi dan pelaporan; Pemeliharaan rutin kendaraan Damkar; Penyediaan peralatan dan perlengkapan pos Damkar.
- h. Program Peningkatan Rasa Persatuan dan Kesatuan  
Kegiatan Diarahkan pada Mengikuti Kegiatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja.

## 7. Sosial

### a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

### b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

### c. Program pembinaan anak terlantar

Kegiatan Diarahkan pada Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar.

### d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Kegiatan Diarahkan pada Pembinaan penyandang cacat dan eks trauma; Pendataan dan Verifikasi data penyandang cacat berat yang diusulkan menerima bantuan sosial; Rehabilitasi penyandang trauma kejiwaan.

### e. Program pembinaan para penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK dan penyakit sosial lainnya)

Kegiatan Diarahkan pada Pembinaan wanita tuna susila (WTS); Sosialisasi, kampanye penyalahgunaan NAFZA dan penyakit masyarakat lainnya; Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Kelompok Orang Beresiko HIV AIDS; Penyuluhan/Sosialisasi UU NO. 21/2007

- tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang; Pembinaan dan Pelatihan ke Kelompok Warga binaan/eks narapidana.
- f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Kegiatan Diarahkan pada Pembinaan kesejahteraan sosial keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan (veteran); Pembinaan KOMDA Lansia; Pembinaan Olimpiade Kepahlawanan TK. Kabupaten/Provinsi.
- g. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
- Kegiatan Diarahkan pada Bantuan tanggap cepat darurat bencana alam dan bencana lainnya; Jaminan kesejahteraan sosial; Bantuan organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan Tagana; Bantuan orang terlantar; Pendataan keluarga sasaran Program Keluarga Harapan (PKH); Pembinaan pelaksanaan Jamkesmas, Askesmas, BKSP dan PKH; Pendataan KIP, KIS dan KKS; Bantuan Tanggap Darurat Bencana Sosial; Pembangunan Rumah Singgah; Pembinaan Panti Asuhan.
- h. Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial
- Kegiatan Diarahkan pada Bantuan insentif tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK); Pemberdayaan karang taruna, panti asuhan dan orsos; Pembinaan Karang Taruna Kabupaten Barito Timur.
- i. Program Perencanaan dan Pelaporan
- Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Rapat Forum SKPD tingkat kabupaten dan provinsi; Penatausahaan dan Inventarisir Barang; Kegiatan Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNN) Tahun 2016.
- j. Program Pengendalian Pengelolaan Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian
- Kegiatan Diarahkan pada Pengelolaan Data Pegawai; Fasilitasi dukungan Pelaksanaan SPM sesuai standarisasi Ombudsman RI.
- k. Program Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

Kegiatan Diarahkan pada Pendataan dan Seleksi Rumah tidak Layak Huni; Monitoring dan Evaluasi BBR RTLH/KUBE; Sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai.

1. Program Pembinaan Lansia Terlantar

Kegiatan Diarahkan pada Pendataan dan Verifikasi Data Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar.

## **8. Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Komputer; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor/Pekarangan.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pengelolaan Website SKPD; Penyusunan Pelaporan Anjab dan ABK; Penyusunan Dokumen Perencanaan.

e. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan Diarahkan pada Informasi Pasar Kerja (IPK) Kabupaten Barito Timur; Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); Sosialisasi Permenaker Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran LPK; Pemberdayaan dan Peluang Kerja Bagi Pengasuh Bayi.

f. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kegiatan Diarahkan pada Pengolaan Pelayanan Antar Kerja; Monitoring Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Wajib Lapo Lowongan Kerja; Monitoring dan Evaluasi Penempatan Tenaga Kerja.

g. Program Pengawasan, Hubungan Industrial, dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kegiatan Diarahkan pada Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Pelatihan Strategi Pencegahan Perselisihan bagi Pekerja dan Pengusaha; Koordinasi dan Pelaporan Penyelesaian Perselisihan bagi Pekerja dan Pengusaha; Inventarisasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama; Pembentukan Sarikat Pekerja/Sarikat Buruh; Sosialisasi LKS Bipartit; Tripartit Kabupaten, Perusahaan, Sarikat dan Pemerintah; Sidang Dewan Pengupahan Penetapan UMK dan Sektoral; Sosialisasi dan Monitoring UMK dan Sektoral; Verifikasi Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan di Perusahaan; Pembinaan dan Sosialisasi Struktur Skala Upah.

h. Program Transmigrasi

Kegiatan Diarahkan pada Orientasi Peningkatan Kapasitas Warga Transmigrasi; Penanganan Permasalahan Pertanahan Transmigrasi; Validasi Pertanahan Transmigrasi Eks. UPT Bambulung dan Eks. UPT Dayu; Pendataan Persebaran Transmigran; Dukungan Manajemen dan Teknis pada UPT Telang Siong SP.1; Monitoring dan Evaluasi Kawasan Transmigrasi UPT Telang Siong SP.1, UPT Wuram, UPT Bambulung (Sumber Rejo) dan UPT. Dayu (Lagan); Pembinaan Ekonomi, Sosial Budaya, Mental dan Spiritual Warga UPT Transmigrasi.

i. Program Pembinaan dan Produktivitas Ketenagakerjaan

Kegiatan Diarahkan pada Pelatihan Meubelair Bahan Alumunium; Pelatihan Mencetak Batako; Pelatihan Anyam anyaman; Pelatihan Kursus Komputer; Pelatihan Operator Excavator; Pelatihan Sopir Kendaraan Roda 4 (Empat); Pelatihan Membatik.

j. Program Perencanaan dan Pelaporan

Kegiatan Diarahkan pada Penatausahaan dan Inventarisir Barang.

k. Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja

Kegiatan Diarahkan pada Pameran Bursa Kerja (Job Fair); Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD).

## **9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan peralatan gedung kantor; Pengadaan mebeleur; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Laporan Anggaran dan Pelaporan.

e. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Kegiatan Diarahkan pada Informasi dan Edukasi Pola Asuh dan Pendidikan Anak; Penyuluhan Undang-undang Penghapusan KDRT; Lomba Penyuluh HIV/AIDS dan NAPZA bagi sekolah SLTA sederajat sekabupaten; Pola Asuh Anak dan Remaja Serta Perlindungan, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak; Promosi Advokasi dan Penyuluhan HIV-AIDS dan NAPZA bagi Pemuda Remaja dan Karang Taruna; Bimbingan dan Pelatihan Pendidikan atas Hak Anak dalam Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; Advokasi dan Sosialisasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dan Peningkatan Kualitas Anak.

f. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Kegiatan Diarahkan pada Forum Anak Kabupaten dan Ajang Kreatifitas Anak; Forum Hari Ibu; Forum Hari Anak Nasional; Forum PUG; Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan

Anak(P2TP2A); Mendata Data Terpilah; Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu; Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang perlindungan perempuan dan anak; Orientasi peningkatan aparatur tentang Forum Anak Kabupaten; Rakor gugus KLA tingkat Kabupaten; Pengumpulan data KLA dari masing-masing perangkat daerah Kab. Bartim; Penyuluhan IRT dalam peningkatan ekonomi keluarga; Pelatihan petugas pengumpul dan penginput data KLA; Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia (DPC-GOPTK); Pembinaan GOW Kabupaten Barito Timur; Sosialisasi Raperda dan Kabupaten Layak Anak.

- g. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Kegiatan Diarahkan pada Kegiatan pembinaan organisasi perempuan; Pendataan perempuan dalam Partai Politik; Pembinaan Penyelenggaraan Tugas Dharma Wanita Persatuan; Kegiatan Kaukus.

- h. Program perlindungan perempuan

Kegiatan Diarahkan pada Gugus Tugas pencegahan dan penanganan TPPO; Identifikasi data kekerasan terhadap perempuan.

- i. Program perlindungan anak

Kegiatan Diarahkan pada Pendampingan anak berhadapan dengan hukum; Identifikasi data kekerasan terhadap anak; Pembentukan dan Pembinaan PATBM; Sosialisasi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak; Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA); Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.

## **10. Ketahanan Pangan**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan peralatan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Kegiatan Diarahkan pada Penanganan Daerah Rawan Pangan; Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan; Analisis Pola Pangan Harapan; Pengembangan Sistem Informasi Pasar; Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif/Kampanye 3B (Beragam, Bergizi dan Berimbang); Pembinaan Kelembagaan Produk Berbasis Bahan Baku Lokal; Expose dan Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan; Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); Pengembangan Lumbung Pangan Desa; Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan; Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA); Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan; Pembinaan Lumbung Pangan Desa; Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);

Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA); Hari Pangan Sedunia (HPS); Pembinaan Olahan Pangan Lokal dan Pola Konsumsi B2SA.

e. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kegiatan Diarahkan pada Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan; Perencanaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan; Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).

## 11. Lingkungan Hidup

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan peralatan rumah tangga; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan mebeleur; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek.

- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun; Penyusunan Pelaporan Anjab dan ABK; Penyusunan LPPD dan LKIP; Penyusunan Dokumen Perencanaan.
- f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Kegiatan Diarahkan pada Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan; Jumat bersih; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana operasional Persampahan.
- g. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Kegiatan Diarahkan pada Penilaian Kota Sehat/Adipura; Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup; Pengelolaan B3 dan Limbah B3; Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan AMDAL; Pemantauan pelaksanaan reklamasi dalam pemulihan lingkungan hidup; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan/Penerapan Dokumen Lingkungan; Evaluasi kelengkapan perijinan pelaku usaha kegiatan; Penyelesaian kasus dan sengketa lingkungan hidup; Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD); Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; Pengambilan dan Pengujian Kualitas Air; Inventarisasi Potensi Pencemaran Lingkungan; Evaluasi Proper Perkebunan dan Pertambangan; Pengawasan Pemantauan Pencemaran Lingkungan; Pengawasan Pemantauan Kerusakan Lingkungan; Sosialisasi Lingkungan Bersih dan Sehat; Pembuatan Dokumen IKPLH/Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
- h. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kegiatan Diarahkan pada Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem; Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim; Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK).

- i. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  
Kegiatan Diarahkan pada Adiwiyata
- j. Program peningkatan pengendalian kebakaran hutan  
Kegiatan Diarahkan pada Patroli Terpadu Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan; Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan; Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; Pembuatan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan; Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja.
- k. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Lokasi TPA  
Kegiatan Diarahkan pada Peningkatan dan Pemeliharaan Lokasi TPA di Kabupaten Barito Timur.
- l. Program Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Air (DAK); Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Air dan Uji Kualitas Merkuri (Penunjang DAK).

## **12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis

kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan bahan logistik kantor; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah; Penyediaan Jasa Operator SIAK.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan perlengkapan gedung kantor; Pengadaan peralatan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

d. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan Diarahkan pada Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan; Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling untuk Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga); Penerbitan Dokumen Kependudukan (Akte, KTP, KK); Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat.

### **13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Penataan Halaman Gedung/Aula/Parkir Kantor; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.

e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kegiatan Diarahkan pada Bulan bhakti gotong royong tk. Propinsi dan Nasional; Penguatan data profil desa dan tipologi desa/kelurahan; Lomba desa; Revitalisasi posyandu; Pengembangan budaya masyarakat adat; Pemberdayaan Pengelolaan Aset Desa; Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP).

f. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Kegiatan Diarahkan pada Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat; Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Dana SPP Eks PNPM.

g. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Kegiatan Diarahkan pada Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa; Gelar teknologi tepat guna; PAP ADD; Pengendalian dan Pengelolaan Keuangan Desa.

- h. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa  
Kegiatan Diarahkan pada Rapat Koordinasi Evaluasi Monitoring Penggunaan DD, ADD, DBK dan dan Bagi Hasil Pajak.
- i. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan  
Kegiatan Diarahkan pada Lomba P2W-KSS; Peningkatan Wawasan dan Keterampilan TP PKK Kabupaten Barito Timur.

#### **14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pendidikan dan pelatihan formal; Rapat Evaluasi Tahunan Program dan Kegiatan BKBPP; Monitoring dan Evaluasi Kinerja Petugas Lapangan di kecamatan.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Diarahkan pada Penyusuna Renstra, Renja, RKA dan DPA.

e. Program Keluarga Berencana

Kegiatan Diarahkan pada Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu; Pembinaan, Pencatatan, dan Pelaporan (R/R) untuk PKB/PLKB; Temu Kerja Pencatatan dan Pelaporan(R/R); Peningkatan Kualitas Data Basis Faskes KB dan Pengendalian Data Basis PKB/PLKB; Pembinaan Forum Antar Umat Beragama Peduli Kesejahteraan Keluarga dan Kependudukan(FAPSEDU); Pembinaan Dasar Umum Institusi Masyarakat Pedesaan(IMP); Pelayanan Kontrasepsi MKJP melalui KIE dan Pelayanan Medis; Pendistribusian, Pencatatan dan Pelaporan (R/R) Alat dan Obat Kontrasepsi; Sosialisasi Kampanye KIE KB Pria.

f. Program pelayanan kontrasepsi

Kegiatan Diarahkan pada Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB.

g. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/Kr yang mandiri

Kegiatan Diarahkan pada Forum Hari Keluarga Nasional.

h. Program pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan

Kegiatan Diarahkan pada Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI); Sistem Informasi Keluarga (SIGA); Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; Kegiatan Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), PLKB Teladan, KB Lestari Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional; Penyusunan Grand Design KKBPK Kab. Barito Timur.

i. Program pemberdayaan keluarga sejahtera

Kegiatan Diarahkan pada Pramuka Saka Kencana; Evaluasi Kerja Pemanfaatan Kartu Kembang Anak; Pembinaan, Pengembangan dan Pengetahuan Kader BKR & PIK-R; Evaluasi Kerja Ketahanan

Keluarga & Pemberdayaan Keluarga; Advokasi & Informasi Generasi Berencana (GENRE); Peningkatan Keterampilan Bagi Kader/PIK-R, BKL dan BKB.

- j. Program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga
- Kegiatan Diarahkan pada Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik); Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Alakon) (DAK Non Fisik); Penggerakan Kampung KB; Pembinaan Program oleh Kader PPKBD / Sub PPKBD (DAK Non Fisik); Dukungan Media KIE dan Management BOKB (DAK Non Fisik); Pembinaan Keluarga Balita dan Anak (DAK Non Fisik); Pengadaan Implant Removal KIT (DAK); Pengadaan Sarana Kerja PKB / PLKB (DAK); Pengadaan Sarana Kerja PPKBD / Sub PPKBD (DAK); Pengadaan Sepeda Motor PKB / PLKB (DAK); Pengadaan GENDRE KIT (DAK); Pengadaan KIE KIT (DAK); Pengadaan PKB KIT (DAK); Penunjang Kegiatan DAK 5%.

## **15. Perhubungan**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- e. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ  
Kegiatan Diarahkan pada Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor; Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor; Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan; Penyusunan Kebijakan Norma Standar Prosedur Bidang Perhubungan; Peningkatan Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat.
- f. Program peningkatan pelayanan angkutan  
Kegiatan Diarahkan pada Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya; Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan; Pengawasan dan Penertiban Angkutan Jalan; Pembinaan dan Pengendalian Angkutan Sungai.
- g. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan rambu-rambu lalu lintas; Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas; Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Sungai; Pengumpulan dan Analisis Database

Rambu Lalu Lintas; Pembinaan dan Pengendalian Terminal dan Parkir; Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **16. Komunikasi dan Informatika**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan perlengkapan gedung kantor; Penataan Lingkungan Kantor; Pengadaan Papan Nama.
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi SKPD.
- d. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah.
- e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa  
Kegiatan Diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi; Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi; Perencanaan dan pengembangan

kebijakan komunikasi dan informasi; Penyediaan Sarana Layanan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah.

- f. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi  
Kegiatan Diarahkan pada Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.
- g. Program kerjasama informasi dengan mas media  
Kegiatan Diarahkan pada Penyebarluasan informasi pembangunan daerah; Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat; Pembinaan PWI.
- h. Program Penyelenggaraan Persandian  
Kegiatan Diarahkan pada Penyelenggaraan Perlindungan dan Informasi dengan Pemanfaatan Persandian di Pemerintah Daerah.
- i. Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah  
Kegiatan Diarahkan pada Penyelenggaraan Operasional Pendukung Persandian Penyelenggaraan Informasi Pemerintah Daerah.

#### **17. Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada pengadaan Kendaraan dinas/operasional;  
Pengadaan perlengkapan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan perencanaan dan pelaporan dinas.
- f. Program Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM  
Kegiatan Diarahkan pada Pembinaan UMKM Pontensial; Monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan UMKM; Pemberdayaan UMKM; Pemetaan UMKM; Expo UMKM; Fasilitasi Perijinan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- g. Program pengembangan industri kecil dan menengah  
Kegiatan Diarahkan pada Pengelolaan tanda daftar industri; Pembinaan IKM; Pelatihan Anyaman Rotan; Pengembangan Dekranas.
- h. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kegiatan Diarahkan pada Pembinaan dan Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK.

i. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

Kegiatan Diarahkan pada Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi; Tangkas terampil koperasi; Penilaian kesehatan KSP/USP; Pembinaan dan Pengawasan Koperasi; Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi; Sosialisasi Prinsip-Prinsip Koperasi; Penilaian Koperasi Berprestasi; Hari Koperasi Nasional; Pemetaan Koperasi; Pembangunan Jaringan Usaha Koperasi; Sosialisasi Akses Permodalan Koperasi; Pembentukan Induk Koperasi.

j. Program peningkatan akses usaha bagi UMK dan Koperasi kepada sumber daya produktif

Kegiatan Diarahkan pada Sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR).

k. Program Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagi Koperasi; Bantuan Sarana dan Prasarana bagi UMKM Potensial.

l. Program Perumusan Kebijakan Bidang Industri Kecil dan Menengah

Kegiatan Diarahkan pada Pengembangan Kegiatan IKM Luar Daerah; Dekranasda Tingkat provinsi; Dekranasda Tingkat nasional.

m. Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Kimia, Tekstil, Transportasi, dan Telematika

Kegiatan Diarahkan pada Monitoring, Pendataan, dan Evaluasi Kegiatan Bidang Aneka Industri.

n. Program peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM

Kegiatan Diarahkan pada Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD; Bimbingan teknis akuntansi KSP/USP; Bimtek

Kelembagaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi Karet dan Gabah; Bimtek Penyusunan Pelaporan Pajak bagi Koperasi; Pengembangan Sumber Daya UMKM.

- o. Program pembinaan kemitraan UMKM  
Kegiatan Diarahkan pada Pengembangan dan Pembinaan Kemitraan UMKM; Peningkatan Kerjasama Kemitraan UMKM.

#### **18. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; Pengelolaan Website dan Jaringan Internet.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pendidikan dan pelatihan formal; Sosialisasi peraturan perundang-undangan; Sosialisasi Pengembangan Investasi.

- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan; Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pelaporan.
- f. Program Perlindungan Dunia Kewirausahaan Usaha Kecil dan Menengah  
Kegiatan Diarahkan pada Survey Data Perizinan dan Inventarisasi Data Perizinan; Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pelayanan Perizinan; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan; Pembinaan dan Penertiban Pelaksanaan Perizinan di Masyarakat; Pendataan dan Identifikasi Perusahaan.
- g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu; Penyediaan Informasi dan Dokumentasi Perizinan Satu Pintu.
- h. Program Peningkatan Penataan Pelayanan Terpadu  
Kegiatan Diarahkan pada Penataan Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Penataan Sinkronisasi Data dan Pelayanan dengan Tim Teknis; Penyusunan Pelaporan dan Profil Pelayanan Perizinan.
- i. Program Peningkatan Pengelolaan Kemudahan Pelayanan  
Kegiatan Diarahkan pada Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat; Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- j. Program Pengendalian Penanaman Modal  
Kegiatan Diarahkan pada Peningkatan, Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Bidang Penanaman Modal Dengan

Investasi Pemerintah dan Dunia Usaha; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

k. Program Pengembangan Iklim Investasi

Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Profil Investasi Penanaman Modal; Kajian Kebijakan Penanaman Modal.

l. Program Peningkatan Promosi dan Kemitraan Usaha

Kegiatan Diarahkan pada Penyelenggaraan Pameran Investasi.

**19. Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olahraga**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

e. Program peningkatan peran serta kepemudaan

Kegiatan Diarahkan pada Kegiatan Pelatihan PASKIBRA; Mengikuti Seleksi Paskibra Tingkat Provinsi.

- f. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga  
Kegiatan Diarahkan pada Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah; Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; Penyelenggaraan HAORNAS; Penyelenggaraan Pekan Olahraga Kabupaten (POPKAB); Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POP PROV); Kegiatan Pembudayaan Olahraga; Pembinaan KONI Kabupaten Barito Timur; Pembinaan Perwosi Kabupaten Barito Timur.
- g. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  
Kegiatan Diarahkan pada Pengembangan nilai dan geografi sejarah; Pengelolaan museum dan taman budaya di daerah; Promosi Batik Khas Daerah untuk Generasi Muda melalui Kegiatan Pembinaan, Lomba dan Sosialisasi.
- h. Program Pengelolaan Keragaman Budaya  
Kegiatan Diarahkan pada Penyelenggaraan festival budaya daerah Isen Mulang; Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya serta Aksi Program PM2L; penyelenggaraan festival budaya daerah Jajaka; Penyelenggaraan Malam Kesenian Daerah; Penyelenggaraan Tari Masal.
- i. Program pengembangan pemasaran pariwisata  
Kegiatan Diarahkan pada Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata; Pengadaan Sarana dan Prasarana Promosi dan Informasi Pariwisata.
- j. Program pengembangan destinasi pariwisata  
Kegiatan Diarahkan pada Pengembangan objek pariwisata unggulan; Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
- k. Program pengembangan Kemitraan

Kegiatan Diarahkan pada Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata; Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

## **20. Perpustakaan dan Kearsipan**

### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor ; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan Diarahkan pada Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; Pengadaan Laptop; Pengadaan AC.

### **c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Tanda Pengenal; Pengadaan Pakaian Olahraga.

### **d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun; Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA.

- e. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan  
Kegiatan Diarahkan pada Pemasarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca; Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah.
- f. Program pengembangan perpustakaan daerah  
Kegiatan Diarahkan pada Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan sekolah dan Perpustakaan Masyarakat; Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca; Pembinaan Perpustakaan Masyarakat desa (PM2L); Pembinaan dan Pengembangan (SDM) Tenaga Perpustakaan.
- g. Program Pelaksanaan dan Pelayanan Perpustakaan  
Kegiatan Diarahkan pada Perawatan Bahan Pustaka; Kerjasama Perpustakaan; Pengolahan Bahan Pustaka Umum Daerah; Pengembangan Bahan Koleksi Pustaka Daerah; Penerbitan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah, Acceslon List.
- h. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan  
Kegiatan Diarahkan pada Pengklasifikasian data; Pembinaan dan Monitoring Kearsipan Ormas/ Orpol/ Masyarakat Desa; Pembinaan dan Monitoring Kearsipan Perangkat Daerah.
- i. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah  
Kegiatan Diarahkan pada Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
- j. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi  
Kegiatan Diarahkan pada Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta; Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Daerah; Pelatihan Peningkatan SDM Kearsipan.

- k. Program Pelayanan Perpustakaan SKPD, sekolah dan Perpustakaan Keliling  
Kegiatan Diarahkan pada Layananan Perpustakaan Umum, Sekolah; Layanan TI/jaringan Internet; Layanan Story Telly

## **21. Perikanan**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan peralatan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Listrik; Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

- e. Program pengembangan budidaya perikanan  
Kegiatan Diarahkan pada Pengembangan bibit ikan unggul; Pembinaan dan pengembangan perikanan; Pengembangan Statistik Perikanan; Pengawasan Hama dan Penyakit Ikan; Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan Perikanan(DAK); Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan Perikanan(Penunjang DAK); Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil; Peningkatan Sarana dan Prasarana BBIL; Gerakan Pakan Mandiri; Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan (DAK); Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan (Penunjang DAK); Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Budidaya Perikanan.
- f. Program pengembangan perikanan tangkap  
Kegiatan Diarahkan pada Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap; Pembinaan Pokwasmas dan Monitoring Perairan Umum; Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan/Pasar Ikan di Desa Dayu, Tampulangit, Jurubanu, dan Ketab; Pendamping Jaminan Perlindungan Nelayan Perairan Umum Darat; Pengembangan Produksi Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Umum Darat; Sosialisasi Pelestarian Sumber Daya Ikan; Pengembangan Habitat dan Perlindungan Sumber Daya Ikan; Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Skala Kecil; Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan; Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Nelayan (DAK); Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Nelayan (Penunjang DAK).
- g. Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Agribisnis  
Kegiatan Diarahkan pada Lomba Masak Serba Ikan; Pengumpulan Data Statistik dan AKI; Sosialisasi Gemar Makan Ikan.

- h. Program Peningkatan Produksi Perikanan  
Kegiatan Diarahkan pada Perencanaan Pembangunan Perikanan.

## **22. Pertanian**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pembangunan gedung kantor; Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas; Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan Diarahkan pada Rekonsiliasi Segitiga Barang Milik Daerah; Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA.

- e. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Kegiatan Diarahkan pada Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis; Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani; Monitoring Kemitraan Usaha Perkebunan Perusahaan Besar Swasta; Temu Tani Se-Wilayah Kabupaten Barito Timur untuk Penyusunan Program Tahun  $n+1$ ; Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Penerima BLM-PUAP; Pengembangan Kawasan Pertanian (Agropolitan); Pemberdayaan UPJA; Pendampingan Bantuan Pasca Panen Provinsi; Penilaian Kelas Kelompok Tani.
- f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)
- Kegiatan Diarahkan pada Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian; Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija; Pengembangan Perbenihan/Perbibitan; Pengembangan Sistem Informasi Pasar; Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan; Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian; Pemberdayaan Petani Penangkar Benih Tanaman Pangan; Pemeliharaan Tanaman di Kawasan Agropolitan Kalamus; Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian(DAK); Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (Penunjang DAK); Pembinaan dan Pengawasan Pupuk Pestisida; Penyusunan Sid Perluasan Sawah; Pembinaan dan Pengembangan Brigade Alsintan; Pengembangan Sumber Daya Air Pertanian; Penyusunan Data Base Kelompok Tani; Rehabilitasi Bangunan Kantor/Tempat Pertemuan; Pengembangan Kawasan Pertanian TPH; Pembinaan dan Pengembangan UPTD Serealia; Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani.
- g. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

Kegiatan Diarahkan pada Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah; Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP); Peningkatan dan Pengembangan Terminal Agribisnis; Sosialisasi dan Pendampingan Petani dalam Pengolahan Karet dan Pemasaran Hasil Bokar Bersih; Pengembangan UPTD Kebun Benih dan Kebun Produksi Tanaman Perkebunan.

- h. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan  
Kegiatan Diarahkan pada Demonstrasi Usaha Tani Pertanian; Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan (Kakao); Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan (Kopi).
- i. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan  
Kegiatan Diarahkan pada Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan; Pengendalian Gangguan Usaha Perkebunan (GUP); Pendampingan Bantuan Bibit Propinsi; Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pertanian; Pembinaan, Pengawasan Perusahaan Besar Swasta; Pengawasan dan Sertifikasi Peredaran Mutu Benih/Bibit Tanaman Kehutanan dan Perkebunan; Monitoring Pembinaan, Evaluasi dan Temu Usaha Penangkar/PBS Benih/Bibit Tanaman Kehutanan dan Perkebunan; Perencanaan Pembangunan Pertanian; Pemeliharaan Kebun Jaweten; Pemeliharaan Kebun Murutuwu; Pemeliharaan Kebun Bangi; Penerapan Budidaya Padi Inbrida/Hibrida/Hazton/Sawah/Tadah Hujan/Lahan Kering.; Perluasan Aeral Tanaman Kakao Rakyat; Perluasan Areal Tanaman Kopi Rakyat; Penilaian Usaha Perkebunan; Kebijakan Satu Peta Sektor Perkebunan; Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan; Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun; Pendataan STDB Tanaman Perkebunan; Perluasan Areal Tanaman Karet Rakyat; Sosialisasi

- Perlindungan Tanaman Perkebunan; Sosialisasi dan Peningkatan Hatinya PKK; Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) Perkebunan; Penerapan Budidaya Padi Inbrida / Hibrida / Hazton / Sawah / Tadah Hujan / Lahan Miring.
- j. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Kegiatan Diarahkan pada Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur teknis dan masyarakat (pertanian/perkebunan); Peningkatan Kinerja Penyuluh; Pertemuan Teknis Penyuluh Tingkat Kabupaten; Penyusunan Program Penyuluh Pertanian; Penilaian Angka Kredit Poin Penyuluh Pertanian; Pelatihan Penyuluh Pertanian di BPP Kecamatan.
- k. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Kegiatan Diarahkan pada Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak; Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal.
- l. Program peningkatan produksi hasil peternakan Kegiatan Diarahkan pada Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat; Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat; Pengembangan Agribisnis Peternakan; Pengadaan Bibit Ternak Babi; Sosialisasi Pengembangan Ternak Kerbau Rawa Melalui Inseminasi Buatan (IB); Sosialisasi Peningkatan Produksi Ternak Babi Batam; UPTD Pengembangan Ternak Bangi; Pembibitan dan Perawatan Ternak; Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas; Sosialisasi Peningkatan Produksi Ternak Itik; Sosialisasi Peningkatan Produksi Ternak Sapi; Pemanfaatan Olahan Daging.

m. UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Kegiatan Diarahkan pada Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak; Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah.

**23. Perdagangan**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Pengadaan Mebeleur; Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Dinas.

f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan Diarahkan pada Pameran Kalteng Expo; Pameran Kab. Bartim; Pelaksanaan Pasar Ramadhan.

g. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Kegiatan Diarahkan pada Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa; Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal (DAK); Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Metrologi (Penunjang DAK).

h. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Kegiatan Diarahkan pada Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol; Monitoring Sembako dan Barang Strategis Lainnya; Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan; Pengawasan Perijinan Pedagang Kecil dan Menengah; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Usaha Pengembangan Perdagangan; Pengumpulan Analisis Data dan Penyusunan Potensi / Profil Perdagangan; Peningkatan/Pembangunan Pasar Daerah (DAK); Penataan Pasar Tamiang Layang dan Pasar Ampah; Pengelolaan UPTD Pasar Tamiang Layang.

i. Program Pengembangan Pasar daerah

Kegiatan Diarahkan pada Pengelolaan UPTD Pasar Ampah; Pembinaan dan Pengawasan Pasar; Intensifikasi dan Extensifikasi Pungutan Retribusi Pasar; Pengawasan & Pemantauan Kebersihan dan Keamanan Pasar Daerah.

j. Program Perlindungan Masyarakat

Kegiatan Diarahkan pada Monitoring Barang Makanan yang Berbahaya/Kadaluarsa; Pelaksanaan Tera Ulang Alat UTTP; Pelaksanaan Tera Ulang Alat UTTP; Pendataan Alat UTTP.

- k. Program Peningkatan Iklim Usaha dan Kapasitas Berusaha  
Kegiatan Diarahkan pada Pembinaan Pengawasan dan Monitoring/Evaluasi Perizinan Usaha Perdagangan

#### **24. Perencanaan Pembangunan Daerah**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah; Pengelolaan Website dan Jaringan Internet.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur; Pemeliharaan taman kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi SKPD; Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan; Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pelaporan.
- f. Program Perencanaan Tata Ruang  
Kegiatan Diarahkan pada Revisi rencana tata ruang; Perencanaan Penataan Ruang; Standar Pelayanan Minimal Penataan Ruang.
- g. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman  
Kegiatan Diarahkan pada Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP); Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
- h. Program pengembangan data/informasi  
Kegiatan Diarahkan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan; Tim Evaluasi dan Penyerapan Pengendalian Anggaran; Pengelolaan SIPD; Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- i. Program perencanaan pembangunan daerah  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Rancangan RKPD; Penyelenggaraan Musrenbang RKPD; Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah; Penyusunan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2017 dan LKPJ Bupati Barito Timur Periode Tahun 2013 – 2019; Penyusunan Perubahan RKPD; Penyusunan KUA dan PPAS APBD; Penyusunan KUPA dan PPAS; Penguatan SIDA di Kabupaten Barito Timur; Koordinasi Penyusunan RKA; Perencanaan Pembangunan Kelitbangan; Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kelitbangan; Publikasi Hasil Kelitbangan; Rakornas, Rakorlitbanda, dan Hakteknas; Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Implementasi Simda Perencanaan BPKP.

- j. Program perencanaan pembangunan ekonomi  
Kegiatan Diarahkan pada Pendampingan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi; Mitigasi Rawan Bencana Kebakaran Barito Timur.
- k. Program Perencanaan Pendidikan dan Kesra  
Kegiatan Diarahkan pada Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK); Inventarisasi Potensi dan Permasalahannya di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
- l. Program Perencanaan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi(RAD-PPK).
- m. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan  
Kegiatan Diarahkan pada Pendataan dan Evaluasi Status Desa.
- n. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan  
Kegiatan Diarahkan pada Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Barito Timur.

## **25. Keuangan**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Peralatan gedung kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan RENSTRA, Renja, RKA dan DPA; Penyusunan Pelaporan Keuangan; Penyusunan Pelaporan Anjab da ABK.
- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD; Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD; Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD; Penyusunan dan Penggandaan DPA; Penyusunan dan Penggandaan DPPA; Pendampingan Penyusunan dan Entri Data RKA Tahun Anggaran n+1; Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); Penyusunan Neraca Badan Dinas Satuan Kerja; Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis; Penyusunan Laporan Rekon Per

Triwulan Untuk Seluruh SKPD; Penyusunan Realisasi APBN (TP & UB) dan APBD (DAK) Serta Menghadiri Sosialisasi Tentang Regulasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan; Penyusunan Laporan Realisasi SP2D (Bulan, Triwulan, Semester dan Tahunan); Rekonsiliasi Realisasi Pembayaran PPh 21; Pemutahiran Data Individu Pegawai Negeri Sipil; Rekonsiliasi Data Bidang Perbendaharaan; Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD Serta Pelaksanaan Penempatan Uang Daerah; Penyediaan Administrasi Pengelola BUD; Penyusunan PERDA dan PERBUB Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun N-1; Penyusunan RaPERDA dan Raperbup Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun N-1; Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun n+1; Rekonsiliasi Segitiga Barang Milik Daerah; Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah; Pembuatan Skt dan Sertifikat Tanah Milik Pemda Barito Timur; Penyusunan Laporan Semester dan Tahunan BMD; Penghapusan Barang Milik Daerah; Penilaian Barang Milik Daerah; Inventarisasi Barang Milik Daerah; Analisis Kebutuhan Gaji Pegawai TA N+1; Penyusunan Neraca Aset Tetap Barang Milik Daerah; Entry Data Penyusunan Anggaran Kas Opd Se- Kabupaten Barito Timur; Sinkronisasi Pelaksanaan Anggaran SKPD; Entry Data Penyusunan Anggaran Kas OPD se Kabupaten Barito Timur; Sinkorinisasi Pelaksanaan Anggaran SKPD; Penyusunan Laporan Bulanan Atas Penerbitan SPD; Penyusunan Perbup Transaksi Non Tunai; Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD); Pelaksanaan Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR.

## 26. Pendapatan Daerah

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pembangunan gedung kantor; Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; Peningkatan Jalan Lingkungan Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA.
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Kegiatan Diarahkan pada Penyampaian SPPT PBB; Penagihan PBB P2; Rakor PBB P2 Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional; Pendataan, Penilaian dan Pendistribusian SKRD; Penyusunan,

Pelaporan Realisasi PBB P2; Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah; Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak; Pelaporan Realisasi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lainnya; Rakor Evaluasi, Konsultasi dan Koordinasi Pendapatan Lainnya; Implementasi Simda Pendapatan; Penagihan Pajak Daerah; Pemutakhiran Data PBB-P2; Rekonsiliasi Pajak Daerah; Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah; Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.

## **27. Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia**

### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan Diarahkan pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

### **c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek; Tugas Belajar; Pelatihan Dasar CPNS Daerah; Ijin Belajar.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Penyusunan Dokumen Perencanaan.
- f. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi  
Kegiatan Diarahkan pada Update Data SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian); Pembuatan Profil Kediklatan; Pembuatan Profil Kepegawaian dan DUK Kabupaten; Pelayanan Informasi Publik.
- g. Program Pendidikan Kedinasan  
Kegiatan Diarahkan pada Pendidikan Penjenjangan Struktural; Pendidikan Ikatan Dinas IPDN dan Kedokteran Umum; Sosialisasi Penerimaan Calon Praja IPDN bagi Siswa/i SMA/MA.
- h. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi; Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV; Pengambilan Sumpah/Janji PNS; Usul Pembuatan Karis/Karsu dan Karpeg; Penyelesaian UPP, Pemberhentian dan Pensiun; Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan PNS Daerah; Pembinaan Kepegawaian bagi Kasubbag Kepegawaian bagi seluruh SKPD se-Kabupaten Barito Timur; Pengelolaan Administrasi Mutasi Umum; Usul Pembuatan Taspen; Penyelesaian Administrasi Ujian Penyesuaian Ijasah; Ujian Dinas Tingkat I dan II; Pengelolaan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS; Penyelesaian Kasus

Kepegawaian/Badan Kepegawaian; Layanan Proaktif Pembayaran Pensiun dan THT PNS; Pengelolaan SK Jabatan Fungsional; Penilaian Kompetensi Berbasis Assesment Center (Lelang Jabatan); Pengadaan ASN Kabupaten Barito Timur; Pendataan dan Pemetaan PHT dan PHL Se-Kabupaten Barito Timur; Pembinaan Pengurus Cabang PWRI Kab. Barito Timur.

- i. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KORPRI  
Kegiatan Diarahkan pada Hari Ulang Tahun KORPRI; MTQ KORPRI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah; Pesparawi KORPRI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

## **28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah; Pelayanan Kerumah Tanggaan Pimpinan DPRD.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Penataan Lingkungan Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas.

- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan; Bimbingan Teknis Bagi Struktural dan Fungsional Petugas Penggerak Pertanian; Penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA; Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan.
- f. Program peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  
Kegiatan Diarahkan pada Kegiatan Reses; Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD; Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD; Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan RI; Rapat Paripurna Istimewa PAW Anggota DPRD; Rapat Paripurna Istimewa LKPJ Bupati Bartim; Rapat - Rapat DPRD; Kegiatan IKIAWAN.
- g. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan  
Kegiatan Diarahkan pada Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

## 29. Sekretariat Daerah

### a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan peralatan rumah tangga; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah; Penyediaan Jasa Keamanan Kantor; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ULP; Pelayanan Kerumah Tanggaan KDH dan WKDH; Pelayanan Kerumah Tanggaan Sekretaris Daerah; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Produksi Daerah; Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor pada Kantor ULP; Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada Kantor ULP; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan PATEN; Penyediaan Operasi ULP; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah (Bag. Ekonomi Pembangunan); Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah (Bag. Ekonomi Pembangunan); Penunjang Operasional Lembaga Adat Dayak di Kedamangan Paju Epat; Penunjang Operasional Lembaga Adat Dayak di Paju Sepuluh; Penataan Administrasi dan Penguatan Fungsionaris Lembaga Adat Dayak di Kabupaten Barito Timur; Penunjang Operasional Lembaga Adat Dayak di Kedamangan Paku Karau; Penunjang Operasional Lembaga Dewan Adat Kabupaten Barito Timur.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas; Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan; Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas; Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; Pemeliharaan Absensi Sidik Jari; Pengadaan Peralatan Penunjang Keprotokolan dan Dokumentasi.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah; Penyusunan LPPD dan IKK; Penyusunan dan Pengelolaan Gaji Sekretariat Daerah; Pengendalian Kegiatan Pembangunan Lingkup Setda; Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); Penyusunan Standart Harga Barang/Jasa Kabupaten Barito Timur; Monitoring Pelaksanaan Program Pembangunan; Penyusunan Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah; Pengolahan Verifikasi dan Perbendaharaan; Kegiatan Penertiban SPP/SPM Setda; Penyusunan RKA OPD; Penyusunan Laporan Bulanan dan Triwulan Kegiatan Pembangunan; Penyusunan dan Evaluasi Renstra, RENJA.
- e. Program peningkatan pelayanan kedinasan Sekretariat Daerah  
Kegiatan Diarahkan pada Pelayanan Gedung Mantawara; Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah; Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Timur; Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah(Sekda,Asisten

I,II,II, dan Staf Ahli); Pemutahiran Data PNS/PHT Lingkup Setda; Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah(Bag.Adpum); Asistensi Pengisian dan Pengumpulan LHKPN; Rapat-rapat Koordinasi Bidang Hukum; Persiapan dan Pelaksanaan Expo; Pengembangan Program Pembangunan dan Mengikuti Kegiatan Musrenbang; Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah(Bag.Organisasi); Penyelenggaraan Haji; Safari NATAL; Safari NYEPI; Safari RAMADHAN; Survey Indeks Kepuasan Masyarakat; Dukungan Layanan Apkasi dan Prosesdasi; Dukungan Layanan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kab. Barito Timur; Peningkatan Maturisasi SPIP Sekretariat Daerah Kabupaten Barit Timur.

- f. Program kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kegiatan Diarahkan pada Pesantren Kilat; Pembangunan Rohani Aparatur untuk Umat Kristen; Pembangunan Rohani Aparatur untuk Umat Muslim; Sosialisasi Dana Hibah dan Bansos; Verifikasi Hibah dan Bansos.
- g. Program pengembangan data/informasi Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan dan Pengumpulan Data Potensi SDA dan Kehutanan; Sistem Databse Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN).
- h. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Kegiatan Diarahkan pada Pengumpulan Data.
- i. Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan Kegiatan Diarahkan pada Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; Mediasi Penyelesaian Konflik Pertanahan.

- j. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah  
Kegiatan Diarahkan pada Evaluasi Pelaksanaan DPA Sekretariat Daerah; Penyelesaian Tindak Lanjut LHP-BPK RI dan Inspektorat; Pengelolaan Anggaran dan Perencanaan.
- k. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa  
Kegiatan Diarahkan pada Pemilihan Kepala Desa; Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Kades, Perangkat Desa dan BPD; Pemilihan Anggota BPD.
- l. Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa  
Kegiatan Diarahkan pada Pengendalian Bansos, Rastra dan BPNT.
- m. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi  
Kegiatan Diarahkan pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); Layanan Pengadaan Secara Elektronik; Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Online.
- n. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan  
Kegiatan Diarahkan pada Pembuatan Raperda dan Perda; Konsultasi, Evaluasi dan Klarifikasi Raperda/Perdaraperbup/Perbup; Penanganan Perkara Hukum (Legitasi); Penguatan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia di Kabupaten Barito Timur; Pembuatan Lembaran Daerah dan Berita Daerah; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan; Penginformasian dan Publikasi Produk Hukum; Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Jdih) Kabupaten Barito Timur; Penataan Pelaksanaan Kerjasama Daerah; Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; Penyusunan Program Rupa-Rupa Bumi; Penataan Desa; Penyuluhan Hukum Terpadu bagi Keluarga Sadar Hukum dan Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan

Sadar Hukum; Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa.

- o. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Kegiatan Diarahkan pada Pembentukan Tim Posko Penanggulangan Darurat Bencana Kabupaten Barito Timur.

- p. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kegiatan Diarahkan pada Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri ; Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah ; Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya ; Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah KDH/WKDH ; Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah KDH/WKDH; Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pileg DPR RI, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Kabupaten Barito Timur.

- q. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Penyelenggaraan Apel Gabungan dan Apel Kesadaran Nasional; Penyusunan Anjab ABK dan Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan; Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah; Seminar Peningkatan Etos Kerja Pegawai.

- r. Program daerah otonomi baru

Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Tata Batas Kabupaten Barito Timur dengan Kabupaten Tabalong; Penataan Batas Desa di Wilayah Kabupaten Barito Timur; Penyusunan Tata Batas Kabupaten Barito Timur dengan Kabupaten Barito Selatan; Penataan Batas Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Barito

Timur; Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah.

- s. Program pemilihan dan penyedia pelayanan barang dan jasa  
Kegiatan Diarahkan pada Kegiatan Pelayanan Barang dan Jasa.
- t. Program penyelenggaraan pengembangan SDM pengadaan barang/jasa  
Kegiatan Diarahkan pada Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Kemitraan; Peningkatan Standarisasi Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- u. Program pengembangan sistem informasi kebencanaan  
Kegiatan Diarahkan pada Pembuatan Peta dan Pemasangan Peta/Tenda/Rambu Rawan Bencana.
- v. Program pengendalian SDA dan kehutanan  
Kegiatan Diarahkan pada Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Energi dan Listrik; Pengawasan dan Pengendalian Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan; Pengawasan dan Pengendalian Terpadu Penataan Lahan Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Pertambangan; Monitoring Evaluasi Pengendalian SDA Kehutanan dan Listrik.
- w. Program penataan kelembagaan  
Kegiatan Diarahkan pada Penguatan Struktur Jabatan dan Eselonering.
- x. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH  
Kegiatan Diarahkan pada Dukungan Layanan untuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara; Dukungan Layanan untuk Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Barito Timur; Dukungan Layanan untuk LPPD Kabuapten Barito Timur; Dukungan Layanan untuk

Lembaga Seni Kasidah Indonesia (LASKI); Dukungan Layanan untuk Nahdatul Ulama (NU); Dukungan Layanan untuk Pengurus Daerah Muhammadiyah; Dukungan Layanan untuk Aisyah; Dukungan Layanan untuk Panitia Pelaksanan Hari Raya Nyepi; Dukungan Layanan untuk Badan Pekerja Daerah GBI; Dukungan Layanan untuk Badan Amal Zakat Nasional; Dukungan Layanan untuk Muslimat NU; Dukungan Layanan untuk Paroki Santo Mikael Tamiang Layang; Dukungan Layanan untuk DPW GSJA; Dukungan Layanan untuk Seleksi Tilawatil Qur'an Kabupaten Barito Timur; Dukungan Layanan untuk Natal Gabungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur; Dukungan Layanan untuk Kegiatan Paskah Gabungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur; Dukungan Layanan untuk WKRI Tamiang Layang; Dukungan Layanan untuk WKRI Santo Petrus Ampah; Dukungan Layanan untuk Majelis Wilayah XVI GPdI Barito Timur; Dukungan Layanan untuk Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja - Gereja di Indonesia Setempat; Dukungan Layanan untuk Pengurus Perwakilan Majelis Sinode GKE Wilayah Kabupaten Barito Timur; Dukungan Layanan untuk Resort GKE Taminang Layang; Dukungan Layanan untuk Pengurus Daerah Persekutuan Gereja - Gereja dan Lembaga - Lembaga Injil Indonesia; Dukungan Layanan untuk Panitia Hari Besar Islam (PHBI); Dukungan Layanan untuk Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barito Timur; Dukungan Layanan untuk Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat Resort GKE Karau Ampah; Dukungan Layanan untuk Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Bentot; Dukungan Layanan untuk Badan Pekerja Harian Majelis Resort GKE Hayaping; Dukungan Layanan untuk Resort GKE Awang; Dukungan Layanan untuk Resort GKE Karusen Janang; Dukungan Layanan untuk Majelis Resort Paku;

Dukungan Layanan untuk Paroki Santo Petrus Yohanes Ampah; Dukungan Layanan untuk Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat Resort GKE Benua Lima; Dukungan Layanan untuk Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat Resort GKE Bambulung; Dukungan Layanan untuk Majelis Jemaat Resort Desa Unsum; Dukungan Layanan untuk Penyelenggaran Pesparawi Tingkat Kabupaten Barito Timur; Dukungan Layanan untuk FKAG; Dukungan Layanan untuk PGPI; Dukungan Layanan untuk Badan Komunikasi Pemuda Majelis Remaja Indonesia (BKPMRI); Dukungan Layanan untuk Wanita Islam; Dukungan Layanan untuk Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wanita Kristen Indonesia (DPC-PWKI) Kabupaten Barito Timur; Dukungan Layanan untuk Pembinaan Keagamaan Se-Kabupaten Barito Timur.

- y. Program penyelenggaraan pembinaan ASN dalam pengadaan barang/jasa

Kegiatan Diarahkan pada Pembinaan dan Pemberdayaan ASN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Sosialisasi Peraturan dan Petunjuk Teknisnya dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### **30. Kecamatan Dusun Tengah**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah; Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Kelurahan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Pengadaan Mebeleur; Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas; Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

c. Program Peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek.

e. Program pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat desa

Kegiatan Diarahkan pada Senam Rutin Bulanan Tingkat Kecamatan; Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya; Pembinaan/Sosialisasi Penyusunan RPJMDes; Pembinaan/Sosialisasi Narkoba; Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/Rakorn Desa Perbulan; Pembinaan TP - PKK

f. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Kegiatan Diarahkan pada Bimtek/sosialisasi/pembinaan PKK desa; Perlombaan gotong royong.

g. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Kegiatan Diarahkan pada Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa; Perlombaan gotong royong.

### **31. Kecamatan Pematang Karau**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas; Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas.

c. Program Peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

d. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Kegiatan Diarahkan pada Peningkatan Pembangunan Desa.

### **32. Kecamatan Awang**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Jasa

- Kebersihan Kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pembangunan gedung kanto; Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Penataan Lingkungan Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan disiplin aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA.
- e. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa  
Kegiatan Diarahkan pada Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa; Monitoring, evaluasi dan pelaporan; Pembinaan Posyantek; Gelar teknologi tepat guna.
- f. Program pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat desa  
Kegiatan Diarahkan pada Senam Rutin Bulanan Tingkat Kecamatan; Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya; Pembinaan/Sosialisasi Penyusunan RPJMDes; Pembinaan Penyusunan RKP; Pembinaan Penyusunan RAPBDes;

Pembinaan/Sosialisasi Kebakaran Hutan; Pembinaan/Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa; Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa; Pembinaan/sosialisasi Profil Desa; Pembinaan Penyusunan LPPD & LKPJ Desa; Lomba Desa; Kegiatan Penanganan Masalah Kemasyarakatan di Desa; Pembinaan TP – PKK; Pembinaan Karang Taruna.

### **33. Kecamatan Patangkep Tutui**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas; Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Patangkep Tutui; Pembangunan Konstruksi / Bangunan Penunjang Gedung Kantor.

- c. Program Peningkatan disiplin aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- d. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan  
Kegiatan Diarahkan pada Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.

#### **34. Kecamatan Dusun Timur**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah; Penyediaan Jasa Keamanan Kantor; Penyusunan Profile Kelurahan; Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Kelurahan; Pembangunan Gedung Kantor; Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; Pengadaan peralatan gedung kantor; Pengadaan mebeleur; Pengadaan Komputer; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

- b. Program Peningkatan disiplin aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu; Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- c. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya apoaratur  
Kegiatan Diarahkan pada Mengikuti kursus, pelatihan, soialisasi dan bimtek; Kegiatan Senam; Kegiatan Penyaluran RASTRA.
- d. Program kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat  
Kegiatan Diarahkan pada Seminar Sosialisasi Kepemudaan.
- e. Program pembinaan dan sosialisasi kepada mayarakat desa  
Kegiatan Diarahkan pada Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa; Pembinaan TP – PKK; Pembinaan Karang Taruna.
- f. Program penataan administrasi kependudukan  
Kegiatan Diarahkan pada Pengolahan Data Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan.
- g. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan  
Kegiatan Diarahkan pada Perlombaan Gotong Royong.

### **35. Kecamatan Benua Lima**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah; Penyusunan Profile Kelurahan; Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Kelurahan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Pengadaan mebeleur; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

c. Program Peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

d. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Kegiatan Diarahkan pada Revitalisasi posyandu; Perlombaan gotong royong.

e. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Kegiatan Diarahkan pada Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa; Monitoring, evaluasi dan pelaporan; Penyediaan Insentif RT/RW dan Biaya Operasional.

**36. Kecamatan Paku**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan jasa perbaikan

- peralatan kerja; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan bahan logistik kantor; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah; Pengendalian/Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan peralatan gedung kantor; Persentase meningkatnya pengadaan peralatan gedung kantor,
- c. Program Peningkatan disiplin aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA.
- e. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa  
Kegiatan Diarahkan pada Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa.

### **37. Kecamatan Raren Batuah**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan bahan logistik kantor; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas; Pengadaan peralatan gedung kantor; Penataan Lingkungan Kantor; Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

c. Program Peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

d. Program pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat desa

Kegiatan Diarahkan pada Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa.

### **38. Kecamatan Karusen Janang**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan bahan logistik kantor; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan peralatan gedung kantor.
- c. Program Peningkatan disiplin aparatur  
Kegiatan Diarahkan pada Penataan Lingkungan Kantor; Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan Diarahkan pada Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- e. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa  
Kegiatan Diarahkan pada Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa; Pengendalian dan Pengelolaan Keuangan Desa.
- f. Program pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat desa  
Kegiatan Diarahkan pada Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/Rakorn Desa Perbulan; Kegiatan Penanganan Masalah Kemasyarakatan di Desa.
- g. Program Peningkatan penataan pelayanan perijinan  
Kegiatan Diarahkan pada Penataan Standar Prosedur Operasional Pelayanan.

### **39. Kecamatan Paju Epat**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Diarahkan pada Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pembangunan gedung kantor; Pengadaan peralatan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

c. Program Peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan Diarahkan pada Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

d. Program kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kegiatan Diarahkan pada Pemetaan dan Pendataan Potensi Lembaga Sosial/Keagamaan; Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah Bansos.

e. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Kegiatan Diarahkan pada Pembinaan Administrasi Desa dan Kelengkapan Data; Sosialisasi peraturan di bidang perijinan.

f. Program pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat desa

Kegiatan Diarahkan pada Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa; Pembinaan/sosialisasi Profil Desa; Pembinaan Penyusunan LPPD & LKPJ Desa; Pembinaan Aparatur Pemerintahan dan BPD; Kegiatan Penanganan Masalah Kemasyarakatan di Desa.

## **5.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SELURUH PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Daftar program/kegiatan berikut komponen-komponennya disusun menurut urusan Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur. Matriks program dan kegiatan SKPD, sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :

- Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan.
- Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan.
- Indikator Kinerja.
- Lokasi Kegiatan.
- Target capaian kinerja program/kegiatan.
- Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.
- Sumber Dana.

### **5.3. Gambaran konsistensi program kegiatan dalam RKPD Tahun 2020**

Konsistensi program dan kegiatan di dalam RKPD sangat di perlukan untuk dapat memantau program dan kegiatan masing-masing OPD dalam pelaksanaannya untuk 1 (satu) tahun. Konsistensi program dan kegiatan OPD untuk pelaksanaan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

**Tabel 5.4.1. Konsistensi Jumlah Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020**

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Urusan Wajib Dasar	11	94	49.105.897.195,00	Dinas Pendidikan
		22	141	68.056.563.986,00	Dinas Kesehatan
		18	39	86.668.985.658,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		13	35	17.592.353.776,37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		11	41	1.831.726.433,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	32	6.925.855.463,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran
		12	47	3.044.809.058,00	Dinas Sosial
2	Urusan Wajib Non Dasar	11	60	3.013.051.037,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		9	52	1.894.657.275,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5	34	1.967.877.698,00	Dinas Ketahanan Pangan
		12	53	5.214.919.662,00	Dinas Lingkungan Hidup
		4	24	2.432.350.019,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		9	34	3.425.549.889,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		10	51	6.793.888.637,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	33	3.261.414.101,00	Dinas Perhubungan		

		9	27	3.414.441.055,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		15	55	4.221.440.578,00	Dinas KOperasi, Usaha Kecil, menengah dan Perindustrian
		12	38	1.743.550.792,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		11	34	5.758.413.557,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		11	52	1.536.306.766,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>3</b>	Urusan Pilihan	8	45	6.904.414.670,00	Dinas Perikanan
		13	103	27.726.371.184,00	Dinas Pertanian
		11	42	7.320.652.221,00	Dinas Perdagangan
<b>4</b>	Penunjang Urusan	14	55	5.056.011.661,00	Badan Perencanaa Pembangunan Daerah
		6	58	6.733.188.259,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5	35	3.446.259.472,00	Badan Pendapatan Daerah
		9	49	4.188.330.015,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		6	55	2.990.801.418,00	Inspektorat
		7	36	23.956.982.768,00	Sekretariat DPRD
<b>5</b>	Pendukung Urusan	25	170	49.426.419.159,00	Sekretariat Daerah
		7	30	2.687.137.328,00	Kecamatan Dusun Tengah
		4	19	1.289.780.974,00	Kecamatan Pematang Karau
		6	38	1.126.214.739,00	Kecamatan Awang
		4	20	944.918.132,00	Kecamatan Patangkep Tutui

		7	36	1.974.418.141,00	Kecamatan Dusun Timur
		5	27	1.641.829.663,00	Kecamatan Benua Lima
		5	18	1.019.358.865,00	Kecamatan Paku
		4	19	968.437.664,00	Kecamatan Raren Batuah
		9	23	862.351.043,00	Kecamatan Karusen Jangan
		6	25	817.630.891,00	Kecamatan paju Epat
<b>JUMLAH</b>		<b>370</b>	<b>1785</b>	<b>428.985.560.902,37</b>	

#### **5.4. Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur**

Pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Barito Timur berdasarkan daerah pemilihan dapat dilihat sebagai berikut :

- Daerah Pemilihan I

##### **a. Kecamatan Raren Batuah**

1. Realisasi usulan percetakan sawah di desa Baruyan.
2. Pembangunan infrastruktur pembukaan areal wisata liang batu.
3. Bantuan sarana dan prasarana pendidikan pembangunan rumah penjaga sekolah dan perpustakaan sekolah di desa Baruyan.
4. Pembuatan/renovasi pagar SD Baruyan.
5. Pengaspalan jalan di desa Baruyan.
6. Pengadaan seragam untuk ibu-ibu yasinan desa Baruyan.
7. Pengadaan alat *sound system* (pengeras suara) untuk gereja di desa Baruyan.
8. Pemasangan KWH listrik untuk gereja katolik yang ada di desa Baruyan.
9. Pengadaan peralatan habsi untuk ibu-ibu yasinan di desa Baruyan.
10. Lanjutan pembangunan mesjid di desa Baruyan.
11. Bantuan dana untuk kelompok tani bangkit mulia untuk program tanaman karet di desa Unsum.
12. Pengadaan lampu/penerangan diperkuburan desa Unsum.
13. Pengadaan bibit dan pakan ikan bagi kelompok tani di desa Unsum.
14. Pembuatan drainase/saluran air di RT.05 desa Unsum.
15. Pembuatan pagar dan perumahan sekolah di SDN 1 Unsum.
16. Minta dibuatkan pos ronda di desa Malintut.
17. Rehab pagar sekolah SD dan SMP desa Malintut.
18. Siring sungai desa Malintut.

19. Peningkatan jalan desa Malintut.
20. Perbaikan/rehab jembatan di desa Malintut.
21. Lanjutan jalan dari Malintut ke Turan Amis.
22. Pembuatan drainase di RT.01 desa Malintut.
23. Pembuatan titian cor beton desa malintut.
24. Pengendalian banjir di jalan Batuah Malintut 200 M.
25. Pembuatan drainase di desa Malintut RT.05.
26. Penggarapan lahan kering kelompok tani Tipur Raya di desa Malintut.
27. Perbaikan jalan menuju sekolah di desa Lenggang.
28. Rehab mushola di desa lenggang.
29. Pengadaan perlengkapan alat *sound system* untuk kegiatan Karang Taruna di desa Lenggang.
30. Peningkatan gang RT. 07 jalan lubuk Sud desa Batuah.
31. Pengadaan ternak sapi RT. 07 desa Batuah.
32. Agar kiranya pemerintah daerah bisa menstabilkan harga karet dan mereka juga meminta perontok padi di desa Puri.
33. Agar pemerintah daerah dapat mengupayakan tenaga kerja lokal untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Raren Batuah seperti tambang batu bara dan perusahaan sawit.
34. Agar pemerintah daerah memasang rambu-rambu lalu lintas di desa Sibung, sebab jalan yang di lalui tidak bisa menampung berat tonase truk tersebut.
35. Pembuatan balai pertemuan untuk tempat pertemuan apabila mengadakan rapat/musyawarah di desa Tangkum.
36. Lanjutan pemasangan listrik di desa tangkum.
37. Pengaspalan jalan aspal Tangkum menuju Malintut.
38. Bantuan benih ikan untuk masyarakat di desa Sibung.
39. Bantuan obat-obatan untuk kegiatan lansia di desa Sibung.

40. Pengadaan jaringan listrik untuk RT. 09, s/d RT.12 desa Sibung.
41. Pembangunan kantor SD desa Lenggang.
42. Pembuatan kolam terpal bagi masyarakat desa lenggang dan desa Puri.

**b. Kecamatan Dusun Tengah**

1. Lanjutan aspal untuk kemudahan akses warga.
2. Perbaiki jalan lokasi usaha tani untuk kemudahan mengangkut hasil panen.
3. Harapan warga pembangunan siring timbun jalan usaha tani.
4. Perbaiki jembatan dan jalan di Moloh Ampah Kota.
5. Siring sungai gang Bakti RT. 33.
6. Pengadaan ternak sapi di Moloh Ampah Kota.
7. Perbaiki/pengerasan halaman SD di Moloh.
8. Pemekaran kelurahan Ampah Kota sebab kelurahan Ampah Kota terlalu luas untuk aktivitas pemerintahan.
9. Peningkatan jalan madrasah siarul islam desa Asak.
10. Peningkatan jalan desa Rodok.
11. Rehab pagar SMA, SMP, SD.
12. Mohon dibuka tempat pelatihan bagi anak yang putus sekolah (khusus sopir dan bengkel).
13. Pembuatan siring sungai.
14. Pemasangan pipa PDAM di desa Rodok.
15. Perbaiki sarana olah raga berupa lapangan badminton desa Urup.
16. Pengadaan seragam dan peralatan habsi untuk pemuda desa Urup.
17. Penambahan luasan lahan kuburan muslim (TPU) desa urup beserta peralatan gali kubur.

18. Renovasi langgar di desa Urup.
19. Pembuatan gang baru desa urup panjang 100 M, lebar 2 M.
20. Pengadaan tenda beserta kursi untuk inventaris desa urup.
21. Lanjutan pengaspalan jalan di desa Netampin.
22. Perbaikan jalan lokasi usaha tani untuk kemudahan mengangkut hasil panen masyarakat desa Netampin.
23. Pembutan siring timbun jalan usaha tani di desa Netampin.
24. Hibah dari pemerintah daerah kepada kelompok hasbi dan kelompok yasinan di Putai/Asak.
25. Pembelian seragam kelompok hasbi, alat-alat terbang, *sound system*, dll di desa Putai/Asak.
26. Rehab/perbaikan jembatan yang ada di Ampah 2.
27. Agar pemerintah daerah mengupayakan peningkatan/menstabilkan harga karet serta membentuk koperasi untuk penampungan karet khususnya warga Barito Timur.
28. Pembutan irigasi di danau Ruyan Ampah Kota.
29. Pembutan jembatan titian di danau Ruyan Ampah Kota.
30. Pendampingan penyuluh perikanan dari dinas terkait kepada kelompok tani perikanan di danau Ruyan Ampah Kota.
31. Lanjutan pembuatan jalan tanggul Putai di Ampah Kota.
32. Peningkatan jalan di Urup RT. 18 RW.06.
33. Peningkatan gang Urup RT. 09 RW.03.
34. Peningkatan gang sadewo RT.09 RW.03.
35. Peningkatan gang asri RT. 07 RW.03.
36. Peningkatan jalan dan jembatan dari Talohen Hulu menuju Murung Baki.
37. Peningkatan jalan dan jembatan petani.
38. Pembuatan kolam terpal bagi masyarakat talohen Hulu.

**c. Kecamatan Pematang Karau**

1. Lanjutan pengaspalan/cor beton jalan di desa Pinang tunggal.
2. Pembuatan jembatan dengan konstruksi beton di desa Pinang Tunggal.
3. Pengerukan dan pendalaman sungai Kupang Bersih karena di musim hujan sering banjir meluap.
4. Pembuatan jalan usaha tani RT. 01 Kupang Bersih.
5. Masyarakat meminta bibit ikan dan pembutan kolam dan bantuan pakan ikan di RT .01 Kupang Bersih.
6. Rehab bangunan gereja di desa Kupang Bersih.
7. Perbaiki jalan ke muara plantau.
8. Rehab halaman parkir mesjid di desa Muara Plantau.
9. Gaji karyawan perusahaan sawit MJAP belum ada kejelasan dan mohon perhatian pemerintah daerah.
10. Pendalaman sungai di samping tanah usup rambut panjang.
11. Pengaspalan jalan dari Jihi ke desa Tuyau.
12. Rehab atap pustu karena banyak yang bocor di desa Tuyau.
13. Minta di buat pos ronda (gardu) di desa Jihi.
14. Pembuatan pagar puskesmas Jihi.
15. Pembuatan/perbaiki cor jalan belimbing raya seluas 250 M di desa Bambulung.
16. Pengaspalan jalan simpang tiga menuju jembatan desa Tuyau.
17. Lanjutan pengaspalan jalan dari desa Matandra menuju desa Sumber Rejo.
18. Pembangunan gudang alat-alat pertanian 5x6 M di desa Lampeong.
19. Pengadaan traktor mini untuk kelompok tani di desa Lampeong.

20. Perbaiki pagar sekolah dan pembuatan sumur di SDN Simpang Muru Duyung.
21. Pembuatan WC SDN Lampeong, sumur bor dan pembuatan pintu gerbang.
22. Pembuatan pustu Lampeong.
23. Pembangunan rumah ibadah Hindu kaharingan/balai basarah.
24. Darlen/penghulu adat : mohon kepada pemerintah daerah agar mamfasilitasi dengan perusahaan SGM masalah tata batas hak masyarakat adat.
25. Pendirian SMP satu atap di desa Lampeong.
26. Lanjutan pengaspalan/cor beton jalan desa Pinang Tunggal.
27. Warga mengusulkan jembatan Pinang Tunggal dengan konstruksi beton sebab jembatan yang sekarang masih menggunakan kayu.
28. Renovasi/pembuatan jembatan penyeberangan di desa Nagaleah.
29. Pembuatan jembatan pertanian untuk akses masyarakat dalam rangka mengangkut hasil pertanian.
30. Masyarakat menghendaki agar kiranya untuk tahun 2019 s/d 2020 agar jalan dari simpang Jihi arah ke Tuyau minta di cor. Sebab jalan tersebut akses 4 desa yang terdiri dari desa Pinang Tunggal, desa Tuyau, desa Kupang Bersih, serta desa Ketab.
31. Masyarakat desa Tuyau meminta pula agar jalan yang lama/jalan mujahidin agar dapat di cor sebagai penyangga banjir.
32. Pendalaman sungai Gahuh di desa Kupang Bersih.
33. Pembuatan irigasi di desa Kupang Bersih.
34. Pembuatan sarana prasarana air bersih di desa Kupang Bersih.

35. Pengadaan tanah pemukiman (TPU) muslim dan kristiani di desa Kupang Bersih.
36. Program bedah rumah bagi masyarakat yang tidak mampu.
37. Pemberian beasiswa pendidikan khususnya untuk perguruan tinggi.
38. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah dasar yang ada di Kupang Bersih.
39. Pengadaan pupuk organik di desa Kupang Bersih.
40. Bantuan air bersih berupa sumur gali bagi masyarakat di desa Bambulung.
41. Pembuatan kolam ikan dari terpal bagi masyarakat di desa Bambulung.
42. Bantuan ternak itik bagi masyarakat desa Bambulung dan desa Nagaleah.

- Daerah pemilihan II

**a. Kecamatan Awang**

1. Pembangunan jembatan sei awang.
2. Lanjutan peningkatan ruas jalan Pianggu-Ampari-Janah Mansiwui.
3. Rehabilitasi aula puskesmas Hayaping.
4. Rehabilitasi 3 (tiga) rumah dinas puskesmas Hayaping.
5. Pembuatan pagar puskesmas hayaping.
6. Perbaikan/pembangunan balai adat.
7. Lanjutan pembangunan balai basarah.
8. Bantuan kolam (gali, terpal, keramba) disesuaikan dengan kelompok petani ikan.
9. Bantuan bibit ikan (nila, patin, lele) dan pakan ikan.
10. Bantuan bibit ternak sapi, babi, ayam potong, ayam petelor, itik.

11. Bantuan pembangunan rumah ibadah tetap dilanjutkan kerana masih sangat dibutuhkan.
12. Bantuan operasional rumah ibadah, agar dilanjutkan dan ditingkatkan nilainya.
13. Pemasangan jaringan listrik sepanjang jalan Ampari-Pianggu (sampai dengan menyala/hidup).
14. Pemasangan jaringan listrik sepanjang jalan Janah Mansiwui-Apar Batu sepanjang 3,5 Km.
15. Pengadaan penampungan air bersih (tandon air besar), 2 rumah 1 penampungan di desa Ampari.
16. Perbaiki benderang riam lumui yang berada di Apar Batu.
17. Bantuan kolam ikan beserta bibit ikan di desa Ampari.
18. Bantuan dari pemerintah daerah untuk pembuatan kandang ternak (babi).
19. Perbaiki jalan Hayaping-Ampari.
20. Sehubungan dengan permasalahan air bersih yang dialiri dari Apar Batu, maka desa mengusulkan bahwa aliran air bersih ini segera dipindahkan ke sumber air yang lain yaitu dari ulu Ampari, dan jika memungkinkan pipa yang digunakan untuk aliran air bersih tersebut adalah pipa besi.
21. Pengaspalan jalan Hayaping-Ampari.
22. Perbaiki jalan gang RT. 01 yang rusak menuju sekolah di desa Ampari.
23. Rehab/pembuatan pagar SD di desa Ampari.
24. Rehabilitasi bangunan sekolah beserta sarana dan prasarana.
25. Lanjutan pembuatan jalan warah usaha tani di desa Biwan.
26. Pembuatan pustu desa Biwan.
27. Pembuatan drainase jalan wungkur tundan desa Biwan ke arah desa Danau.

28. Pengadaan tempat tong air desa Biwan.
29. Pembuatan drainase di RT. 01, 02, dan 03 desa Janah Mansiwui.
30. Pengadaan tong air bersih desa Janah Mansiwui.
31. Lanjutan pengaspalan jalan Janah Mansiwui menuju Dusun Gunung Karasik.
32. Pembuatan drainase di RT.04 desa Hayaping.
33. Peningkatan/perbaikan jalan gang RT.02 dan 03 desa Hayaping.
34. Rehab/perbaikan bendung riam lumui yang berada di puncak bahalang desa Apar Batu.
35. Mengharap bimbingan dan pembinaan dari pemerintah daerah terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa.
36. Pengajuan hibah bendungan riam lumui dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah agar pemerintah daerah Kabupaten serta pemerintah desa dapat melakukan rehab atau perbaikan bendungan dengan menggunakan APBD Kabupaten maupun dana desa.
37. Perbaikan dan pembuatan jalan dari desa Apar Batu menuju Dusun Gunung Karasik.
38. Bantuan meubeler 50 buah meja dan kursi untuk SDN Apar Batu.
39. Rehabilitasi rumah tidak layak huni atau bedah rumah di desa Biwan.
40. Peran serta pihak pemerintah daerah mulai dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan instansi terkait dalam hal pembebasan atau pembersihan jalur tiang dan tali PLN dari desa danau ke desa Janah Mansiwui, dari desa Ampari ke desa Apar Batu, dan dari desa Ampari ke desa Pianggu.
41. Pada tanggal 13 Desember 2018 diadakan peninjauan lapangan di kecamatan Awang berkenaan tiang dan kabel PLN arah :

- Desa Danau – Desa Janah Mansiwui
- Desa Ampari – Desa Pianggu
- Desa Ampari – Desa Apar Batu
- Kendala yang dihadapi adalah adanya warga yang tidak merelakan tanam tumbuhnya di tebang untuk dijadikan jalur tiang dan kabel PLN
- Diharapkan agar ada penyelesaian antara instansi terkait dan kepada warga yang bersangkutan diranah yang lebih tinggi yakni tingkat kabupaten.

42. Penggantian jembatan sei Awang ke desa hayaping menjadi konstruksi.

43. Perbaiki jalan di wilayah RT 04 dan 05 desa Hayaping.

**b. Kecamatan Paku**

1. Rehab/pembangunan pustu desa Gandrung.
2. Pembuatan rumah dinas pustu bagi petugas kesehatan di desa Gandrung.
3. Pembuatan siring SDN
4. Lanjutan peningkatan/pengaspalan ruas jalan desa Pangka-desa Gandrung.
5. Cor beton sepanjang 250 meter di desa Gandrung.
6. Lanjutan pengerasan jalan dari desa Gandrung RT. 01 ke jalan simpang yayang RT.03.
7. Pengadaan sarana dan prasarana air bersih di desa Gandrung.
8. Bantuan bibit tanaman dan pupuk untuk jenis tanaman karet, kopi, coklat dan buah-buahan.
9. Bantuan kolam bibit ikan (gali atau terpal).
10. Bantuan bibit ikan dan pakan jenis ikan nila, patin dan lele.
11. Masyarakat mempertanyakan bangunan gedung SD di desa Taringsing yang sampai saat ini pembangunan terbengkalai.

**c. Kecamatan Paju Epat**

1. Trans Siong di desa Siong merupakan bagian dari Dinas Transmigrasi Provinsi Kalimantan yang masa pembinaannya berakhir per tanggal 31 Desember 2018.
2. Diusulkan trans Siong menjadi desa definitive pemekaran dari desa Siong yang menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Barito Timur.
3. Peningkatan jalan poros menuju trans Siong.
4. Peningkatan jalan dalam trans Siong.
5. Penambahan ruang kelas 3 (tiga) lokal di desa Trans Siong.
6. Pembangunan gedung perpustakaan SD trans Siong di desa Siong.
7. Diusulkan SD trans Siong menjadi SD negeri di Kabupaten Barito Timur.
8. Penambahan tenaga pendidik/guru.
9. Bantuan operasional dan pembangunan rumah ibadah yang ada di trans siong tetap dilanjutkan (mesjid, gereja).
10. Pembangunan pustu trans Siong (tanah lokasi tersedia).
11. Pembuatan lapangan sepak bola di trans Siong (lokasi tanah tersedia).
12. Bantuan jaminan kesehatan gratis/BPJS bagi masyarakat tidak mampu/miskin.
13. Pembangunan halaman mesjid dengan rangka beton desa Juru Banu.
14. Perbaiki jalan dan pengaspalan jalan Juru Banu menuju Telang Baru.
15. Pembuatan pagar sekolah SD dan SMP.
16. Pengadaan computer untuk sekolah SD, SMP dan SMA.
17. Pembangunan masjid di desa Kali Napu.

18. Pembangunan jembatan di desa Kali Napu.
19. Pembangunan mushola RT 01 karena lahannya sudah tersedia.
20. Pengadaan sound system untuk kegiatan karang taruna di desa Kali Napu.

**d. Kecamatan Karusen Janang**

1. Peningkatan/pengerasan jalan lintas poros simpang naneng (RT.02) – Puruwian- Balawa sepanjang 7 Km.
2. Bantuan pengadaan kendaraan dinas operasional bagi ketua BPD.
3. Peningkatan tunjangan penghasilan BPD.
4. Pegawai tidak tetap/PTT (staf TU, penjaga sekolah, petugas kebersihan) SMAN Karusen Janang belum dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk membantu pemberian honor bagi PTT SMAN.
5. Pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) di RT. 03 sebanyak 20 titik tiang listrik.
6. Program pembersihan anak alur sungai guna memenuhi kebutuhan air di musim kemarau di wilayah desa Simpang Naneng.
7. Perbaikan jembatan sungai Paku.
8. Pembuatan pasar desa.
9. Perbaikan jalan menuju desa Ipu Mea, desa Lagan, dan desa Putut Tawuluh.
10. Mempertanyakan program pemerintah tentang BPJS ketenagakerjaan yang diberikan oleh PT. SGM tidak dapat digunakan oleh buruh atau karyawan.
11. Peningkatan jalan desa Wuram arah trans 100 sepanjang 1,5 KM.
12. Rehab/perbaikan mesjid al mahajirin trans 100.

13. Perbaiki tanggul penangkis banjir desa Wuram yang sekarang sudah tidak berfungsi lagi.
14. Bantuan pembuatan tambak ikan mengingat kondisi lahan yang tersedia lebih sesuai jika difungsikan sebagai tambak ikan.
15. Kondisi rumah warga trans 100 umumnya rusak berat, mohon perhatian dari dinas terkait yakni Dinas Perumahan dan permukiman.
16. Masih banyaknya dari warga trans 100 atau mungkin juga warga desa Wuram pada umumnya belum memiliki kartu BPJS/JKN-KISS bahkan ada yang belum memiliki E-KTP.

- Daerah Pemilihan III

**a. Kecamatan Dusun Timur**

1. Pembangunan kantor desa Jaar.
2. Pembuatan gang sepanjang 200 M disebelah SDN Longkang.
3. Peningkatan jalan mundai 7 Km, pengadaan jaringan listrik dan pembuatan jalan ke persawahan sejauh 1 Km.
4. Pengaspalan jalan lingkaran luar Jaar-Magantis RT.13.
5. Perbaikan/pembuatan jalan mundai-Marangga 3 Km serta pemasangan lampu.
6. Penerangan.
7. Pembuatan jembatan tiam sekitar 100 m di luau guha.
8. Pembuatan jembatan titian penyeberangan 30 m panjang/2 blok.
9. Pemasangan lampu jalan (PJU)RT.13 jalan lingkaran watas kurang lebih 30 tiang.
10. Pengaspalan jalur lingkaran dari RT. 08 sampai RT.09 SMP-4 Tamiang Layang sepanjang 1200 meter.
11. Pemasangan jaringan listrik di desa Marangga RT.12 dan kantor BPD Jaar.

12. Pembuatan taman sekolah di SDN 1 Jaar dan pemasangan teralis kantor sekolah SDN 1 Jaar.
13. Pembuatan pengairan bagi pertanian di RT 5 desa Jaar sehingga air bisa diatur.
14. Pembangunan kantor desa Jaar bisa selesai Tahun 2019.
15. Dibukanya akses jalan gang-gang yang ada di pragas KTP (Kuasulidasi Tanah Perkantoran) yang ada di RT.13 yang luas lokasi KTP kurang lebih 80 HA.
16. Pembuatan penerangan jalan umum dari jalan Mudai sampai Marangga sejauh 3 Km.
17. Pengerasan aspal jalan gang/lingkungan disebelah kantor Dukcapil.
18. Lanjutan aspal jalan dibelakang SMPN-1 Tamiang Layang.
19. Penimbunan jalan padat karya yang rusak parah di Magantis-Harara.
20. Pembuatan Box Culpet di jalan padat karya Magantis-Harara.
21. Pembuatan siring sungai di desa harara.
22. Lanjutan drainase di jalan dambung kuruy.
23. Cor beton jalan kartika jaya.
24. Pembuatan pagar sekolah SMPN-3 kartika Jaya.
25. Lanjutan pengerasan dan pengaspalan jalan Gumpa Maragut kurang lebih 3 Km.
26. Pengerasan jalan Gumpa Tewah pupuh kurang lebih 7 Km jadi skala prioritas.
27. Pengerasan jalan Gumpa Dusun Marangga kurang lebih 7 Km.
28. Pengerasan jalan Gumpa-Matarah kurang lebih 6 Km.
29. Pemasangan listrik RT.05 ke kurukif.
30. Pemasangan penerangan jalan umum (PJU) sepanjang desa Gumpa.

31. Pembuatan drainase sepanjang desa Gumpa.
32. Rehab/perbaiki polindes desa Gumpa.
33. Rehab posyandu desa Gumpa.
34. Mohon perubahan status SDN 3 Jaar ke SDN desa Gumpa.
35. Pembuatan kolam ikan.
36. Perbaiki jalan Gumpa-Maragut.
37. Perbaiki jalan Gumpa-Mangkarap.
38. Pengadaan listrik di RT.05.
39. Penampungan air di RT.01.
40. Peningkatan jalan Rt.02 Tamiang Layang Haringen.
41. Pembuatan siring sungai kamentu kurang lebih 50 Km.
42. Penambahan tiang listrik di RT.02, RT.03 dan RT.04 desa Karang Langit.
43. Bantuan bibit ternak, obat dan pakan ternak dan menjadi bapak angkat dari kelompok ternak kami karena selama ini kami selalu ketergantungan dari pihak perusahaan (desa Karang Langit).
44. Bantuan bibit karet agar kami dapat meremajakan kebun karet kami.
45. Perbaiki jalan usaha tani di desa Karang Langit.
46. Pengadaan mobil ambulance di desa Maragut.
47. Peningkatan jalan di RT.03 desa Maragut.
48. Pembangunan WC umum untuk MCK di RT.03 desa Maragut.
49. Pengadaan kendaraan dinas untuk P3NTR desa Maragut.
50. Petugas yang ditugaskan di puskesmas agar stand by dan diharapkan bisa bertempat tinggal di desa Maragut, karena biasanya petugas yang bertugas jam 12 siang sudah tidak ada lagi di tempat.
51. Minta bibit pertanian (bibit karet/kopi) atau peternakan.
52. Pembuatan kolam ikan.

53. Minta sapi qurban untuk hari raya idul adha desa Maragut.
54. Meminta kepada pemerintah daerah mengadakan program pembuatan SKT gratis desa Maragut.
55. Pengadaan mobil pemadam kebakaran desa Maragut.
56. Pembangunan drainase di desa Maragut.
57. Rehab total SDN desa Maragut.
58. Rehab total pustu desa Maragut.
59. Peningkatan jalan desa Maragut-Gumpa.
60. Pengadaan terbang untuk kelompok maulid habsi.
61. Pengadaan mesin genset.
62. Peningkatan jalan menuju SDN IV Tamiang Layang dari jalan manunggal kelurahan Tamiang Layang RT.06 (aspal yang lama sudah sangat rusak dan terkikis).
63. Peningkatan jalan menuju SDN II desa Magantis RT.05 panjang jalan ±500 meter.
64. Peningkatan jalan patianom-magantis arah stadion panjang jalan ±400 meter.

**b. Kecamatan Benua Lima**

1. Pembuatan sumur (air bersih) untuk warga desa Tewah Pupuh.
2. Perbaiki jalan dan jembatan dari desa Gumpa menuju desa Tewah Pupuh.
3. Pembuatan sumur (air bersih) di RT.02 desa Tewah Pupuh.
4. Usulkan ternak itik/bebek untuk petani.
5. Pengadaan pupuk dan mesin perontok padi bagi kelompok tani harapan marani.
6. Pembuatan jalan kelompok tani kesawah andil awing di Rt.01 dan RT.02 Gambus.
7. Pengadaan pakaian olah raga (seragam) untuk kader “lansia”.

8. Bantuan penguat suara/(wearless) untuk gereja GBI Gambus.
9. Perbaiki lapangan olah raga SMPN 2 Benua Lima.
10. Pengadaan jaringan instalasi listrik dan pembuatan pagar di SD 1 Tewah Pupuh.
11. Pembuatan pagar, air bersih dan rumah dinas guru.
12. Pengadaan laptop, wearless, halaman sekolah di pasang paving dan baju seragam sekolah bagi PAUD.
13. Perbaiki jalan dari SMP 2 arah Gumpa.
14. Pembangunan rumah dinas SDN 2 Tewah Pupuh rehab rumah dinas sebanyak 5 buah.
15. Perbaiki jalan kelompok tani 1-6 desa Tewah pupuh.
16. Mohon peningkatan jalan inspeksi sawah Rt.02 di desa Bamban.
17. Mohon peningkatan jalan Bamban/Maragut RT.05.
18. Mohon peningkatan jalan Bamban/Bagok RT.02.
19. Mohon penimbunan halaman dan teralis penutup drainase teras SDN Bamban.
20. Mohon pembuatan pagar keliling SD.
21. Mengusulkan agar TK yayasan dapat dijadikan TK Negeri.
22. Mohon pembangunan gedung TK.
23. Mohon bantuan untuk disediakan tong air (Puskesmas desa Bamban).
24. Minta dipasang gordena, taplak meja dan alas karpet.
25. Mohon bantuan timbangan balita dan penambahan gizi untuk anak balita.
26. Mohon bantuan untuk baju seragam kader posyandu.
27. Mohon agar disediakan tong sampah.
28. Mohon bantuan untuk memperbaiki rumah ibadah teras/WC.
29. Mohon perbaikan tangga pustu desa Bamban.

30. Mohon agar tiap-tiap rumah agar dilaksanakan pengasapan untuk pencegahan DBD.
31. Mohon bantuan kolam terpal.
32. Pengadaan pompa air.
33. Peningkatan jalan usaha tani.
34. Perbaiki jalan dan jembatan menuju ke kebun masyarakat yang berada di wilayah RT.01 desa Tewah Pupuh.
35. Pengadaan sarana air bersih untuk SDN 1 Tewah Pupuh baik itu berupa sumur bor atau sumur biasa.
36. Pembangunan instalasi air bersih untuk mengatasi kesulitan air bersih yang dihadapi oleh hampir seluruh warga desa Tewah Pupuh (RT1, 2, 3, dan 4), minimal dapat membantu pengadaan mesin air yang dapat menyedot air dari sungai dan menyediakan tong-tong air.
37. Pembentukan kelompok-kelompok peternak unggas sebagai tambahan penghasilan rumah tangga.
38. Agar pemerintah daerah melalui instansi terkait melaksanakan fogging atau obat-obatan untuk melenyapkan lalat dan nyamuk.
39. Pengadaan sarana –prasarana sekolah (SD, PAUD dan TK) berupa meja dan kursi yang kondisinya sudah banyak yang rusak.
40. Bantuan 2 (dua) unit laptop untuk tenaga pengajar/guru PAUD guna pembuatan laporan-laporan kegiatan.
41. Bantuan bibit ikan dan unggas dari pemerintah kepada kelompok-kelompok warga.
42. Pembangunan pabrik benih/padi yang dikelola oleh desa Bagok.
43. Bantuan traktor mini untuk pertanian.
44. Pembangunan irigasi sawah (lanjutan) di RT.02 desa Bagok.

45. Perlunya listrik masuk desa dikarenakan sebanyak 5 (lima) kepala keluarga (KK) di desa Bagok RT.01 masih belum teraliri atau menikmati listrik PLN.
46. Pembangunan DAM, pompa air dan irigasi sawah di wilayah RT.02 desa Bagok.
47. Bantuan penampungan air bersih (tong air).
48. Peningkatan badan jalan tembus Bagok-Bamban dan Maragut-Bamban.
49. Adanya makanan pendamping/tambahan dan alat kesehatan bagi masyarakat lanjut usia (lansia).
50. Bantuan seragam bagi lansia.
51. Rehabilitasi rumah pendeta (pastori) GKE Bamban.
52. Bantuan pembinaan untuk kegiatan PAUD di desa Bagok.
53. Peningkatan/perbaiki jalan usaha tani.
54. Meminta bantuan tenaga penyuluhan untuk bagaimana cara mengolah budidaya pertanian, sayur-sayuran yang cocok dengan kondisi iklim dan alam desa Bamban.
55. Peningkatan honor guru sekolah hari ahad (SHA) yang sekarang diterima GKE sebesar Rp. 80.000 di bagi 3.
56. Pengadaan penerangan jalan umum di sepanjang jalan desa Kandris.
57. Pengadaan mobil pemadam kebakaran desa Kandris.
58. Pengadaan 5 (lima) buah tenda beserta kursi untuk desa Kandris.
59. Permintaan 1 (satu) orang petugas medis/perawat di pustu desa kandris.
60. Pembangunan pagar sekolah madrasah ibtidayah desa Kandris.
61. Minta dibentuknya koperasi tabung gas di desa Kandris.

**c. Kecamatan Patangkep Tutui**

1. Pengadaan bibit perkebunan cangkokan rambutan, lengkeng, serta bibit kopi untuk kelompok tani desa Ramania yang berjumlah 6 (enam) kelompok tani.
2. Pengadaan penerangan lampu jalan di desa Ramania.
3. Pembuatan sumur gali 3 (tiga) buah per RT.
4. Minta pembuatan kolam ikan sebanyak 10 (sepuluh) buah di desa Ramania.
5. Peningkatan ruas jalan Ramania Kambitin.
6. Pembuatan drainase beton dan gorong-gorong.
7. Bantuan bibit karet agar kami dapat meremajakan kebun karet kami.
8. Bantuan pembuatan cetak sawah.
9. Pembuatan irigasi persawahan.
10. Perbaikan jalan usaha tani.
11. Mohon pengadaan mobil jenazah.
12. Pembuatan tanggul untuk aliran sungai.
13. Bantuan mesin genset untuk masjid nurul yakin desa Ramania.
14. Pembangunan PDAM di desa Ramania.
15. Pembuatan irigasi di desa Ramania.

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Terdapat 2 indikator kinerja yang digunakan, yaitu: (a) Indikator kinerja kunci pembangunan daerah, (b) Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja kunci pembangunan daerah adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan program-program pembangunan daerah. Indikator-indikator ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan beberapa perubahan sesuai dengan kondisi daerah.

Kelompok Indikator ini dimaksud merupakan kesimpulan (kristalisasi) dari berbagai indikator program pembangunan baik yang merupakan indikator kinerja bagi Perangkat Daerah (PD) dan juga indikator kinerja program lintas PD. Secara garis besar, Indikator Kunci ini, terdiri atas tiga aspek yang selanjutnya dirinci dalam beberapa fokus, sebagai berikut:

#### **A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2. Fokus Kesejahteraan Sosial
3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

#### **B. Aspek Pelayanan Umum**

1. Fokus Pelayanan Dasar
2. Fokus Pelayanan Penunjang

### C. Daya Saing Daerah

1. Fokus Kemampuan ekonomi daerah
2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
3. Fokus Iklim Berinvestasi
4. Fokus Sumber Daya Manusia

Indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 6.1.**

#### **Matriks Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Timur Tahun 2020**

<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>KONDISI AWAL (TAHUN 2018)</b>	<b>TAHUN 2020</b>
LPE	5,98	6,74
IPM	70,57	72,065
IPG	88,16	90,21
Indeks Gini	0,307	0,291
Angka Kriminalitas	0,16	0,1
Indeks Reformasi Birokrasi	NA	78
IKLH	NA	63,15
LPE Sektor Pertanian	6,54	7,27
LPE sektor Industri Pengolahan	7,84	8,92
PDRB Sektor pariwisata	NA	4,7
Jumlah kunjungan wisatawan	10.969	11.735
Pengeluaran perkapita	1.083.989	1.291.995
Nilai investasi berskala nasional (PMDN)	12.000 Milyar	300
Nilai investasi berskala nasional (PMA)	5,70 Juta US\$ (2013)	3,00
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,68	3,34
Rata2 lama sekolah	9,04	9,27
Harapan Lama Sekolah	12,8	13,77
Angka harapan hidup	67,97	68,99
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,8 (2015)	81,55
Persentase panjang jalan kondisi baik	44,48	59,74
Persentase RT yang terakses air bersih	76,2	88,10
Persentase Luas Kawasan (perumahan) Kumuh (%)	34,75	17,38
Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik) (%)	99,84	99,86
Persentase jumlah sampah yang tertangani	73%	75%
Status Indeks Kualitas Air	Cemar Sedang	Cemar Sedang
Status Indeks Kualitas Udara	Baik	Baik
Tutupan Lahan	Rendah	Rendah
Persentase konflik yang diselesaikan (Jumlah Tindak Pidana)	108	54
Persentase wirausaha baru	NA	30*
Jumlah atlet Barito Timur yang berprestasi	231 atlet	267
Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya	3 event budaya	4

<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>KONDISI AWAL (TAHUN 2018)</b>	<b>TAHUN 2020</b>
Predikat Akuntabilitas Kinerja	C	B
Jumlah kasus korupsi	4 (2018)	2
Nilai IKM (Nilai Interval)	3,198	3,245

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

**Tabel 6.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2023**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
01.00	Pertumbuhan PDRB (Milyar Rupiah)	6.320,00	7.539,69	8.235,15	8.994,76	9.824,44	10.730,65
02.00	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	5,98	6,49	6,74	6,99	7,25	7,5
03.00	PDRB per kapita	52,6	59,22	62,87	66,75	70,86	75,22
04.00	Indeks Gini	0,307	0,296	0,291	0,286	0,28	0,275
05.00	IPG	88,16	89,8	90,21	90,62	91,03	91,5
06.00	Angka Kriminalistas	0,16	0,15	0,1	0,1	0	0
07.00	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	76	78	80	82	84
08.00	IKLH	NA	64,23	66,47	68,51	69,34	70,16
09.00	LPE sektor Pertanian	6,54	7,03	7,27	7,51	7,76	8
10.00	LPE sektor Industri Pengolahan	7,84	8,56	8,92	9,28	9,64	10
11.00	Pengeluaran perkapita	1.083.989	1.222.659	1.291.995	1.361.330	1.430.665	1.500.000
12.00	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,68	3,79	3,34	2,89	2,45	2
13.00	Rata2 lama sekolah	9,04	9,19	9,27	9,35	9,42	9,5
14.00	Harapan Lama Sekolah	12,8	13,48	13,77	14,05	14,34	14,63
15.00	Angka harapan hidup	67,97	68,65	68,99	69,32	69,66	70
16.00	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	75,8 (2015)	80,4	81,55	82,7	83,85	85

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
17.00	Persentase konflik yang diselesaikan (Jumlah Tindak Pidana)	108	72	54	36	18	0
18.00	Predikat Akuntabilitas Kinerja	C	CC	B	BB	BB	A
19.00	Jumlah kasus korupsi	4 (2018)	3	2	1	0	0
20.00	Nilai IKM (Nilai Interval)	3,198	3,225 (Baik)	3,245	3,265	3,285	3,305
21.00	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.00	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	7,34	7,49	7,64	7,79	7,95	8,1
23.00	Jumlah penduduk	120.254	127.297	130.971	134.752	138.642	142.644
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>							
01.00	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	1.083.989	1.105.669	1.127.782	1.150.338	1.173.345	1.196.811
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>							
<b>01.00</b>	<b>Pendidikan</b>						
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK)	55	68,60	68,65	68,7	68,75	68,8
1.2.	Angka partisipasi kasar						
01.02.0 1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	109,65	107,24	106,03	104,83	103,62	102,4125
01.02.0 2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	82,45	82,95	83,45	83,95	84,45	84,95

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target					
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.4.	Angka Partisipasi Murni							
01.04.0 1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,47	98,67	98,87	99,07	99,27	99,47	
01.04.0 2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	75,33	75,85	76,33	76,83	77,33	77,83	
<b>02.00</b>	<b>Kesehatan</b>							
02.01.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup	6/1000	5/1000	4/1000	3/1000	2/1000	1/1000	
02.03.	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	6/1000	5/1000	4/1000	3/1000	2/1000	1/1000	
02.04.	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	6/1000	5/1000	4/1000	3/1000	2/1000	1/1000	
02.05.	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup	50/100.000	120/100.000	120/100.000	120/100.000	120/100.000	120/100.000	
02.06.	Rasio Posyandu per satuan balita	1.69	2	2	2	2	2	
02.07.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	1/30.000 pndk	1	1	1	1	1	
02.08.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1/100.000 pddk	1	1	1	1	1	
02.09.	Rasio Dokter per satuan penduduk	28.15	30	30	30	30	30	
02.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani	80%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
02.12	Cakupan Pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	79%	90%	90%	90%	90%	90%
02.13	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.16	Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap	93%	95%	95%	95%	95%	100%
02.17	Cakupan balita pneumonia yang di tangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.18	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.19	Tingkat prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.20	Tingkat Kematian karena Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	0	0	0	0	0	0
02.21	Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
02.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	80,25%	85%	85%	85%	85%	85%
02.23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	94%	100%	100%	100%	100%	100%
02.24	Penderita diare yang di tangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.25	Cakupan Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	85%	100%	100%	100%	100%	100%
02.26	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	95%	100%	100%	100%	100%	100%
02.27	Cakupan kunjungan bayi	90%	100%	100%	100%	100%	100%
02.28	Cakupan Puskesmas	1	1	1	1	1	1
02.29	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	82,64	100%	100%	100%	100%	100%
02.30	Cakupan pelayanan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standart di fasilitas kesehatan	77%	100%	100%	100%	100%	100%
02.31	Cakupan neonatus dengan komplekasi yang di tangani	70%	100%	100%	100%	100%	100%
02.32	Cakupan pelayanan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan	85%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target					
			2019	2020	2021	2022	2023	
	elayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standart							
02.33	Cakupan pelayanan anak balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.34	Presentase balita gizi kurang	0,05%	< 0.045%	< 0.040%	< 0.035%	< 0.030%	< 0.025%	< 0.025%
02.35	Prevalensi balita stunting	17%	15%	12%	9%	7%	5%	5%
02.36	Persentase gizi buruk dan gizi kurang yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.37	Cakupan Desa Siaga Aktif	46%	70%	73%	75%	77%	80%	80%
02.38	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.39	Cakupan anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.40	Jumlah Pengunjung usia 15-59 Tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	96,35%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
02.41	Jumlah Pengunjung usia 60 Tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	84,43%	100%	100%	100%	100%	100%
02.42	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	18%	100%	100%	100%	100%	100%
02.43	Jumlah Penyandang Diabetis Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	17%	100%	100%	100%	100%	100%
02.44	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Psikotik) diwilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	RSUD						
02.47	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit	96	100	110	115	120	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>03.00</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>						
03.01.	Pekerjaan Umum:						
03.01.0 1	Persentase panjang jalan kondisi baik	44,48	54,65	59,74	64,83	69,91	75
03.01.0 2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	61,69%	61,69%	69,09%	75,77%	78,77%	83,18%
03.01.0 4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)	61,69%	61,69%	69,09%	75,77%	78,77%	83,18%
03.01.0 7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	77,29%	77,29%	83,67%	89,77%	92,60%	100%
03.01.1 0	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	40%	50%	60%	70%	80%	90%
03.01.1 1	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	20%	20%	40%	70%	90%	100%
03.01.1 2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	20%	20%	40%	70%	90%	100%
03.01.1 3	Rasio Jaringan Irigasi	30%	30%	50%	70%	85%	100%
03.01.1 4	Persentase penduduk berakses air minum	74,07%	74,07%	77,36%	85,13%	92,56%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
03.01.1 5	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	74,07%	74,07%	77,36%	85,13%	92,56%	100%
03.02.	Penataan Ruang:						
03.02.0 1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	30%	30%	50%	75%	90%	100%
03.02.0 2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	30%	30%	50%	75%	90%	100%
03.02.0 4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	30%	30%	50%	75%	90%	100%
<b>04.00</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>						
04.01	Persentase RT yang terakses air bersih	76,2	84,13	88,1	92,07	96,03	100
04.02	Persentase Luas Kawasan (perumahan) Kumuh (%)	34,75	23,17	17,38	11,58	5,79	0
04.03	Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik) (%)	97,00	97,35	97,85	98,00	98,15	98,51
04.04.	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	84,00	83,00	82,00	81,00	80,00	79,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
04.05.	Persentase RTH Publik yang terkelola	1%	1%	5%	5,5%	6%	6,1%
04.06.	Rasio rumah layak huni	94,37%	95,11%	96,21%	97,03%	98,17%	99,02%
04.07	Pembangunan Jalan dan Drainase Wilayah Perkotaan (m')	13.879	10.000	9.500	9.000	8.500	7.000
04.08	Rehabilitasi Rumah Layak Huni (unit)	1.602	1.500	1.400	1.300	1.200	1.100
04.09	Persentase permukiman yang tertata	60,52%	70%	75%	80%	83%	85%
04.10	Persentase luas permukiman kumuh	0,35%		0,33%	0,31%	0,29%	0,28%
04.11	Persentase luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan	5,34%		5,33%	4,31%	3,29%	3,08%
04.12	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	5,63%		5,13%	4,82%	4,51%	4,21%
04.13	Peningkatan Kualitas lingkungan pada kawasan kumuh desa tertinggal, desa tradisional, dan desa nelayan	NA	0	10 Unit	10 Unit	10 Unit	40 Unit
<b>05.00</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
05.01	Persentase pemeliharaan, penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di Kabupaten Barito Timur		100%	100%	100%	100%	100%
05.02	Persentase Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran sebagai Aparatur Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%
05.03	Terlaksananya pengawasan, pencegahan dan penanggulangan Bencana Alam dan kebakaran		100%	100%	100%	100%	100%
05.04	Cakupan wilayah pelaksanaan deteksi dini ancaman keamanan		100%	100%	100%	100%	100%
05.05	Persentase potensi gangguan keamanan yang terdeteksi		100%	100%	100%	100%	100%
05.06	Cakupan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan Organisasi lainnya		70%	75%	80%	85%	90%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
05.07	Cakupan wilayah pendidikan politik masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%
05.08	Persentase Daerah rawan bencana yang terdeteksi		70%	75%	80%	85%	90%
<b>06.00</b>	<b>Sosial</b>						
06.01.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	26%	100%	100%	100%	100%	100%
06.02.	Prosentase PMKS yang tertangani	36,84%	100%	100%	100%	100%	100%
06.03.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0%	100%	100%	100%	100%	100%
06.04.	Prosentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau sekelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0%	100%	100%	100%	100%	100%
06.05.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	0%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
06.06.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0%	100%	100%	100%	100%	100%
06.07.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	47,81%	100%	100%	100%	100%	100%
06.08.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	0%	100%	100%	100%	100%	100%
06.09.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	16%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Target Indikator SPM</b>						
06.10	Persentase Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	26%	100%	100%	100%	100%	100%
06.11	Prosentase Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di luar panti	36,84%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
06.12	Prosentase Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	16%	100%	100%	100%	100%	100%
06.13	Prosentase Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	0%	100%	100%	100%	100%	100%
06.14	Prosentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/kota	47,81%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>							
<b>01.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>						
01.01.	Angka partisipasi angkatan kerja	59.197 org	61.361	63.629	66.006	68.511	71.173
01.02.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	81,72%	82,18	82,65	83,13	83,61	84,1
01.03.	Tingkat pengangguran terbuka	1,79%	1,66	1,54	1,48	1,3	1,13
01.04.	Rasio penduduk yang bekerja	95,20%	95,41	94,65	94,7	94,76	95,2
01.06.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	80,25%	80,81	81,38	81,9	82,53	83,91
01.07.	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga	22.00 %	23,13	24,73	25,77	27,39	29,26

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target					
			2019	2020	2021	2022	2023	
	terhadap total kesempatan kerja							
01.08.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	50 Kasus	50	45	40	35	30	
01.09.	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	45 Buah PB	45	40	35	30	25	
01.10	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	1.006 org	1.224	1.468	1.761	2.113	2.535	
01.12	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	3.454 orang	3.626	3.806	3.996	4.196	4.405	
01.16	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	24 org	30	50	85	110	145	
01.17	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	35 org	115	130	190	200	220	
01.18	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	5 org	5	8	10	13	15	
01.19	Rasio lulusan S1/S2/S3	9,18%	9,69	10,23	10,79	11,37	11,97	
<b>02.00</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
02.01.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	53,18	53,19	53,21	53,21	53,22	53,27	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
02.02.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20	30	30	30	30	30
02.03.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	41,032	42,065	43,13	44,68	45,07	46,7
02.04.	Rasio KDRT	0,0127	0,0125	0,0122	0,0121	0,0119	0,0114
02.05.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	1,851	1,5	1,2	1	0,5	0
02.06.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	95,14	95,15	95,18	95,2	95,232	95,25
02.07.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100
02.08.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100
02.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	korban kekerasan						
02.20	Indek Pemberdayaan Gender ( IDG )	76,46	78	79	81	83	86
<b>03.00</b>	<b>Pangan</b>						
3.1.	Pencapaian Skor pola pangan harapan (PPH)	90,2	91,4	92,6	93,9	95,1	96,3
3.2.	Penguatan cadangan pangan	1 Gapoktan	2 Gapoktan	3 Gapoktan	3 Gapoktan	3 Gapoktan	3 Gapoktan
3.3.	Penanganan daerah rawan pangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
03.04	Ketersediaan energi dan protein perkapita	93,79%	93,79%	93,79%	93,79%	93,79%	94,00%
03.05	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
<b>04.00</b>	<b>Pertanahan</b>						
03.05	Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan						
<b>05.00</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	1.620	120	120	120	120	
05.26	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota	0	0	1 dokumen RPPLH & Perda RPPLH	0	0	0
05.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	0 (belum terintegritas)	0		Terintegritasi	Terintegritasi	Terintegritasi

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
05.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	1 dokumen KLHS	0	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
05.29	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	56,66/3 titik	57,32	57,81	57,92	61,36	61,36
05.30	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	96,35	96	96,45	96,52	96,73	96,99
05.31	Persentase kualitas Tutupan Lahan	47,71	49	50,5	55,35	55,67	60,46
05.32	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	22 perusahaan					
05.33	Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	5 orang	0	1	1	1	1
05.42	Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	5 Orang	0	1	1	1	1
		2 gps,	0 gps,	0 gps,	1 gps,	0 gps,	0 gps,
		1 paket alat lab,	1 paket alat lab,	0 paket alat lab,			
		1 mobil	1 mobil	0 mobil	0 mobil	0 mobil	0 mobil

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
		0 motor	6 motor	0 motor	0 motor	0 motor	0 motor
		0 drone	1 drone	0 drone	0 drone	0 drone	0 drone
05.43	Timbulan Sampah yang ditangani	17.556 ton/tahun	17.908 ton/tahun	18.266 ton/tahun	18.631 ton/tahun	19.004 ton/tahun	19.384 ton/tahun
05.44	jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0	10 ton/tahun	15 ton/tahun	20 ton/tahun	25 ton/tahun	25 ton/tahun
05.46	Persentase jumlah sampah yang tertangani	73%	80%	85%	87%	91%	95%
05.47	Operasionalisasi TPA/TPST/ SPA di kabupaten	Open dumping	Open dumping	Sanitary Landfill	TPST 3R	TPST 3R	UPTD TPA
05.48	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0	0	1	1	1	1
05.49	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan pelaku usaha dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	0 Perusahaan	35	34	34	32	30
05.50	Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	1	0	1	1	1	3
05.51	Persentase tersedianya data emisi gas rumah kaca (IGRK)	0%	55	57	57	58	58
05.52	Persentase Perlindungan dan Konservasi Sumber	55%	58	58	59	59	60

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Daya Alam (Ekosistem dan Keanakeragaman Hayati)						
05.53	Presentase lahan kritis yang tertangani	0%	57	58	59	60	61
05.54	Terlaksananya inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat (MHA)/hak ulayat	0	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	0
05.55	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	201 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
<b>06.00</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>						
06.01.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,81	0,83	0,85	0,87	0,89	0,91
06.02.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98
06.03	Persentase Penduduk berKTP-el Per Satuan Penduduk	85,51%	87,66%	89,72%	91,34%	93,86%	95,42%
06.04	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	5.237 Lembar	6.762	7.489	8.503	9.614	10.122
06.05	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan	379 Lembar	426	453	532	589	642
06.06	Jumlah Penduduk Kabupaten	112.363 Jiwa	114.048	115.759	117.496	119.258	121.047

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>07.00</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
07.01	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	190	210	215	220	225	230
07.02	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	75	80	85	90	95	100
07.03	Jumlah Desa berstatus swasembada	3	5	7	9	11	13
07.04	Jumlah Desa berstatus swadaya	74	73	72	71	70	69
07.05	Jumlah Desa berstatus swakarya	24	23	22	21	20	19
<b>08.00</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						
08.01.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,86%	2,81%	2,75%	2,70%	2,60%	2,44%
08.02.	Total Fertily Rate (TFR)	2,76%	2,53%	2,23%	2,23%	2,20%	2,18%
08.03.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	66,70%	68,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
08.04.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian	0%	10%	30%	60%	75%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Penduduk						
08.05.	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	1	2	2	2	2
08.06.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	0	1	2	3	4	7
08.07.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	10	15	20	25	35
08.08.	rata-rata jumlah anak per keluarga	2,76	2,53	2,23	2,23	2,2	2,18
08.09.	ratio akseptor KB	80,3	80,5	81	83	83	84

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
08.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,40%	79,55%	80,45%	80,55%	80,71	81,00%
08.11	angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	30,4	11	9	7	5	0
08.12	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	50%	100%	100%	100%	100%	100%
08.13	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeetneed)	11,40%	11,20%	11,10%	11%	10,90%	10,80%
08.14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	67%	72%	74%	76%	77%	80%
08.15	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	13,46%	14,45%	15,45%	16,45%	17,45%	18,45%
08.16	Cakupan anggota keluarga bina keluarga balita (BKB) ber-KB	60%	70%	80%	85%	90%	100%
08.17	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	50%	60%	70%	80%	90%	100%
08.18	Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	50%	60%	70%	80%	90%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
08.19	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	3	3	4	5	6	7
08.20	cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja /Mahasiswa	50%	60%	70%	80%	90%	100%
08.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	50%	60%	70%	80%	90%	100%
08.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	50%	60%	70%	80%	90%	100%
08.23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1	1	1	1	1	1
08.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
08.25	persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
08.26	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	90%	91%	95%	98%	100%	100%
08.27	persentasi remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS)	-	-	-	-	-	-
08.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	18	23	28	33	38	40
08.29	cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	50%	60%	70%	80%	90%	100%
08.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	18 tahun	>20 tahun	>20 tahun	>20 tahun	>20 tahun	>20 tahun
08.31	persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangua keluarga melalui APBD dan APBDes	60%	70%	75%	80%	90%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>09.00</b>	<b>Perhubungan</b>						
09.01.	Rasio sarana dan prasarana layanan perhubungan dalam kondisi baik	65%	70%	75%	80%	85%	90%
09.02.	Persentase cakupan area pelayanan	65%	70%	75%	80%	85%	90%
<b>10.00</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>						
10.01	Jumlah desa yang terjangkau layanan media komunikasi publik radio	-	50	60	70	80	100
10.02	Jumlah desa yang terjangkau layanan media komunikasi publik televisi	-	-	20	30	40	50
10.03	Jumlah Pemirsa Radio dan Televisi milik pemerintah daerah	-	100	200	300	400	500
10.04	Jumlah Radio siaran milik pemerintah daerah	-	-	1	1	1	1
10.05	Jumlah Televisi kabel/UHF milik pemerintah daerah	-	-	-	1	1	1
10.06	Jumlah desa yang diberikan bantuan pesawat radio dan televisi sebagai	-	-	20	30	40	50

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	sarana informasi pedesaan						
10.07	Jumlah media luar ruang dan konvensional yang didiseminasikan/dipublikasi kepada masyarakat	- 50		100	200	300	400
10.08	Jumlah Media Sosial Elektronik milik pemerintah daerah	2	2	3	4	5	6
10.09	Jumlah pengikut/follower/subscriber Media Sosial Elektronik milik pemerintah daerah	100	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
10.10	Jumlah fasilitas layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID	-	-	1	1	1	1
10.11	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	-	-	-	70	80	90
10.12	Rasio pengaduan yang ditangani terhadap pengaduan yang diterima	-	-	60	70	80	90
10.13	Jumlah sarana pengaduan yang tersedia untuk masyarakat	2	2	3	3	4	4
10.14	Jumlah Data Center (server) milik Pemerintah Daerah	1	1	2	2	3	4

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
10.15	Jumlah Media Website milik pemerintah daerah	3	5	10	22	30	43
10.16	Jumlah pengunjung website milik pemerintah daerah	100.000	190.000	266.000	372.400	521.360	729.904
10.17	Jumlah Kantor OPD/UPTD Terkoneksi Jaringan Internet/Intranet	5	5	10	20	43	64
10.18	Jumlah Rata-Rata Kecepatan internet/Bandwidth Kantor OPD/UPTD	5	5	6	7	8	10
10.19	Jumlah Media Center milik Pemerintah Daerah	-	-	1	1	1	1
10.20	Jumlah Aplikasi milik Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	-	2	4	6	8	10
10.21	Jumlah Email go.id untuk OPD dan ASN Pemerintah Daerah	5	43	64	128	256	512
10.22	Jumlah Command Center milik Pemerintah Daerah	-	-	-	-	1	1
10.23	Jumlah CCTV terpasang di ruang publik dan fasilitas vital milik Pemerintah Daerah	-	2	5	8	10	15

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
10.24	Jumlah Security Operation Center (SOC) milik Pemerintah Daerah	-	-	-	-	1	1
10.25	Jumlah Layanan Internet di Ruang Publik	-	1	2	3	4	5
10.26	Jumlah pengunjung/pengguna fasilitas internet di ruang publik	-	3.000	6.000	9.000	12.000	15.000
10.27	Jumlah Desa/Kelurahan yang terjangkau layanan telekomunikasi yang berkualitas	40	60	70	80	90	100
10.28	Jumlah UMKM di Barito Timur yang dilatih/diberdayakan dalam pemanfaatan media online (e-commerce)	-	-	2	4	6	8
10.29	Jumlah UMKM di Barito Timur yang menjalankan usaha melalui media online (e-commerce)	-	-	1	2	4	5
10.30	Prosentase jumlah relawan TIK terhadap desa di Kabupaten Barito Timur	-	-	10	15	20	25

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
10.31	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/Komunitas Kreatif bidang TIK	-	-	1	2	4	5
10.32	Jumlah Pusat Komunitas Kreatif	-	-	-	1	1	1
10.33	Jumlah Angkatan Kerja Muda yang difasilitasi untuk memperoleh pelatihan TIK bersertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	-	-	5	10	15	20
<b>11.00</b>	<b>Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah</b>						
11.01	Persentase koperasi aktif	44,18	54,18	59,18	64,18	69,18	74,18
11.02	Jumlah Koperasi simpan pinjam/ Unit simpan pinjam aktif	26	28	30	32	34	36
11.03	Jumlah UMKM aktif	15.328	15.353	15.378	15.403	15.428	15.453
11.04	Jumlah usaha mikro dan kecil yang memiliki IUMK	50	500	1.000	1.500	2.000	2.500
<b>12.00</b>	<b>Penanaman Modal</b>						
12.01	Nilai investasi berskala nasional (PMDN)	570 Milyar (2013)	700	850	800	950	1000

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
12.02	Nilai investasi berskala nasional (PMA)	5,70 Juta US\$ (2013)	7	8,5	8	9,5	10
12.03	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	79	79	79	79	79	79
12.04	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	447.992.427.605,00	30.513.972.739.142	30.513.972.739.142	30.513.972.739.142	30.513.972.739.142	30.513.972.739.142
12.05	Rasio daya serap tenaga kerja						
12.06	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	447.992.427.605,00	30.065.980.311.537	30.065.980.311.537	30.065.980.311.537	30.065.980.311.537	30.065.980.311.537
<b>13.00</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>						
13.01	Persentase organisasi pemuda yang aktif	65%	70%	75%	80%	85%	90%
13.02	Persentase organisasi olahraga yang aktif	50%	70%	75%	80%	85%	90%
13.04	Jumlah Pelatih yang bersertifikasi	39 Orang	45	65	77	89	92
13.05	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	211 Buah	215	220	225	235	250
13.06	Jumlah atlet berprestasi	72 Orang	186	289	337	405	475
<b>14.00</b>	<b>Statistik</b>						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
14.01	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada
14.02	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada	ada
14.03	Buku "PDRB"						
14.04	Cakupan ketersediaan Data/Informasi/Statistik Daerah		60%	65%	70%	75%	80%
14.05	Jumlah Lab Statistik Center milik Pemerintah Daerah	-	-	-	1	1	
14.06	Jumlah Administrasi Statistik Sektoral yang dipublikasikan secara elektronik	-	-	2	4	6	8
14.07	Jumlah Produk Administrasi Statistik Sektoral yang dipublikasikan kepada masyarakat	-	1	2	3	4	5
<b>15.00</b>	<b>Persandian</b>						
15.01	Cakupan informasi pemerintah penting yang tersandikan		60%	65%	70%	75%	80%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
15.02	Tingkat ketersediaan dukungan peralatan persandian		75%	80%	85%	90%	90%
<b>16.00</b>	<b>Kebudayaan</b>						
16.01	Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya	3 Event	5	6	7	8	9
16.02	Jumlah pembinaan terhadap kelompok penyelenggara seni dan budaya.	12 Kelompok	14	16	18	20	25
16.03	Jumlah Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang dilestarikan	205 Buah dan 16 Buah	225	230	235	240	250
<b>17.00</b>	<b>Perpustakaan</b>						
17.01	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.801	6.240	7.800	9.360	12.480	14.040
17.02	Koleksi bahan Pustaka yang tersedia di Perpustakaan Daerah	19.453	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
17.03	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	4.052	4.152	4.210	4.300	4.400	4.500
17.04	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilaian yang memiliki sertifikat	0	1	2	2	3	4
17.05	Peningkatan Jumlah:						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
17.05.0 1	Perpustakaan Desa	35	37	39	41	43	45
17.05.0 2	Tenaga Pengelola Perpustakaan	70	72	74	76	78	79
17.05.0 3	Koleksi Perpustakaan	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
17.06	Penyediaan Akses Internet kepada Pengunjung	0	1	2	2	2	2
<b>18.00</b>	<b>Kearsipan</b>						
18.01	Pembinaan kearsipan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	5	7	10	12	15	20
18.02	Pengolahan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	50	55	60	75	80	85
18.03	Pembinaan Sumber daya Manusia (SDM) Kearsipan	1	2	3	4	5	6
18.04	Pembinaan Kearsipan Ormas/Orpol Masyarakat	1	2	3	4	5	6
<b>Layanan Urusan Pilihan</b>							
<b>01.00</b>	<b>Pariwisata</b>						
01.01	PDRB Sektor pariwisata	8.810.000,- ( 0,01 % )	0,42%	0,45%	0,50%	0,75%	1,00%
01.02	Jumlah kunjungan wisatawan	10.969 Orang	11.479	11.735	11.990	12.245	12.500
01.03	Jumlah obyek wisata yang dipasarkan	30 Obyek	31	32	33	34	35

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
01.04	Jumlah destinasi pariwisata unggulan yang dikembangkan	12 Obyek	15	17	19	20	22
01.05	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina	3 Kelompok	5	7	9	12	15
<b>02.00</b>	<b>Pertanian</b>						
02.01	Luas Sawah	10.313	10.829	11.334	11.860	12.376	12.891
02.02	Produktivitas Padi Sawah	31,47	31,63	31,85	35,035	38,58	40,509
02.03	Produktivitas Padi Ladang	14,65	14,72	14,82	14,93	15,05	15,81
02.04	Produksi Padi	38.387	38.579	38.887	42.776	44.914	47.159
02.05	Jumlah Produksi Daging (Sapi,kambing, babi)	368.382	105,81	107,92	110,08	112,28	114,53
02.06	Jumlah Produksi Dagingayam/ unggas	621.463	456,55	474,86	484,36	494,04	503,92
02.07	Rasio kasus temuan bahan pangan asal hewan tidak layak konsumsi yang ditangani	-	100%	100%	100%	100%	100%
02.08	Jumlah Anjing yang di Vaksin untuk mencegah kasus Rabies	7.985	8.144	8.303	8.462	8.621	8.780
02.09	Luas Lahan Perkebunan Karet Rakyat	54.260,18	54.460,18	54.569,10	54.678,02	54.786,94	54.895,86

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
02.10	Luas Lahan Perkebunan Kopi Rakyat	30,72	66,72	111,72	156,72	201,72	246,72
02.11	Luas Lahan Perkebunan Kakao Rakyat	74,01	121,01	168,01	215,01	262,01	309,01
02.12	Luas Lahan Perkebunan Sawit Rakyat	449,65	499,65	549,65	599,65	649,65	699,65
<b>03.00</b>	<b>Kehutanan</b>						
03.01.	lahan kritis	71.981,7 Ha	61.698,60 Ha	51.415,50 Ha	41.132,40 Ha	30.849,30 Ha	20.566,20 Ha
03.02.	Kerusakan Kawasan Hutan	59.785 Ha	51.244 Ha	42.704 Ha	34.163,2 Ha	25.622,4 Ha	17.081,6 Ha
<b>04.00</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>						
04.01.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	80%					
04.02.	Rasio ketersediaan daya listrik	80%					
<b>05.00</b>	<b>Perdagangan</b>						
05.01	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (%)	6,95	7,12	7,2	7,27	7,35	7,4
05.02	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal						
	Jumlah pedagang besar	43	48	53	58	60	65
	Jumlah pedagang	218	220	225	230	235	242

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	menengah						
	Jumlah pedagang kecil	210	215	218	221	225	230
05.03.	Tingkat ketersediaan bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
05.04.	Rasio pasar daerah yang representatif	75	78	80	83	85	90
<b>06.00</b>	<b>Perindustrian</b>						
06.01.	Pertumbuhan industri kecil menengah	637	643	680	710	750	800
06.02	Jumlah kontribusi PDRB dari sector industry (dalam juta rupiah)	125.000	130.000	135.000	145.000	150.000	155.000
06.03	Jumlah IKM baru		5	5	5	5	5
06.04	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	7,64	8	9	10	11	12
06.05	Jumlah IKM	637	643	680	710	750	800
06.06	Jumlah Tenaga Kerja Industri	1.393	1.320	1.470	1.520	1.570	1.620
06.07	Nilai investasi industri (Juta Rupiah)	13.083,95	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
<b>07.00</b>	<b>Transmigrasi</b>						
07.01.	Persentase transmigran swakarsa						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>08.00</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>						
08.01.	Produksi perikanan (Ton)	2.190,04	2.409,04	2.649,95	2.914,94	3.206,44	3.527,08
08.02.	Konsumsi ikan (Org/Kg/Kapita)	25	27,5	30	33	36,3	39,9
08.04.	Jumlah KUB (Kel.Usaha Bersama)	25	27	29	32	35	38
08.05	Jumlah kebijakan bidang IKM yang diterbitkan bidang perikanan	0	1	1	1	1	1
08.06	Koperasi perikanan	0	5	7	9	11	13
<b>Penunjang Urusan</b>							
<b>01.00</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>						
01.01.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dokumen					
01.02.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1 dokumen					
01.03.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1 dokumen					
01.04.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dokumen					

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>02.00</b>	<b>Keuangan</b>						
02.01.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
02.02.	Nilai Maturitas SPIP	3,08	3,57	4,33	5,02	5,77	6,38
02.03.	Skor LKIP	CC	B	B	B+	A	A
02.04.	Skor EKPPD	3,05	3,87	5,06	6,32	6,79	7,02
02.05.	Peresentase anggaran dengan realisasi	95,11%	95,20%	95,35%	95,60%	95,80%	96,00%
02.06.	Persentase SILPA terhadap APBD	3,34%	3,33%	3,32%	3,33%	3,34%	3,35%
02.07.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	3,20%	3,19%	3,18%	3,20%	3,22%	3,25%
02.08.	Persentase belanja pendidikan (20%)	22,66%	22,70%	22,75%	22,85%	22,90%	23,05%
02.09.	Persentase belanja kesehatan (10%)	15,86%	15,89%	15,90%	15,95%	15,98%	16,03%
02.10	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	57:43:00	56:43:00	53:47:00	52:48:00	51:49:00	50:50:00
02.11	Bagi hasil kabupaten/ kota dan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.12	Penetapan APBD	Sesuai jadwal					
<b>03.00</b>	<b>Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
03.01	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03.02.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	1%	6%	10%	14%	17%	20%
03.03.	Persentase Data Kediklatan terdokumentasi dan terpublikasi	50%	100%	100%	100%	100%	100%
03.04.	Persentase Siswa/I SMA/MA mendapatkan informasi penerimaan IPDN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03.05.	Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	28	36	36	36	36	36
03.06.	Jumlah pemangku jabatan administrator pada instansi pemerintah	135	149	149	149	149	149
03.07.	Jumlah pemangku jabatan pengawas pada instansi pemerintah	401	516	516	516	516	516
03.08.	Jumlah pemangku jabatan pelaksana pada instansi pemerintah	1052	1100	1075	1050	1025	1000

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
03.09.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2086	2100	2075	2050	2025	2000
03.10.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,198	3,225	3,245	3,265	3,285	3,305
<b>04.00</b>	<b>Penelitian dan pengembangan</b>						
04.01	Rasio kajian litbang yang diterapkan		10%	20%	30%	40%	50%
<b>05.00</b>	<b>Pengawasan</b>						
05.01.	Persentase tindak lanjut temuan	75%	75%	77%	80%	85%	90%
05.02	Jumlah Temuan hasil pemeriksaan APIP Kabupaten	36	30	29	28	26	25
<b>06.00</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>						
06.01	Jumlah perda inisiatif DPRD yang ditetapkan	2	2	2	2	2	2

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Substansi RKPD ini merupakan hasil sinkronisasi antar pelaku kepentingan dan antar SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Barito Timur, dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang faktual dihadapi di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Kabupaten Barito Timur, aparat Pemerintah Kabupaten serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Barito Timur, dalam merumuskan berbagai kebijakan bidang pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan sosial kemasyarakatan pada Tahun Anggaran 2020, untuk menjadikan daerah Kabupaten Barito Timur menjadi aman, maju dan mandiri dengan masyarakat yang makmur dan sejahtera, sebagaimana mottonya “ **Gumi Jari Janang Kalalawah** “.